

Pembelajaran

ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

Berbasis Etnopedagogi

Dr. Deny Setiawan M.Si.
Dra. Rosnah Siregar, S.H.,M.Si.
Maulana Arafat Lubis, M.Pd.

ISBN : 978-623-6942-35-2



Pembelajaran

ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

Berbasis Etnopedagogi

Etnopedagogi menjadi aktualisasi pembelajaran yang berorientasi pada penanaman nilai-nilai kearifan lokal. Bagaikan pendekatan, etnopedagogi di perguruan tinggi butuh diimplementasikan dengan strategi ataupun media pembelajaran inovatif yang sanggup menarik atensi mahasiswa untuk menguasai serta mengaplikasikan kearifan lokal. Selain itu, etnopedagogi menjadi salah satu alternatif pendekatan pendidikan yang bisa digunakan untuk meningkatkan proses pendidikan, salah satunya pada pembelajaran IPS dengan memakai nilai-nilai kearifan lokal sebagai sumber belajar.

Kehadiran buku ini berperan penting dalam menambah pengetahuan serta sumber belajar bagi mahasiswa, guru, maupun dosen pada lingkup perguruan tinggi, khususnya dalam membangun kampus berkarakter dengan sejumlah identitas keaslian yang melekat sebagai jati-dirinya. Buku ini berisikan penjelasan tentang *Konsep Pendidikan IPS; Perkembangan Pendidikan IPS; Pendidikan IPS Terpadu; Materi Kajian dalam Pendidikan IPS; Pendidikan Nilai dalam Pembelajaran IPS; Pendidikan IPS Berorientasi Karakter Kebangsaan; Pendidikan IPS Sebagai Program Penguatan Nilai-Nilai Kearifan Lokal.*

Selamat membaca dan semoga bermanfaat.



Penerbit : CV. AA. RIZKY
Alamat : Jl. Raya Ciruas Petir,
Puri Citra Blok B2 No. 34 Pipitan
Kec. Walantaka - Serang Banten
E-mail : aa.rizkypress@gmail.com
Website : www.aarizky.com

ISBN 978-623-6942-35-2



**PEMBELAJARAN
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
BERBASIS ETNOPEDAGOGI**

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

PEMBELAJARAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL BERBASIS ETNOPELAGOGI

**Dr. Deny Setiawan M.Si.
Dra. Rosnah Siregar, S.H.,M.Si.
Maulana Arafat Lubis, M.Pd.**



**PENERBIT:
CV. AA. RIZKY
2020**

PEMBELAJARAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL BERBASIS ETNOPELAGOGI

© Penerbit CV. AA RIZKY

Penulis:

**Dr. Deny Setiawan M.Si.
Dra. Rosnah Siregar, S.H.,M.Si.
Maulana Arafat Lubis, M.Pd.**

Desain Sampul dan Tata Letak:

Tim Kreasi CV. AA. RIZKY

Cetakan Pertama, Desember 2020

Penerbit:

CV. AA. RIZKY

Jl. Raya Ciruas Petir, Puri Citra Blok B2 No. 34
Kecamatan Walantaka, Kota Serang - Banten, 42183
Hp. 0819-06050622, Website : www.aarizky.com
E-mail: aa.rizkypress@gmail.com

Anggota IKAPI

No. 035/BANTEN/2019

ISBN : 978-623-6942-35-2

viii + 196 hlm, 23 cm x 15,5 cm

Copyright © 2020 CV. AA. RIZKY

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penulis dan penerbit.

Isi diluar tanggungjawab Penerbit

PRAKATA

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat-Nya buku ajar ini yang berjudul "Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Berbasis Etnopedagogi" dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Buku ajar ini bukanlah dimaksudkan sebagai satu-satunya sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran pendidikan IPS. Komunitas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial masih perlu menambah berbagai rujukan lain yang relevan dan berkaitan dengan pengayaan materi pembelajaran.

Pengayaan buku ajar "Pembelajaran IPS Berbasis Etnopedagogi" ini disusun sebagai luaran dari hasil penelitian internal yang dilaksanakan pada tahun 2020, namun secara luas tujuan pengayaan buku ajar ini dimaksudkan sebagai program sistemik penguatan nilai-nilai karakter kebangsaan yang dalam programnya diharapkan dapat turut membentuk kompetensi sosial mahasiswa.

Secara garis besar, bab yang terdapat dalam buku ini terdiri dari: Bab I. Konsep Pendidikan IPS; Bab II. Perkembangan Pendidikan IPS; Bab III. Pendidikan IPS Terpadu; Bab IV. Materi Kajian dalam Pendidikan IPS; Bab V. Pendidikan Nilai dalam Pembelajaran IPS; Bab VI. Pendidikan IPS Berorientasi Karakter Kebangsaan; Bab VII. Pendidikan IPS sebagai Program Penguatan Nilai-Nilai Kearifan Lokal.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan bahan ajar ini. Untuk itu kritik, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diperlukan guna penyempurnaan dikemudian hari. Semoga buku ajar ini bermanfaat dalam memperkaya khazanah Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.

Medan, Desember 2020

Team Penulis,

DAFTAR ISI

PRAKATA ____ v

DAFTAR ISI ____ vi

BAB I KONSEP PENDIDIKAN IPS ____ 1

A. Petunjuk Belajar ____ 1

B. Kompetensi ____ 1

C. Konten ____ 2

1. Hakikat Pendidikan IPS ____ 2

2. Pengertian Pendidikan IPS ____ 6

3. Sejarah dan Latar Belakang Pendidikan IPS
____ 9

4. Tujuan Pendidikan IPS ____ 13

5. Ruang Lingkup Pendidikan IPS ____ 14

D. Latihan ____ 17

BAB II PERKEMBANGAN PENDIDIKAN IPS ____ 19

A. Petunjuk Belajar ____ 19

B. Kompetensi ____ 19

C. Konten ____ 20

1. Perkembangan Pendidikan IPS di Indonesia
____ 20

2. Pengembangan Kurikulum IPS Sekolah
Dasar di Indonesia ____ 20

3. Beberapa Permasalahan PIPS di Perguruan
Tinggi ____ 21

4. Pengembangan Kurikulum IPS Sekolah
Dasar di Indonesia ____ 25

5. Paradigma Pendidikan IPS di Indonesia
____ 37

D. Latihan ____ 50

BAB III PENDIDIKAN IPS TERPADU ____ 51

A. Petunjuk Belajar ____ 51

B. Kompetensi ____ 52

C. Konten ____ 52

1. Konsep Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
____ 52

2. Pendekatan Pembelajaran Terpadu dalam IPS ____ 55

3. Pembelajaran IPS Terpadu ____ 57

4. Konsep Pembelajaran Terpadu dalam IPS ____ 58

D. Latihan ____ 61

BAB IV MATERI KAJIAN DALAM PENDIDIKAN IPS
____ 63

A. Petunjuk Belajar ____ 63

B. Kompetensi ____ 63

C. Konten ____ 64

1. Karakteristik Pendidikan IPS ____ 64

2. Materi Kajian Pendidikan IPS ____ 66

3. Pengorganisasian Materi IPS ____ 70

4. Bentuk Materi IPS ____ 73

5. Beberapa Sistem Menyusun Materi IPS ____ 74

D. Latihan ____ 75

BAB V PENDIDIKAN NILAI DALAM PEMBELAJARAN IPS
____ 77

A. Petunjuk Belajar ____ 77

B. Kompetensi ____ 78

C. Konten ____ 78

1. Pengertian Nilai, Norma, dan Moral ____ 78

2. Hakikat Nilai ____ 90

3. Nilai dan Karakter ____ 101

4. Nilai-nilai dan Karakter Warga Negara ____ 114

D. Latihan ____ 139

BAB VI PENDIDIKAN IPS BERORIENTASI KARAKTER KEBANGSAAN
____ 141

A. Petunjuk Belajar ____ 141

B. Kompetensi ____ 142

C. Konten ____ 142

1. Hakikat Pendidikan Karakter ____ 142

2. Tujuan Pendidikan Budaya dan Karakter ____ 144

3. Posisi Pendidikan IPS dalam Pembangunan Karakter ____ 145
4. Pendidikan IPS sebagai Program Pembangunan Karakter Bangsa ____ 150
5. Pembangunan Karakter dalam Pembelajaran IPS ____ 153
6. Desain Pendidikan Karakter Berbasis Kecerdasan Moral dalam Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial ____ 156

D. Latihan ____ 170

BAB VII PENDIDIKAN IPS SEBAGAI PROGRAM PENGUATAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL

____ 171

A. Petunjuk Belajar ____ 171

B. Kompetensi ____ 171

C. Konten ____ 171

1. Pendahuluan ____ 171

2. Hakikat Kearifan Lokal ____ 173

3. Sumber dan Pilar Kearifan Lokal ____ 178

4. Peran Kearifan Lokal dalam Kehidupan Bermasyarakat ____ 180

D. Latihan ____ 182

DAFTAR PUSTAKA ____ 183

BIOGRAFI PENULIS ____ 193

BAB I

KONSEP PENDIDIKAN IPS

A. Petunjuk Belajar

Bagian awal dari buku ini, pada dasarnya ingin mengajak Anda untuk mengkaji konsepsi yang terkandung dalam Pendidikan IPS, sehingga para mahasiswa dapat memiliki dasar yang kuat dalam mengkaji Pendidikan IPS secara komprehensif. Untuk itu pada kegiatan awal pembelajaran IPS, Anda diminta untuk membentuk kelompok kerja guna mengkaji kembali materi yang terdapat pada mata kuliah Pengembangan Materi IPS (Mata Kuliah IPS I).

Pengkajian kembali materi-materi yang ada pada mata kuliah IPS 1 melalui kelompok kerja menjadi penting sebagai dasar dalam memahami pembelajaran IPS Terpadu (Mata Kuliah IPS 2). Artinya, mata kuliah Pembelajaran IPS Terpadu sebagai lanjutan dari mata kuliah Pengembangan Materi IPS, menuntut Anda untuk mengkaji kembali materi-materi IPS yang ada pada: Geografi, Sejarah, Ekonomi dan Sosiologi. Pemahaman terhadap dasar-dasar materi Geografi, Sejarah, Ekonomi dan Sosiologi menjadi penting sebagai dasar pemikiran dalam pembelajaran IPS Terpadu.

B. Kompetensi

Setelah Anda selesai mempelajari bab 1 ini, diharapkan Anda dapat menjelaskan tentang:

- 1) Hakikat Pendidikan IPS
- 2) Pengertian Pendidikan IPS
- 3) Sejarah dan Latar Belakang Pendidikan IPS
- 4) Tujuan Pendidikan IPS
- 5) Ruang Lingkup Pendidikan IPS

Pemahaman secara komprehensif terhadap lima materi di atas, menjadi syarat bagi Anda dalam memenuhi

kompetensi yang pertama, yakni pemilikan kompetensi konsepsi tentang Pendidikan IPS.

C. Konten

1. Hakikat Pendidikan IPS

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS) pada hakikatnya merupakan program pendidikan yang mengkaji persoalan kehidupan manusia dalam interaksinya dengan lingkungan fisik maupun dengan lingkungan sosialnya. Pendidikan IPS tidak selalu bertaraf akademik universitas, namun dapat merupakan bahan-bahan pelajaran yang berfungsi bagi murid-murid sekolah dasar sebagai pengantar dan kelanjutan disiplin ilmu-ilmu sosial. Kerangka pendidikan IPS tidak ditekankan pada bidang teoritis, melainkan lebih pada bidang praktis dalam mengkaji dan mempelajari gejala dan masalah sosial yang berkembang di masyarakat. Pendidikan IPS lebih merupakan pengetahuan praktis yang dapat diajarkan mulai dari SD sampai dengan perguruan tinggi dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner dengan menggunakan berbagai bidang keilmuan (Nursid, 2007).

Hakikat pendidikan IPS yang lain sebagaimana dikemukakan oleh Hasan (Isjoni, 2007) bahwa: Pendidikan IPS dapat diartikan sebagai pendidikan yang memperkenalkan konsep, generalisasi; teori, cara berpikir, dan cara bekerja berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial. Pendidikan IPS merupakan perwujudan dari suatu pendekatan interdisipliner dari ilmu-ilmu sosial, pendidikan IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial seperti, sosiologi, ekonomi, geografi, sejarah dan sebagainya yang disajikan secara psikologis untuk kepentingan pendidikan. Pendidikan IPS merupakan *“those portion or aspects of the social sciences that have been selected awl udopted use in the school or other instructional situations”*. Pendidikan IPS bukanlah ilmu sosial (IS), sekalipun bidang perhatiannya

sama, yaitu hubungan timbal balik manusia (*human relationship*).

Pendidikan IPS merupakan dasar untuk mengembangkan tujuan kurikulum yang berupaya membentuk warga negara yang baik dalam suatu masyarakat yang demokratis di tengah-tengah negara dan masyarakat dunia, serta membentuk intelektual dan membina kesadaran, baik secara pribadi maupun sebagai anggota dalam memecahkan masalah sosial. Sebagai suatu bidang studi, IPS membekali intelektual siswa dalam membina kesadaran hidup di tengah masyarakat yang kompleks dan majemuk, sehingga dapat membentuk pribadi yang mandiri. Partisipasi dan peran aktif siswa memecahkan masalah sangat menunjang dalam menentukan keputusan hidup bermasyarakat. Pendidikan IPS pada intinya merupakan perpaduan antara konsep-konsep ilmu sosial dengan konsep-konsep pendidikan yang dikaji secara sistematis, psikologis dan fungsional sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik dan untuk tujuan pendidikan.

Istilah IPS secara resmi mulai dipergunakan di Indonesia sejak tahun 1975, yang sebenarnya istilah tersebut diambil dari pengertian *sosial studies* (studi sosial) yang pertama kali berkembang di Amerika Serikat. Oleh karena itu sifat IPS sama dengan studi sosial, yaitu praktis, interdisiplin, dan diajarkan mulai dari pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi. Sehubungan dengan batasan pengertian IPS (Ischak, 1997), mengemukakan bahwa IPS adalah bidang studi yang mempelajari, menelaah, menganalisis gejala dan masalah sosial di masyarakat dengan meninjau dari berbagai aspek kehidupan sebagai satu perpaduan. Hal ini sesuai dengan pendapat Nursid bahwa hakikat yang dipelajari pada pengajaran IPS adalah mempelajari, menelaah, mengkaji sistem kehidupan manusia di permukaan bumi ini (Sumaatmaja, 1984).

Lebih lanjut Sumaatmadja (1980: 11) mengemukakan, secara mendasar pengajaran IPS berkenaan dengan kehidupan manusia yang melibatkan segala tingkah laku dan kebutuhannya. IPS berkenaan dengan cara manusia menggunakan usaha memenuhi kebutuhan materilnya, memenuhi kebutuhan budayanya, kebutuhan kejiwaannya, pemanfaatan sumber daya yang ada di permukaan bumi, mengatur kesejahteraan dan pemerintahannya, dan lain sebagainya.

Berdasarkan pendapat tersebut, tampak bahwa IPS sama dengan studi sosial, sehingga Sumaatmadja (1980:10) mengemukakan bahwa pengertian studi sosial dengan IPS tidak ada bedanya. Sementara Djahiri dan Ma'mun (1978:2) menyatakan, bahwa IPS merupakan ilmu pengetahuan yang memadukan sejumlah konsep pilihan dari cabang-cabang ilmu sosial dan ilmu lainnya serta kemudian diolah berdasarkan prinsip pendidikan dan didaktik untuk dijadikan program pengajaran pada tingkat persekolahan.

Kehidupan dalam masyarakat modern adalah sangat kompleks dan sangat membutuhkan pengetahuan dan keterampilan karena sebuah keluarga bisa jadi tidak mampu mengajari pada anak dan pumudanya pengetahuan-pengetahuan yang mereka butuhkan. Dengan demikian adalah tanggung jawab sekolah untuk mentransmisikan pengetahuan, keterampilan, nilai dan perilaku yang sangat dibutuhkan oleh generasi muda. Dalam NCSS tahun 1994 (Jarolimeck dan Sunal, 1993) mengemukakan bahwa misi utama dari pendidikan IPS adalah untuk membantu anak mempelajari dunia sosial dimana mereka hidup dan bagaimana hal tersebut terjadi, mempelajari realita sosial, dan untuk mengembangkan pengetahuan, tingkah laku, dan keterampilan yang diperlukan untuk membentuk proses pencerahan umat manusia.

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD/MI

sampai SMP/MTs. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SD/MI mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggungjawab, serta warga dunia yang cinta damai. Dimasa yang akan datang peserta didik akan menghadapi tantangan berat karena kehidupan masyarakat global selalu mengalami perubahan setiap saat. Oleh karena itu mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis.

Mata pelajaran IPS disusun sistematis, komprehensif, dan terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan di masyarakat. Dengan pendekatan tersebut diharapkan peserta didik akan memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada bidang ilmu yang berkaitan.

IPS adalah suatu bahan kajian yang terpadu yang merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi dan modifikasi yang diorganisasikan dari konsep-konsep dan keterampilan-keterampilan Sejarah, Geografi, Sosiologi, Antropologi, dan Ekonomi (Puskur, 2001:9). Geografi, Sejarah dan Antropologi merupakan disiplin ilmu yang memiliki keterpaduan yang tinggi. Pembelajaran Geografi memberikan wawasan berkenaan dengan peristiwa-peristiwa dengan wilayah-wilayah, sedangkan Sejarah memberikan kebulatan wawasan berkenaan dengan peristiwa-peristiwa dari berbagai periode. Antropologi meliputi studi-studi komparatif yang berkenaan dengan nilai-nilai kepercayaan, struktur sosial, aktivitas-aktivitas ekonomi, organisasi politik, ekspresi-ekspresi dan spiritual, teknologi, dan benda-benda budaya dari budaya-budaya terpilih. Ilmu Ekonomi tergolong kedalam

ilmu-ilmu tentang kebijakan pada aktivitas-aktivitas yang berkenaan dengan pembuatan keputusan. Sosiologi merupakan ilmu-ilmu tentang perilaku seperti konsep peran, kelompok, institusi, proses interaksi dan kontrol sosial.

Menurut Soemantri (2001:73), perbedaan antara ilmu-ilmu sosial (*Sosial Science*) dengan Pendidikan IPS (*Sosial Studies Education, Sosial Studies*) bukanlah perbedaan prinsipil, melainkan hanya perbedaan gradual. Ilmu-ilmu sosial diorganisasikan secara sistematis dan dibangun melalui penyelidikan ilmiah dan penelitian yang sudah direncanakan, sedangkan Pendidikan IPS terdiri atas bahan pilihan yang sudah disederhanakan dan diorganisasikan secara psikologis dan ilmiah untuk kepentingan tujuan pendidikan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan IPS adalah disiplin ilmu-ilmu sosial ataupun integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial seperti: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, dan antropologi yang mempelajari masalah-masalah sosial.

2. Pengertian Pendidikan IPS

Pendidikan IPS terdiri dari dua kata yaitu Pendidikan dan IPS. Pendidikan mengandung pengertian suatu perbuatan yang disengaja untuk menjadikan manusia memiliki kualitas yang baik. Sedangkan IPS merujuk pada kajian yang memusatkan perhatiannya pada aktivitas kehidupan manusia (Supriatna, 2009:3).

Pendidikan IPS merupakan suatu program pendidikan dan bukan sub-disiplin ilmu tersendiri, sehingga tidak akan ditemukan baik dalam nomenklatur filsafat ilmu, disiplin ilmu-ilmu sosial (*sosial science*), maupun ilmu pendidikan (Soemantri. 2001: 89). *Sosial Science Education Council* (SSEC) dan *National Council for Sosial Studies* (NCSS), menyebut IPS sebagai "*Sosial Science Education*" dan "*Sosial Studies*". Dengan kata lain, IPS mengikuti cara pandang yang bersifat terpadu

dari sejumlah mata pelajaran seperti: geografi, ekonomi, ilmu politik, ilmu hukum, sejarah, antropologi, psikologi, sosiologi, dan sebagainya.

Dalam bidang pengetahuan sosial, ada banyak istilah. Istilah tersebut meliputi: Ilmu Sosial (*Sosial Sciences*), Studi Sosial (*Sosial Studies*) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

a. Ilmu Sosial (*Sosial Science*)

Sanusi (1971), memberikan batasan tentang Ilmu Sosial adalah sebagai berikut: "Ilmu Sosial terdiri disiplin-disiplin ilmu pengetahuan sosial yang bertaraf akademis dan biasanya dipelajari pada tingkat perguruan tinggi, makin lanjut makin ilmiah".

Menurut Gross (Djahiri, 1981:1), Ilmu Sosial merupakan disiplin intelektual yang mempelajari manusia sebagai makhluk sosial secara ilmiah, memusatkan pada manusia sebagai anggota masyarakat dan pada kelompok atau masyarakat yang ia bentuk.

Sumaatmadja dan Mardi (1999), menyatakan bahwa Ilmu Sosial adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia baik secara perorangan maupun tingkah laku kelompok. Oleh karena itu Ilmu Sosial adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat.

b. Studi Sosial (*Sosial Studies*)

Perbedaan dengan Ilmu Sosial, Studi Sosial bukan merupakan suatu bidang keilmuan atau disiplin akademis, melainkan lebih merupakan suatu bidang pengkajian tentang gejala dan masalah sosial. Tentang Studi Sosial ini, Sanusi (1971:18) memberi penjelasan sebagai berikut: Studi Sosial tidak selalu bertaraf akademis-universitas, bahkan merupakan bahan-bahan pelajaran bagi siswa sejak pendidikan dasar.

c. Pengetahuan Sosial (IPS)

Harus diakui bahwa ide IPS berasal dari literatur pendidikan Amerika Serikat. Nama asli IPS di Amerika Serikat adalah "*Sosial Studies*". Istilah tersebut pertama kali dipergunakan sebagai nama sebuah komite yaitu "*Committee of Sosial Studies*" yang didirikan pada tahun 1913. Tujuan dari pendirian lembaga itu adalah sebagai wadah himpunan tenaga ahli yang berminat pada kurikulum Ilmu-ilmu Sosial di tingkat sekolah dan ahli-ahli Ilmu-ilmu Sosial yang mempunyai minat sama.

Definisi IPS menurut *National Council for Sosial Studies* (NCSS), mendefinisikan IPS sebagai berikut: *sosial studies is the integrated study of the science and humanities to promote civic competence. Within the school program, social studies provides coordinated, systematic study drawing upon such disciplines as anthropology, economics, geography, history, law, philosophy, political science, psychology, religion, and sociology, as well as appropriate content from the humanities, mathematics, and natural sciences. The primary purpose of sosial studies is to help young people develop the ability to make informed and reasoned decisions for the public good as citizen of a culturally diverse, democratic society in an interdependent world.*

Lebih lanjut Soemantri (2001: 103) memberi batasan Pendidikan IPS sebagai berikut:

- a) Pendidikan IPS merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi dan modifikasi dari disiplin akademis ilmu-ilmu sosial yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis-psikologis untuk tujuan institusional pendidikan dasar dan menengah dalam kerangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila (untuk Pendidikan Dasar dan Menengah).
- b) Pendidikan IPS adalah seleksi dari struktur disiplin akademik ilmu-ilmu sosial yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah (dan psikologis) untuk

mewujudkan tujuan pendidikan FPIPS dalam kerangka pencapaian tujuan pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila (untuk FPIPS dan Jurusan IPS-FKIP).

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan IPS merupakan penggabungan dari ilmu-ilmu sosial yang disajikan berdasarkan prinsip pendidikan untuk diajarkan pada tingkat sekolah.

3. Sejarah dan Latar Belakang Pendidikan IPS

Bidang studi IPS yang masuk ke Indonesia adalah berasal dari Amerika Serikat, yang di negara asalnya disebut *Sosial Studies*. Pertama kali *Sosial Studies* dimasukkan dalam kurikulum sekolah adalah di Rugby (Inggris) pada tahun 1827, atau sekitar setengah abad setelah Revolusi Industri (abad 18), yang ditandai dengan perubahan penggunaan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Latar belakang dimasukkannya *Sosial studies* dalam kurikulum sekolah di Amerika Serikat berbeda dengan di Inggris karena situasi dan kondisi yang menyebabkannya juga berbeda. Penduduk Amerika Serikat terdiri dari berbagai macam ras diantaranya ras Indian yang merupakan penduduk asli, ras kulit putih yang datang dari Eropa dan ras Negro yang didatangkan dari Afrika untuk dipekerjakan di perkebunan-perkebunan negara tersebut.

Pada awalnya penduduk Amerika Serikat yang multi ras itu tidak menimbulkan masalah. Baru setelah berlangsung perang saudara antara utara dan selatan atau yang dikenal dengan Perang Budak yang berlangsung tahun 1861-1865 dimana pada saat itu Amerika Serikat siap untuk menjadi kekuatan dunia, mulai terasa adanya kesulitan, karena penduduk yang multi ras tersebut merasa sulit untuk menjadi satu bangsa. Selain itu juga adanya perbedaan sosial ekonomi yang sangat tajam. Para pakar kemasyarakatan dan

pendidikan berusaha keras untuk menjadikan penduduk yang multi ras tersebut menjadi merasa satu bangsa yaitu bangsa Amerika. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan memasukkan sosial studies ke dalam kurikulum sekolah di negara bagian Wisconsin pada tahun 1892. Setelah dilakukan penelitian, maka pada awal abad 20, sebuah Komisi Nasional dari *The National Education Association* memberikan rekomendasi tentang perlunya sosial studies dimasukkan ke dalam kurikulum semua sekolah dasar dan sekolah menengah Amerika Serikat. Adapun wujud *sosial studies* ketika lahir merupakan semacam ramuan dari mata pelajaran sejarah, geografi dan civics.

Di samping sebagai reaksi para pakar Ilmu Sosial terhadap situasi sosial di Inggris dan Amerika Serikat, pemasukan *Sosial Studies* ke dalam kurikulum sekolah juga dilatarbelakangi oleh keinginan para pakar pendidikan. Hal ini disebabkan mereka ingin agar setelah meninggalkan sekolah dasar dan menengah, para siswa: (1) menjadi warga negara yang baik, dalam arti mengetahui dan menjalankan hak-hak dan kewajibannya; (2) dapat hidup bermasyarakat secara seimbang, dalam arti memperhatikan kepentingan pribadi dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, para siswa tidak perlu harus menunggu belajar Ilmu-ilmu Sosial di perguruan tinggi, tetapi sebenarnya mereka sudah mendapat bekal pelajaran IPS di sekolah dasar dan menengah. Pengembangan Pendidikan IPS SD 1-9. Pertimbangan lain dimasukkannya *sosial studies* ke dalam kurikulum sekolah adalah kemampuan siswa sangat menentukan dalam pemilihan dan pengorganisasian materi IPS. Agar materi pelajaran IPS lebih menarik dan lebih mudah dicerna oleh siswa sekolah dasar dan menengah, bahan-bahannya diambil dari kehidupan nyata di lingkungan masyarakat. Bahan atau materi yang diambil dari pengalaman pribadi, teman-teman sebaya, serta lingkungan alam, dan

masyarakat sekitarnya. Hal ini akan lebih mudah dipahami karena mempunyai makna lebih besar bagi para siswa dari pada bahan pengajaran yang abstrak dan rumit dari Ilmu-ilmu Sosial.

Latar belakang dimasukkannya bidang studi IPS ke dalam kurikulum sekolah di Indonesia sangat berbeda dengan di Inggris dan Amerika Serikat. Pertumbuhan IPS di Indonesia tidak terlepas dari situasi kacau, termasuk dalam bidang pendidikan, sebagai akibat pemberontakan G30S/PKI, yang akhirnya dapat ditumpas oleh Pemerintahan Orde Baru. Setelah keadaan tenang pemerintah melancarkan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Pada masa Repelita I (1969-1974) Tim Peneliti Nasional di bidang pendidikan menemukan lima masalah nasional dalam bidang pendidikan. Kelima masalah tersebut antara lain:

- 1) Kuantitas, berkenaan dengan perluasan dan pemerataan kesempatan belajar.
- 2) Kualitas, menyangkut peningkatan mutu lulusan.
- 3) Relevansi, berkaitan dengan kesesuaian sistem pendidikan dengan kebutuhan pembangunan.
- 4) Efektivitas sistem pendidikan dan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
- 5) Pembinaan generasi muda dalam rangka menyiapkan tenaga produktif bagi kepentingan pembangunan nasional.

Pada tahun 2004, pemerintah melakukan perubahan kurikulum kembali yang dikenal dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Dalam kurikulum SD, IPS berganti nama menjadi Pengetahuan Sosial. Pengembangan kurikulum Pengetahuan Sosial merespon secara positif berbagai perkembangan informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan relevansi program pembelajaran Pengetahuan Sosial dengan keadaan dan kebutuhan kehidupan masyarakat sebagai sistem sosial, tumbuh dengan fungsi-fungsinya yang semakin terdeferensiasi

sebagai akibat pertumbuhan sosial yang begitu pesat, yang dalam perkembangannya ternyata telah banyak menimbulkan masalah sosial.

Masalah sosial yang ada dalam masyarakat, tidak bisa dilihat oleh satu disiplin ilmu sosial saja, tetapi harus dilihat dari berbagai macam disiplin, baik interdisipliner maupun multidisiplin. Selama ini perkembangan spesialisasi dalam dunia ilmu pengetahuan terlampau tajam, sehingga spesialisasi studi salah satu disiplin, seringkali melepaskan diri dari masalah sosial yang biasanya dihadapi oleh manusia. Jika demikian halnya, maka ilmu-ilmu sosial yang berdiri sendiri itu, kurang fleksibel untuk dipakai menghadapi masalah yang terdapat dalam masyarakat. Mempelajari pelajaran secara terpisah-pisah menurut disiplinnya saja, tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat, sehingga dilihat dari sudut kepentingan peserta didik tidak banyak manfaatnya.

Peristiwa-peristiwa dalam masyarakat pada hakikatnya adalah serba terpadu dengan aneka ragam fenomena yang ada. Oleh sebab itu, pengetahuan yang disajikan kepada peserta didik, sedapat mungkin dibuat terpadu dari mata pelajaran mata pelajaran yang semula terpisah-pisah, yang dipilih dari materi-materi yang sesuai baik ditinjau dari sudut kedewasaan maupun dari sudut lingkungan psikis peserta didik.

Faktor-faktor inilah yang merupakan latar belakang munculnya *sosial studies* di negara kita, yang di sekolah dikenal dengan nama IPS. Namun IPS ini bukan merupakan ilmu yang berdiri sendiri, tetapi IPS merupakan pengetahuan terapan yang dilakukan di sekolah antara lain untuk mengembangkan kepekaan peserta didik terhadap kehidupan sosial sekitarnya, agar kelak mereka menjadi warga negara yang baik.

4. Tujuan Pendidikan IPS

Tujuan utama Ilmu Pengetahuan Sosial ialah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. Tujuan tersebut dapat dicapai manakala program-program pelajaran IPS di sekolah diorganisasikan secara baik. Mampu mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu membangun diri sendiri agar *survive* yang kemudian bertanggung jawab membangun masyarakat.

Tujuan pendidikan IPS dikembangkan atas pemikiran bahwa pendidikan IPS merupakan suatu disiplin ilmu. Oleh karena itu, pendidikan IPS harus mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, tujuan pendidikan IPS adalah mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menguasai disiplin ilmu-ilmu sosial untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih tinggi (Supriatna, 2009: 5). Sedangkan menurut Sapriya (2009: 12) mengemukakan bahwa "Pembelajaran IPS di tingkat sekolah bertujuan untuk mempersiapkan para peserta didik sebagai warga negara yang menguasai pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), sikap dan nilai (*attitudes and values*) yang dapat digunakan sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah pribadi atau masalah sosial serta kemampuan mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan agar menjadi warga negara yang baik." Sedangkan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang mulai diberlakukan sejak tahun 2006 sebagai pengganti dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) tahun 2004, mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

- 1) Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya,

- 2) Memiliki kemampuan dasar untuk berfikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial,
- 3) Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan,
- 4) Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama, dan berkompetisi dalam masyarakat majemuk, ditingkat lokal, nasional dan global.

IPS merupakan mata pelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas dan bertanggung jawab. Proses pembelajaran dan penilaian dalam mata pelajaran IPS perlu memperhatikan tidak hanya menekankan pada dampak instruksional yang terbatas pada pengembangan aspek-aspek afektif dan psikomotorik serta memperoleh dampak pengiringannya saja, tetapi pembelajaran dan pengelolaan kelas harus mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif dan produktif untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa melalui keterlibatannya secara proaktif dan interaktif. Keterlibatan tersebut akan mendorong siswa memiliki pengalaman belajar yang bermakna untuk mengembangkan kehidupan dan prilakunya.

Dengan demikian pendidikan IPS mempunyai tujuan sebagai mata pelajaran yang mengajarkan bagaimana menjadi warga negara yang baik serta mampu menyesuaikan diri diberbagai lingkungan sehingga menjadi individu yang memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik.

5. Ruang Lingkup Pendidikan IPS

Secara mendasar, pembelajaran IPS berkenaan dengan kehidupan manusia yang melibatkan segala tingkah laku dan kebutuhannya. IPS berkenaan dengan cara manusia memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan untuk memenuhi materi, budaya, dan kejiwaannya;

memanfaatkan sumber-daya yang ada dipermukaan bumi; mengatur kesejahteraan dan pemerintahannya maupun kebutuhan lainnya dalam rangka mempertahankan kehidupan masyarakat manusia. Singkatnya, IPS mempelajari, menelaah, dan mengkaji sistem kehidupan manusia di permukaan bumi ini dalam konteks sosialnya atau manusia sebagai anggota masyarakat.

Dengan pertimbangan bahwa manusia dalam konteks sosial demikian luas, pengajaran IPS pada jenjang pendidikan harus dibatasi sesuai dengan kemampuan peserta didik tiap jenjang, sehingga ruang lingkup pengajaran IPS pada jenjang pendidikan dasar berbeda dengan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Pada jenjang pendidikan dasar, ruang lingkup pengajaran IPS dibatasi sampai pada gejala dan masalah sosial yang dapat dijangkau pada geografi dan sejarah. Terutama gejala dan masalah sosial kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan sekitar peserta didik MI/SD.

Pada jenjang pendidikan menengah, ruang lingkup kajian diperluas. Begitu juga pada jenjang pendidikan tinggi: bobot dan keluasan materi dan kajian semakin dipertajam dengan berbagai pendekatan. Pendekatan interdisipliner atau multidisipliner dan pendekatan sistem menjadi pilihan yang tepat untuk diterapkan karena IPS pada jenjang pendidikan tinggi menjadi sarana melatih daya pikir dan daya nalar mahasiswa secara berkesinambungan. Sebagaimana telah dikemukakan di depan, bahwa yang dipelajari IPS adalah manusia sebagai anggota masyarakat dalam konteks sosialnya, ruang lingkup kajian IPS meliputi (a) substansi materi ilmu-ilmu sosial yang bersentuhan dengan masyarakat dan (b) gejala, masalah, dan peristiwa sosial tentang kehidupan masyarakat. Kedua lingkup pengajaran IPS ini harus diajarkan secara terpadu karena pengajaran IPS

tidak hanya menyajikan materi-materi yang akan memenuhi ingatan peserta didik tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, pengajaran IPS harus menggali materi-materi yang bersumber pada masyarakat. Dengan kata lain, pengajaran IPS yang melupakan masyarakat atau yang tidak berpijak pada kenyataan di dalam masyarakat tidak akan mencapai tujuannya.

Pendidikan IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan masyarakat yang dinamis. IPS disusun secara sistematis, komprehensif dan terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan di masyarakat. Pada perkembangannya Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD/MI sampai perguruan tinggi. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu-isu sosial "Melalui pendidikan IPS peserta didik diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggungjawab", (Depdiknas, 2006: 97). Pembelajaran Pengetahuan Sosial adalah proses untuk melatih keterampilan siswa, baik keterampilan fisik maupun berpikir dalam mengkaji dan menjadi jalan keluar atas masalah yang dialaminya.

Lebih lanjut, Depdiknas (2003:3), menguraikan tujuan pembelajaran pengetahuan sosial sebagai berikut:

- 1) Tujuan pembelajaran Pengetahuan Sosial adalah 1) memperoleh pengetahuan; 2) mengembangkan kemampuan berpikir dan menarik kesimpulan secara kritis; 3) melatih kemampuan belajar mandiri; 4) mengembangkan kebiasaan dan keterampilan yang bermakna, serta 5) melatih menggunakan pola-pola kehidupan di masyarakat.

- 2) Tujuan Pengetahuan Sosial adalah mempersiapkan anak untuk menjadi warga negara yang baik, mengajarkan anak tentang cara berpikir dan menyampaikan warisan kebudayaan kepada anak.
- 3) Mengembangkan kemampuan dan keterampilan agar siswa mampu hidup selaras, serasi, dan seimbang di lingkungannya.

D. Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Coba jelaskan kembali dengan pandangan dan pemikiran Anda sendiri mengenai:
 - a. Hakikat Pendidikan IPS.
 - b. Pengertian Pendidikan IPS.
- 2) Uraikan secara singkat, padat dan jelas, mengenai sejarah dan latar belakang Pendidikan IPS di Indonesia.
- 3) Coba Anda bandingkan tujuan Pendidikan IPS dan ruang lingkup Pendidikan IPS dari buku ini dengan tujuan Pendidikan IPS dan ruang lingkup Pendidikan IPS dari sumber buku lain. Buatlah perbandingan tersebut dalam bentuk tabel.

BAB II

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN IPS

A. Petunjuk Belajar

Pada bab II dalam buku ini, Anda diajak untuk menyelami sejarah perkembangan Pendidikan IPS di Indonesia. Pemikiran mengenai konsep pendidikan IPS di Indonesia sebenarnya banyak dipengaruhi oleh pemikiran *sosial studies* di Amerika Serikat yang dianggap sebagai salah satu negara yang memiliki pengalaman panjang dan reputasi akademis yang signifikan dalam bidang itu. Reputasi tersebut tampak dalam perkembangan pemikiran mengenai bidang itu seperti dapat disimak dari berbagai karya akademis antara lain diublikasikan oleh NCSS sejak pertemuan organisasi tersebut untuk pertama kalinya tanggal 28-30 November 1935 sampai sekarang.

Oleh karena itu, dalam menelusuri sejarah perkembangan pemikiran atau konsep pendidikan IPS di Indonesia, Anda disarankan untuk secara historis epistemologis mempelajari sejarah perkembangan pemikiran *sosial studies* di Amerika Serikat. Istilah *sosial studies*, yang kemudian di Indonesia diterjemahkan menjadi Pendidikan IPS menunjukkan pemikiran *sosial studies* di Amerika turut mempengaruhi pemikiran Pendidikan IPS di Indonesia. Dengan demikian pada bab ini, Anda melalui kelompok kerja diminta untuk menelusuri beberapa literatur yang mengupas sejarah perkembangan *sosial studies* di Amerika dan membandingkannya dengan sejarah perkembangan Pendidikan IPS di Indonesia.

B. Kompetensi

Setelah Anda selesai mempelajari bab II ini diharapkan Anda dapat menjelaskan tentang:

- 1) Perkembangan Pendidikan IPS di Indonesia.

2) Pengembangan Kurikulum IPS Sekolah Dasar di Indonesia.

3) Paradigma Pendidikan IPS di Indonesia.

Pemahaman secara komprehensif terhadap tiga materi di atas, menjadi syarat bagi Anda dalam memenuhi kompetensi yang kedua, yakni pemilikan kompetensi berkenaan dengan sejarah perkembangan Pendidikan IPS.

C. Konten

1. Perkembangan Pendidikan IPS di Indonesia

Urgensinya peranan Pendidikan IPS dalam menyokong tujuan pendidikan nasional telah direspon secara positif kalangan sarjana dan ilmuwan sosial untuk memantapkan format jati diri Pendidikan IPS di Indonesia. Seminar, sarsehan maupun konvensi-konvensi nasional diselenggarakan untuk menjembatani secara akademis upaya pemantapan format Pendidikan IPS di Indonesia. Perlu dibuat kerangka sistematis yang memuat kerangka Pendidikan IPS di sekolah menengah, dengan Pendidikan IPS di perguruan tinggi.

2. Pendidikan IPS di Sekolah Menengah

Salah satu arah pengembangan Pendidikan IPS untuk kalangan sekolah menengah, menurut Numan Sumantri (2001:44) dimaksudkan untuk:

- 1) Menekankan tumbuhnya nilai kewarganegaraan, moral, ideologi negara dan agama.
- 2) Menekankan pada isi dan metode berfikir ilmuwan.
- 3) Menekankan *reflective inquiry*.
- 4) PIPS mengambil kebijakan 1, 2, dan 3 di atas.

Pengertian pertama mungkin secara tegas telah terformat dalam Pendidikan Kewarganegaraan, tetapi untuk yang ke-2, ke-3 dan ke-4, masih lemah implementasinya. Dalam praktik pelaksanaan program Pendidikan IPS di sekolah selama ini belum mendapatkan respon yang menggembirakan. Pengetahuan tentang pokok permasalahan bukan hanya diketahui oleh guru

tetapi juga harus mengkomunikasikan pengetahuan tersebut kepada peserta didik. Kemampuan guru menghubungkan konsep yang abstrak dengan pengalaman peserta didik adalah salah satu contoh bagaimana kemampuan mengkomunikasikan pengetahuan jauh melampaui sekedar pengetahuan tentang fakta tersebut (Gunawan, 2013:162). Permasalahan lain adalah bahwa buku pelajaran tidak mengikuti akan pendekatan proses pengambilan keputusan dan pendekatan pemecahan masalah. Implikasinya bahwa pengajaran Pendidikan IPS terasa kering dan membosankan.

Selain itu, keadaan tersebarnya kondisi sekolah, media pendidikan yang kurang memadai, administrasi pendidikan yang kurang dikelola dengan baik, dan kuatnya pengaruh pendekatan ekspositori dan belajar pasif merupakan penghambat aktualisasi Pendidikan IPS. Kesimpulannya, bahwa Pendidikan IPS belum dirasakan mempunyai kontribusi besar dalam pemenuhan kebutuhan hidup sebagian besar masyarakat, disebabkan oleh karena faktor intern (upaya pembelajaran) dan faktor ekstern (paradigma masyarakat yang konsumeris, hedonis dan pragmatis).

3. Beberapa Permasalahan PIPS di Perguruan Tinggi

Upaya pengembangan PIPS di perguruan tinggi menghadapi beberapa kendala diantaranya adalah:

- 1) Penelitian-penelitian skripsi maupun tesis, sering tidak mempunyai arti penting secara praktis dalam kehidupan masyarakat, atau kadang hanya sebagai usaha persyaratan memperoleh gelar sarjana. Penelitian-penelitian skripsi di perguruan tinggi belum menunjukkan kuantitas dan kualitas yang menggembirakan berkaitan dengan peningkatan kualitas pembelajaran IPS. Sebagian mahasiswa lebih tertarik untuk membuat skripsi yang berkaitan dengan bidang studi khususnya. Masih sangat jarang skripsi

yang mengkaji pembelajaran IPS secara terpadu. Hal ini menyebabkan kajian PIPS di SMP dan SMA kurang seimbang. Kalaupun ada mahasiswa yang meneliti pembelajaran IPS di SMP, belum menunjukkan kajian IPS integral tetapi lebih cenderung mengkaji materi yang berhubungan dengan bidang studi ilmu sosialnya. Seharusnya fakultas PIPS membuat kerangka sistematis untuk menyeimbangkan kajian ilmiah mahasiswa baik skripsi maupun penelitian lainnya yang berkaitan dengan PIPS terpadu.

- 2) Rendahnya mutu guru lulusan LPTK, baik disebabkan oleh faktor intern, maupun kebijakan pemerintah yang kadang kurang adil. Kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada pendidikan menyebabkan perhatian terhadap peningkatan kualitas guru kurang optimal. Profesi guru bukan pekerjaan yang menjadi cita-cita utama, akibatnya input dan output LPTK pencetak guru kurang optimal. Nilai rata-rata input masuk perguruan tinggi pada prodi-prodi FPIPS masih rendah disbanding program studi lain terutama MIPA, Teknik dan Bahasa.
- 3) Belum matangnya para sarjana IPS antara bidang keilmuan dengan kependidikan, sehingga ketika mereka terjun dilapangan kadang tidak memahami salah satunya, atau bahkan kedua-duanya. Mengapa terjadi demikian? Hal ini disebabkan oleh malasnya sebagian guru yang telah mengajar untuk terus mengembangkan bidang keilmuannya. Hanya sebagian kecil guru yang termotivasi untuk mengembangkan ilmu pendidikan dan ilmu bidang studinya dalam rangka pengembangan kompetensi diri. Hal ini bisa dilihat dengan sulitnya terpenuhi jumlah karya penelitian guru ketika hendak mengajukan kenaikan pangkat di Golongan IV bagi pegawai negeri. Kenyataan ini tentu bukan sekedar kesalahan yang dilakukan oleh guru. Bagaimana mungkin mereka mempunyai semangat untuk

mengembangkan diri kalau kesejahteraan yang dimiliki kurang mencukupi?

- 4) Kurangnya koordinasi antara LPTK, masyarakat dan pemerintah untuk mengatasi masalah tenaga kependidikan secara adil dan demokratis. Idealnya antara pemerintah, sekolah, lembaga tinggi kependidikan dan masyarakat mengoptimalkan hubungan yang sinergis dalam menyiapkan dan mengembangkan tenaga kependidikan. Perguruan tinggi harus membuka diri bersama-sama sekolah dan pemerintah untuk memperbaiki kualitas pendidikan IPS.
- 5) Teori-teori pendidikan, khususnya psikologi pendidikan sebagian sulit untuk diaplikasikan secara sistematis dan berkesinambungan. Untuk pengembangan pembelajaran IPS, seharusnya sekolah bersama lembaga pendidikan tinggi berkolaborasi merumuskan konsep pembelajaran secara menarik dan berkualitas. Kegiatan ini dapat dilakukan dalam bentuk penelitian bersama. Walaupun selama ini sudah ada beberapa penelitian kolaborasi dosen dan guru, misalnya Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dibiayai Dikti, namun jumlahnya sangat minim. Idealnya penelitian berbasis perbaikan kualitas proses pembelajaran terus diintensifkan sebab melalui penelitian tindakan secara langsung guru akan melaksanakan pembaharuan pembelajaran dengan perbaikan metode-metode pembelajaran.
- 6) Perkembangan dan perubahan masyarakat yang begitu cepat akibat eksekutif globalisasi, di satu sisi menjadi penghambat aktualisasi tujuan PIPS. Apabila tujuan pendidikan IPS adalah untuk membentuk warga negara yang baik, tentu warga negara yang taat akan hukum dan norma yang berkembang di masyarakat. Dampak globalisasi di satu sisi memberikan pengaruh negatif atas masuknya budaya dan eksekutif hasil kebudayaan yang tidak sesuai dengan

kondisi masyarakat Indonesia. Perkembangan iptek yang begitu pesat tidak mungkin melakukan proteksi kebudayaan asing. Inilah salah satu contoh fenomena yang harus dihadapi pendidikan IPS dalam era globalisasi.

Kalangan ilmuwan dan pengambil kebijakan telah melakukan usaha untuk revitalisasi PIPS, dengan melakukan berbagai pemantapan paradigma baru PIPS yang lebih kredibel. Beberapa usaha pembenahan PIPS adalah dengan melakukan berbagai pembenahan kurikulum baik untuk tingkat dasar menengah, dan perguruan tinggi. Penerapan Kurikulum 2004 (KBK) merupakan salah satu terobosan untuk membuat PIPS menjadi lebih bermakna, walaupun hasilnya belum jelas kelihatan kurikulum ini telah dikubur. Keluarnya KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) secara prinsip sebenarnya ingin membuat pengembangan kurikulum IPS secara integral di pendidikan dasar (SD dan SMP).

Pendidikan IPS di SD sudah mulai tertata sebagai pendidikan IPS integral. Tetapi bagaimana dengan konsep kurikulum PIPS di SMP? Konsep kurikulum Pendidikan IPS di SMP masih menunjukkan konsep yang terpisah, atau paling dekat adalah *correlated*. Konsep pendidikan IPS di SMP hanya sekedar membagi-bagi tema dalam bentuk SK dan KD yang dikelompokkan dalam program semester dan tahunan. KTSP belum menunjukkan kurikulum IPS yang terpadu, walaupun namanya IPS dan buku pelajarannya rencananya digabungkan dalam satu nama buku IPS SMP. Tetapi apa gunanya membuat bungkus IPS kalau isinya masih terpisah-pisah? Kurikulum IPS di SMP saat ini ibarat kereta api dan Sejarah, Geografi, Ekonomi, Sosiologi dan Antropologi sebagai gerbongnya. Walaupun sudah diketuk sebagai kurikulum yang digunakan mulai tahun 2006, namun hendaknya KTSP perlu dikaji ulang. Perombakan kurikulum tentu akan memakan cost yang sangat tinggi. Masalah ini dapat dilakukan dengan

melakukan lokakarya intensif untuk perbaikan kualitas pembelajaran IPS.

Konversi IKIP menjadi universitas pada 10 IKIP negeri di Indonesia merupakan salah satu bagian usaha memantapkan format LPTK yang mampu menguasai bidang kependidikan dan keilmuan. Sudahkah usaha tersebut berhasil? Memang setelah konversi IKIP menjadi universitas kecenderungan masyarakat untuk masuk perguruan tinggi eks IKIP cenderung naik. Tetapi bagaimana dengan kenaikan jumlah mahasiswa yang memilih prodi pendidikan? Kecenderungan masyarakat untuk memilih Prodi Pendidikan masih belum seperti yang diharapkan bersama.

4. Pengembangan Kurikulum IPS Sekolah Dasar di Indonesia

Kurikulum Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Sekolah Dasar tahun 2006 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 tahun 2006 tanggal 23 Mei 2006, mempunyai karakteristik tersendiri karena kurikulum IPS yang mulai berlaku tahun ajaran 2006 itu tidak menganut istilah pokok bahasan, namun cukup simpel, yakni Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Hal ini jauh lebih sederhana dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya dengan jam pelajaran yang relatif lebih sedikit perminggunya. Kesemuanya ini memberikan peluang yang luas bagi guru sebagai pengembang kurikulum untuk berkreasi dalam pengembangan kurikulum yang mengacu pada pembelajaran IPS yang PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan). Ditangan gurulah, kurikulum ini dapat hidup dan berkembang karena pengembangan materi kurikulum akan baik apabila sesuai dengan tingkat pengembangan nalar siswa, perbedaan perseorangan/individu dan kemampuan daya serap siswa, suasana pembelajaran yang kondusif, serta sarana dan sumber belajar yang tersedia.

Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, Kurikulum Tahun 2006 lebih simpel dan efektif, namun memiliki nuansa yang padat dan memiliki paradigma baru dalam pembelajaran IPS. Hal ini diharapkan agar guru dapat mandiri, mau dan mampu menentukan sendiri pendekatan, metode dan alat evaluasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi.

Apabila kita simak uraian materi kurikulum Pendidikan IPS SD tahun 2006 bersifat hanya memberi rambu-rambu untuk kedalaman dan keluasan materi dalam mencapai kompetensi dasar yang diharapkan. Disini aspirasi setempat (muatan lokal) dapat dituangkan dalam proses pembelajaran IPS Terpadu. Materi pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Sekolah Dasar terdiri dari materi Geografi, Sejarah, Sosiologi dan Ekonomi. Materi IPS SD tidak tampak secara nyata, namun tertata secara terpadu dalam standar kompetensi yang dimulai sejak kelas 1 sampai kelas 3 yang dilaksanakan melalui pendekatan tematik, sedangkan pada kelas 4 sampai 6 dilaksanakan melalui pendekatan pembelajaran.

Berbeda halnya dengan kurikulum IPS 1994, materi pelajaran ditata terpadu dan lebih sederhana daripada materi kurikulum IPS 1986 dan Kurikulum IPS 1975 yang masih tampak berdiri sendiri - sendiri, namun Kurikulum IPS tahun 2006 tertata dalam standar kompetensi dari kelas 1 sampai kelas 6. Materi kurikulum IPS 1994 merupakan korelasi antara berbagai ilmu atau disiplin item penunjangnya. Dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, yakni kurikulum IPS 1986, 1975 dan 1968, yang belum tampak korelasi adalah Kurikulum IPS 1986 dimana materi IPS masih berdiri sendiri-sendiri secara terpisah dan merupakan *broad - field* antara ilmu Bumi Sejarah dan Pengetahuan Kewarganegaraan.

Dalam kurikulum 1975 unsur pendidikan kewarganegaraan dalam IPS mulai dipisahkan dan dijadikan bidang studi tersendiri dengan nama Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Dalam kurikulum 1994 antara IPS

dan PMP tetap terpisah hanya PMP mengalami perubahan nama menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PIPS), PIPS diajarkan sejak kelas 1, sedangkan IPS diajarkan mulai kelas 3.

Ditinjau dari segi kurikuler, kurikulum 1964 lebih menekankan unsur tujuan pendidikan kewargaan Negara/moral. Bahkan dalam kurikulum 1968 lebih menonjol. Unsur tersebut dalam kurikulum 1975, 1986 dan 1994 terwadahi dalam bidang studi PMP/PIPS. Dari segi penyusunan tujuan kurikuler, kurikulum 1994 sama dengan kurikulum 1986, yakni 4 tujuan kurikuler IPS, masing-masing 1 tiap kelas dan 3 tujuan kurikuler Sejarah Nasional dan masing-masing 1 tiap kelas.

Dari segi lingkup bahan pengajaran, Kurikulum 1994 tetap menggunakan *pendekatan spiral* (yakni pengajar yang dimulai dari lingkungan terdekat dan sederhana sampai lingkungan yang semakin meluas dan kompleks) yang pada dasarnya pendekatan ini diterapkan pada Kurikulum 1994, 1968, 1975 dan 1986. Khusus untuk Sejarah Nasional pendekatan yang digunakan adalah pendekatan periodisasi yaitu penyampaian bahan pelajaran dimulai dari zaman kuno sampai dengan sejarah kotemporer. Dalam kurikulum 1994 materi sejarah nasional ditambah dengan Sejarah Lokal sedangkan dalam kurikulum 1986, 1975 dan 1968 pendekatan periodisasi tetap digunakan, hanya pada kurikulum 1986 materi Sejarah Nasional tidak seluas Kurikulum 1975 karena disamping Sejarah Nasional terdapat pula bidang studi Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB).

Dari segi materi kurikulum, secara umum dapat dikatakan bahwa sejak kurikulum 1964 dengan kurikulum 1986 memperlihatkan perkembangan materi yang semakin padat dan sarat, namun pada kurikulum 1994 materi mulai disederhanakan dan diserahkan kepada guru selaku pengembang kurikulum untuk memperluas dan memperdalam materi. Hal ini terlihat hanya terdapat 29 pokok bahasan, sedangkan dalam kurikulum 1986

terdapat 39 pokok bahasan. Sebagai perbandingan jumlah pokok bahasan pada kurikulum 1964 sebanyak 18, Kurikulum 1968 sebanyak 19 dan Kurikulum 1975 sebanyak 29 pokok bahasan.

Dari segi alokasi waktu yang disediakan, pada dasarnya antara Kurikulum 1986 dengan kurikulum 1994 jumlah waktu yang disediakan tidak mengalami perbedaan yang berarti, namun dalam kurikulum IPS 2006 alokasi waktu relatif lebih sedikit yakni 3 jam dalam satu minggu (3 x 35 menit). Perbedaan yang esensi terletak pada jumlah pokok bahasan karena kurikulum 1986 padat dan sarat dengan materi sehingga kedalaman dan keluasan materi diserahkan sepenuhnya kepada guru pengembang kurikulum, sementara Kurikulum 2006 lebih simpel lagi, untuk lebih jelasnya, perbedaan antara kurikulum SD 1994 dengan kurikulum 2006, dapat disimak dalam uraian di bawah ini.

Perbedaan penekanan antara kurikulum SD Tahun 1994 dengan kurikulum tahun 2006 akan diuraikan berikut ini:

a. Kurikulum SD 1994

Dalam kurikulum SD 1994 lebih menekankan hal-hal sebagai berikut:

1) Membaca, Menulis dan Berhitung

Kemampuan membaca, menulis dan berhitung merupakan kemampuan dasar yang sangat diperlukan karena membantu siswa dalam mempelajari dan memahami mata pelajaran. Akan tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa dewasa ini masih banyak sekolah dasar di kelas tinggi belum menguasai kemampuan-kemampuan dasar tersebut. Oleh sebab itu, kurikulum 1994 dipusatkan pada penguasaan ketiga kemampuan dasar tersebut, diantaranya dengan menambah jam pelajaran untuk bahasa Indonesia dan Matematika.

2) Muatan Lokal

Mata pelajaran Muatan Lokal merupakan suatu wahana untuk menyajikan sejumlah bahan pelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh masing-masing daerah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan alam, sosial dan budaya yang ada di daerah bersangkutan.

Bahan pelajaran tersebut dapat diorganisasikan dalam berbagai mata pelajaran yang berada di dalam naungan Muatan Lokal, misalnya bahan mata pelajaran Bahasa Daerah, Bahasa Inggris untuk SD, Budi Pekerti, Tulis Arab Indonesia, Tulis huruf Alquran, Baca tulis Arab Melayu, Keterampilan, Pertanian, Peternakan, Kepariwisata, Adat Istiadat, Kesenian Daerah dan kerajinan.

3) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)

Sesuai dengan UUSPN Pasal 39 ayat 2 dan 3, pasal 14 ayat 2 dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa siswa sendiri mungkin diperkenalkan pada teknologi dalam bentuk informasi dan perilaku teknologi. Oleh karena itu, Kurikulum SD 1994 ini mengandung bahan kajian mengenai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi sederhana sesuai dengan tingkat perkembangan/kemampuan siswa serta perkembangan zaman.

4) Wawasan Lingkungan

Dalam rangka memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, pemerintah mempergunakan media untuk menyampaikan pesan dan memasyarakatkan wawasan lingkungan ini. Salah satu media itu adalah pendidikan. Perhatian dan kepedulian siswa sekolah dasar terhadap lingkungan hidup harus dikembangkan sedini mungkin. Upaya pengembangan pengetahuan, wawasan sikap, dan kebiasaan yang berkaitan dengan persoalan kebersihan, kesehatan dan

kelestarian lingkungan hidup dilakukan melalui mata pelajaran Pendidikan Agama, PIPS, IPS, IPA, Penjaskes dan Mulok.

5) Pengembangan Nilai

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan memegang peran kunci. Dalam usaha itu, pendidikan tidak hanya memperhatikan pengembangan kemampuan untuk menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) saja, tetapi juga mengembangkan kepribadian siswa secara keseluruhan, termasuk pengembangan sikap dan nilai serta Iman dan Taqwa (IMTAQ). Berbagai mata pelajaran di sekolah dasar dapat mengembangkan nilai-nilai melalui kegiatan belajar mengajar. Mata pelajaran pendidikan Agama dan PIPS, misalnya mengutamakan perwujudan nilai-nilai didalam pembelajarannya. Selain itu mata pelajaran lainnya, seperti Bahasa Indonesia, IPA, IPS, juga mengembangkan nilai-nilai tertentu.

6) Pengembangan Keterampilan

Keterampilan merupakan hasil belajar yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari baik di luar maupun di dalam kelas. Keterampilan itu meliputi keterampilan fisik atau manual, keterampilan sosial dan keterampilan kognitif.

Keterampilan manual meliputi keterampilan menggunakan alat-alat, seperti penggaris dalam mengukur dan alat-alat lain yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yang sesuai dengan tingkat usia dan kemampuan siswa.

Keterampilan sosial, antara lain meliputi keterampilan diskusi, memimpin suatu pertemuan atau kegiatan dan mengatur serta melakukan kerjasama dalam suatu kelompok.

Keterampilan kognitif meliputi keterampilan seperti mengamati, menafsirkan, berkomunikasi,

mengajukan pertanyaan, merancang, merencanakan kegiatan (misalnya eksperimen), membandingkan, menganalisis, menarik kesimpulan dan mengarang atau menyusun suatu laporan sederhana. Keterampilan-keterampilan tersebut membantu siswa dalam pembelajaran itu dalam memperoleh, mengembangkan dan menerapkan pengetahuan.

b. Kurikulum SD 2006

Pada Kurikulum SD Tahun 2006 lebih menekankan hal-hal sebagai berikut:

1) Kerangka Dasar Kurikulum

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:

- a) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia
- b) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian
- c) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi
- d) Kelompok mata pelajaran estetika
- e) Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan.

Cakupan setiap kelompok mata pelajaran di atas, disajikan sebagaimana pada tabel berikut:

No	Kelompok Mata Pelajaran	Cakupan
1.	Agama dan Akhlak Mulia	Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dimasukkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak

		mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti atau moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama.
2.	Kewarganegaraan dan Kepribadian	Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia, kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme.
3.	Ilmu	Kelompok mata

	Pengetahuan dan Teknologi	pelajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada SD/MI/SDLB dimaksudkan untuk mengenal, menyikapi, dan mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menanamkan kebiasaan berfikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif dan mandiri.
4.	Estetika	Kelompok mata pelajaran estetika dimaksudkan untuk meningkatkan sensitivitas, kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni. Kemampuan mengapresiasi dan mengekspresikan keindahan serta harmoni mencakup apresiasi dan ekspresi, baik dalam kehidupan individual dan masyarakat, sehingga mampu menikmati dan mensyukuri hidup maupun kehidupan kemasyarakatan dan mampu menciptakan kebersamaan yang harmonis.
5.	Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan

		pada SD/MI/SDLB dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta menanamkan sportivitas dan kesadaran hidup sehat.
--	--	--

2) Prinsip Pengembangan Kurikulum

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah dengan berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi serta panduan penyusunan yang dibuat oleh BSNP.

Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik serta lingkungannya.

Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi netral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan.

- b) Beragam dan terpadu

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan, tanpa membedakan agama suku,

- budaya, dan adat istiadat, serta status sosial ekonomi dan gender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal dan pengembangan diri secara terpadu serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tetap antara substansi.
- c) Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- d) Relevan dengan kebutuhan kehidupan
Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan hidup, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokalisional disinergikan.
- e) Menyeluruh dan berkesinambungan
Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan atitar semua jenjang pendidikan.
- f) Belajar sepanjang hayat
Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung

sepanjang hayat Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal dan informal, dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selaiu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya.

- g) Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan motto Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3) Prinsip Pelaksanaan Kurikulum

Dalam pelaksanaan kurikulum di setiap pendidikan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Dalam hal ini peserta didik harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, serta memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis, dan menyenangkan. Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar, yaitu (1) belajar untuk beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (2) belajar untuk memahami dan menghayati, (3) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (4) belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan (5) belajar untuk membangun dan

menemukan jati diri melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.

Pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan/atau percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisi peserta didik dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik yang berdimensi ke-Tuhanan, keindividuan, kesosialan dan moral.

Kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat dengan prinsip *tut wuri handayani*, *ing madya mangun karsa*, *ing ngarsa sung tulada* (di belakang memberikan daya dan kekuatan, di tengah membangun semangat dan prakarsa, di depan memberikan contoh dan teladan).

Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multi strategi dan multimedia, sumber belajar teknologi yang memadai, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar.

Kurikulum dilaksanakan dengan memanfaatkan kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal.

5. Paradigma Pendidikan IPS di Indonesia

Menurut Winataputra (2009:139), perkembangan *sosial studies* melukiskan bagaimana pada dunia persekolahan telah menjadi dasar ontologi dari suatu sistem pengetahuan terpadu, yang secara etistimologis telah mengarungi suatu perjalanan pemikiran dalam kurun waktu 60 tahun lebih yang dimotori dan diwadahi oleh NCSS (*National Council for the Sosial Studies*) sejak

tahun 1935. Pemikiran tersebut secara tersurat dan tersirat merentang dalam suatu kontinum gagasan "*sosial studies*" Edgar Bruce Wesley (1935) sampai ke gagasan "*sosial studies*" terbaru dari NCSS tahun 1994.

Pemikiran mengenai konsep pendidikan IPS di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pemikiran *sosial studies* di Amerika Serikat yang kita anggap sebagai salah satu negara yang memiliki pengalaman panjang dan reputasi akademis yang signifikan dalam bidang itu. Reputasi tersebut tampak dalam perkembangan pemikiran mengenai bidang itu seperti dapat disimak dari berbagai karya akademis antara lain di publikasikan oleh NCSS sejak pertemuan organisasi tersebut untuk pertama kalinya tanggal 28-30 November 1935 sampai sekarang. Untuk menelusuri perkembangan pemikiran atau konsep pendidikan IPS di Indonesia secara historis epistemologis terasa sangat sukar karena dua alasan. *Pertama*, di Indonesia belum ada lembaga profesional bidang pendidikan IPS setua dan sekuat pengaruh NCSS. Lembaga serupa yang dimiliki Indonesia, yakni HISPIPSI (Himpunan Sarjana Pendidikan IPS Indonesia) usianya masih sangat muda dan produktifitas akademisnya masih belum optimal, karena masih terbatas pada pertemuan tahunan dan komunikasi antar anggota secara insidental. *Kedua*, perkembangan kurikulum dan pembelajaran IPS sebagai ontologi ilmu pendidikan (disiplin) IPS sampai saat ini sangat tergantung pada pemikiran individual dan atau kelompok pakar yang ditugasi secara insidental untuk mengembangkan perangkat kurikulum IPS melalui Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan Balitbang Dikbud (PUSKUR). Pengaruh akademis dari komunitas ilmiah bidang ini terhadap pengembangan IPS tersebut sangatlah terbatas, sebatas yang tersalur melalui anggotanya yang kebetulan dilibatkan dalam berbagai kegiatan tersebut. Jadi sangat jauh berbeda dengan peranan dan kontribusi *Sosial Studies Curriculum Task Force*-nya NCSS, atau SSEC di Amerika.

Oleh karena itu, perkembangan pemikiran mengenai pendidikan IPS di Indonesia akan ditelusuri dari alur perubahan kurikulum IPS dalam dunia persekolahan, dikaitkan dengan beberapa konten pertemuan ilmiah dan penelitian yang relevan di bidang itu. Istilah IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), sejauh yang dapat ditelusuri, untuk pertama kalinya muncul dalam Seminar Nasional tentang *Civic Education* tahun 1972 di Tawangmangu Solo. Menurut Laporan Seminar tersebut ada tiga istilah yang muncul dan digunakan secara bertukar pakai yakni "pengetahuan sosial, studi sosial, dan Ilmu Pengetahuan Sosial" yang diartikan sebagai suatu studi masalah-masalah sosial yang dipilih dan dikembangkan dengan menggunakan pendekatan interdisipliner dan bertujuan agar masalah-masalah sosial itu dapat dipahami siswa. Dengan demikian, para siswa akan dapat menghadapi dan memecahkan masalah sosial sehari-hari. Pada saat itu, konsep IPS tersebut belum masuk ke dalam kurikulum sekolah, tetapi baru dalam wacana akademis yang muncul dalam seminar tersebut. Kemunculan istilah tersebut bersamaan dengan munculnya istilah Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dalam wacana akademis pendidikan Sains. Pengertian IPS yang disepakati dalam seminar tersebut dapat dianggap sebagai pilar pertama dalam perkembangan pemikiran tentang pendidikan IPS. Berbeda dengan pemunculan pengertian *social studies* dari Edgar Bruce Wesley yang segera dapat respon akademis secara meluas dan melahirkan kontroversi akademik, pemunculan pengertian IPS dengan mudah dapat diterima dengan sedikit komentar.

Konsep IPS untuk pertama kalinya masuk ke dalam dunia persekolahan pada tahun 1972-1973, yakni dalam Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) IKIP Bandung. Hal ini terjadi karena, barangkali kebetulan beberapa pakar yang menjadi pemikir dalam Seminar *Civic Education* di Tawangmangu itu, seperti

Achmad Sanusi, Noeman Soemantri, Achmad Kosasih Djahiri, dan Dedih Suwardi berasal dari IKIP Bandung, dan pada pengembangan Kurikulum PPSP FKIP Bandung berperan sebagai anggota tim pemnembang kurikulum tersebut. Dalam Kurikulum SD 8 tahun PPSP digunakan istilah "Pendidikan Kewargaan Negara/Studi Sosial" sebagai mata pelajaran sosial terpadu. Penggunaan garis miring nampaknya mengisyaratkan adanya pengaruh dari konsep pengajaran sosial yang awalaupun tidak diberi label IPS, telah diadopsi dalam Kurikulum SD tahun 1968. Dalam Kurikulum tersebut digunakan istilah Pendidikan Kewargaan Negara yang di dalamnya tercakup sejarah Indonesia, Ilmu Bumi Indonesia, dan *Civics* yang diartikan sebagai Pengetahuan Kewargaan Negara. Oleh karena itu, dalam kurikulum SD PPSP tersebut, konsep IPS diartikan sama dengan Pendidikan Kewarganegaraan. Penggunaan istilah Studi Sosial nampaknya dipengaruhi oleh pemikiran atau penafsiran Achmad Sanusi yang pada tahun 1972 menerbitkan sebuah manuskrip berjudul "Studi Sosial: Pengantar Menuju Sekolah Komprehensif".

Sedangkan dalam Kurikulum Sekolah Menengah 4 tahun, digunakan tiga istilah yakni (1) Studi Sosial sebagai mata pelajaran inti untuk semua siswa dan sebagai bendera untuk kelompok mata pelajaran sosial yang terdiri atas geografi, sejarah, dan ekonomi sebagai amat pelajaran major pada jurusan IPS; (2) Pendidikan Kewargaan Negara sebagai mata pelajaran inti bagi semua jurusan; dan (3) Civics dan Hukum sebagai mata pelajaran major pada jurusan IPS.

Kurikulum PPSP tersebut dapat dianggap sebagai pilar kedua dalam perkembangan pemikiran tentang pendidikan IPS, yakni masuknya kesepakatan akademis tentang IPS ke dalam kurikulum sekolah. Pada tahap ini, konsep pendidikan IPS diwujudkan dalam tiga bentuk yakni, (1) pendidikan IPS terintegrasi dengan nama Pendidikan Kewarganegaraan/Studi Sosial; (2)

pendidikan IPS terpisah, dimana istilah IPS hanya digunakan sebagai patung untuk mata pelajaran geografi, sejarah dan ekonomi; dan (3) pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu bentuk pendidikan IPS khusus.

Konsep pendidikan IPS tersebut kemudian memberi inspirasi terhadap Kurikulum 1975, yang memang dalam banyak hal mengadopsi inovasi yang dicoba melalui Kurikulum PPSP. Di dalam Kurikulum 1975 pendidikan IPS menampilkan empat profil, yakni: (1) Pendidikan Moral Pancasila menggantikan Pendidikan Kewarganegaraan Negara sebagai suatu bentuk pendidikan IPS khusus yang mewadai tradisi citizenship transmission; (2) Pendidikan IPS terpadu untuk Sekolah Dasar; (3) Pendidikan IPS terkonfederasi untuk SMP yang menempatkan IPS sebagai konsep payung yang menaungimata pelajaran Geografi, sejarah, dan ekonomi koperasi; dan (4) Pendidikan IPS terpisah-pisah yang mencakup mata pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi untuk SMA, atau sejarah dan geografi untuk SPG (Dep. P dan K, 1975a; 1975b, 1975c; dan 1976). Konsep pendidikan IPS seperti itu tetap dipertahankan dalam kurikulum 1984, yang memang secara konseptual merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975. Penyempurnaan yang dilakukan khususnya dalam aktualisasi materi yang disesuaikan dengan perkembangan baru dalam masing-masing disiplin, seperti masuknya Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4) sebagai materi pokok Pendidikan Moral Pancasila. Sedang konsep pendidikan IPS itu sendiri tidak mengalami perubahan yang mendasar.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam wacana pendidikan IPS muncul dua bahan kajian kurikuler pendidikan Pancasila dan pendidikan Kewarganegaraan. Kemudian ketika ditetapkannya Kurikulum 1994

mnggantikan kurikulum 1984, kedua bahan tersebut dilembagakan menjadi satu pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Secara konseptual mata pelajaran ini masih tetap merupakan bidang pendidikan IPS yang khusus mewadai tradisi *citizenship transmission* dengan muatan utama butir-butir nilai Pancasila yang diorganisasikan dengan menggunakan pendekatan *spiral of concept development* ala Taba (Taba: 1967) dan *expanding environment approach* ala Hanna (Dufty; 1970) dengan bertitik tolak dari masing-masing sila Pancasila.

Di dalam Kuikulum 1994 mata pelajaran PPKn merupakan pelajaran sosial khusus yang wajib diikuti oleh semua siswa setiap jenjang pendidikan (SD, SLTP, SMU). Sedangkan mata pelajaran IPS diwujudkan dalam: pertama, pendidikan IPS terpadu di SD kelas III s/d kelas VI; kedua, pendidikan IPS terkonfederasi di SLTP yang mencakup materi geografi, sejarah, dan ekonomi koperasi dan ketiga, pendidikan IPS terpisah-pisah yang mirip dengan tradisi in sosial studies taught as sosial science menurut Barr dan kawan-kawan (1978). Di SMU ini bidang pendidikan IPS terpisah-pisah terdiri atas mata pelajaran Sejarah Nasional dan Sejarah Umum di kelas I dan II; Ekonomi dan Geografi di kelas I dan II; Sosiologi di kelas II; Sejarah Budaya di kelas III Program Bahasa; Ekonomi, Sosiologi, Tata Negara, Dan Antropologi di kelas III Program IPS.

Dilihat dari tujuannya, setiap mata pelajaran sosial memiliki tujuan yang bervariasi. Mata pelajaran Sejarah Nasional dan Sejarah Umum bertujuan untuk "...menanamkan pemahaman tentang perkembangan masyarakat masa lampau hingga masa kini, menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air serta rasa bangga sebagai warga bangsa Indonesia, dan memperluas wawasan hubungan masyarakat antar bangsa di dunia" (Depdikbud, 1993:23-24). Dimensi tujuan tersebut pada dasarnya mengandung esensi

pendidikan kewarganegaraan atau tradisi "citizenship transmission" (Barr, dkk.:1978). Mata pelajaran Ekonomi bertujuan untuk memberikan pengetahuan konsep-konsep dan teori sederhana dan menerapkannya dalam pemecahan masalah-masalah ekonomi yang dihadapinya secara kritis dan objektif (Depdikbud, 1993:29). Sedang untuk program IPS mata pelajaran Ekonomi bertujuan untuk "...memberikan bekal kepada siswa mengenal beberapa konsep dan teori ekonomi sederhana untuk menjelaskan fakta, peristiwa, dan masalah ekonomi yang dihadapi" (Depdikbud, 1993: 29). Dari rumusan tujuan tersebut dapat ditafsirkan bahwa tujuan pendidikan Ekonomi di SMU baik untuk program umum maupun untuk program IPS mengisyaratkan diterapkannya tradisi *sosial studies taught as sosial science* (Barr, dkk. : 1978).

Tradisi ini tampaknya diterapkan juga dalam mata pelajaran Sosiologi, Geografi, Tata Negara, Sejarah budaya dan Antropologi sebagai mana dapat dikaji dari masing-masing tujuannya. Mata pelajaran Sosiologi memiliki tujuan "...untuk memberikan kemampuan memahami secara kritis berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari yang muncul seiring dengan perubahan masyarakat dan budaya, menanamkan kesadaran perlunya sosial budaya sesuai dengan kedudukan, peran, norma, dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat" (Depdikbud, 1993:30). Sementara itu mata pelajaran kemampuan dan sikap rasional yang bertanggung jawab dalam menghadapi gejala alam dan kehidupan di muka bumi serta permasalahannya yang timbul akibat interaksi antara manusia dengan lingkungannya" (Depdikbud, 1993:30). Sedangkan mata pelajaran Tata negara menggariskan tujuan "...untuk meningkatkan kemampuan agar siswa memahami penyelenggaraan negara sesuai dengan tata kelembagaan negara, tata peradilan negara sesuai dengan tata kelembagaan negara, tata peradilan, sistem

pemerintahan Negara RI maupun negara lain” (Depdikbud, 1993:31).

Hal yang juga tampak sejalan terdapat dalam rumusan tujuan mata pelajaran Sejarah Budaya yang menggariskan tujuannya untuk menanamkan pengertian adanya keterkaitan perkembangan budaya masyarakat pada masa lampau, masa kini dan masa mendatang sehingga siswa menyadari dan menghargai hasil dan nilai budaya pada masa lampau dan masa kini (Depdikbud, 1993:31). Demikian juga dalam tujuan mata pelajaran Antropologi yang dengan tegas diorientasikan pada upaya untuk memberikan pengetahuan mengenai proses terjadinya kebudayaan, pemanfaatan dan perwujudannya dalam kehidupan sehari-hari; menanamkan kesadaran perlunya menghargai nilai-nilai budaya suatu bangsa, terutama bangsa sendiri, dan pada akhirnya dimaksudkan juga untuk menanamkan kesadaran tentang peranan kebudayaan dalam perkembangan dan pembangunan masyarakat serta dampak perubahan kebudayaan terhadap kehidupan masyarakat (Depdikbud, 1993:33).

Bila disimak dari perkembangan pemikiran pendidikan IPS yang terwujud dalam Kurikulum sampai dengan dasawarsa 1990-an ini pendidikan IPS di Indonesia mempunyai dua konsep pendidikan IPS, yakni: pertama, pendidikan IPS di Indonesia yang diajarkan dalam tradisi “*citizenship transmission*” dalam bentuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Sejarah Nasional; kedua, pendidikan IPS yang diajarkan dalam tradisi *sosial science* dalam bentuk pendidikan IPS terpisah dari SMU, yang terkonfederasi di SLTP, dan yang terintegrasi di SD.

Dalam pembahasannya tentang “Perspektif Pendidikan Ilmu (Pengetahuan) Sosial”, Sanusi (1998) dalam konteks pembahasannya yang sangat mendasar mengenai pendidikan IPS di IKIP, menyinggung sedikit tentang pengajaran IPS di sekolah. Sanusi (1998: 222-

227) melihat pengajaran IPS di sekolah cenderung menitikberatkan pada penguasaan hafalan; proses pembelajaran yang terpusat pada guru; terjadinya banyak miskonsepsi; situasi kesal yang membosankan siswa; ketidaklebihunggulan guru dari sumber lain; ketidakmutahiran sumber belajar yang ada; sistem ujian yang sentralistik; pencapaian tujuan kognitif yang "mengelit-bawang"; rendahnya rasa percaya diri siswa sebagai akibat dari amat lunaknya isi pelajaran, kontradiksi materi dengan kenyataan, dominannya latihan berfikir taraf rendah, guru yang tidak tangguh, persepsi negatif dan prasangka buruk dari masyarakat terhadap kedudukan dan peran ilmu sosial dalam pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, Sanusi (1998) merekomendasikan perlunya reorientasi pengembangan yang mencakup peningkatan mutu SDM dalam hal ini guru agar lebih mampu mengembangkan kecerdasan siswa lebih optimal melalui variasi interaksi dan pemanfaatan media dan sumber belajar yang lebih menantang. Bersamaan itu perlu diperlukan upaya peningkatan dukungan sarana dan prasarana serta insentif yang fair. Dalam dimensi konseptual, Sanusi (1998: 242-247) menyarankan perlunya batasab yang jelas mengenai tujuan dan konten pendidikan ilmu sosial untuk berbagai jenjang pendidikan, termasuk di dalamnya pola pemilihan dan pengoransiasian tema-tema pembelajaran yang dinilai lebih esensial dan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perubahan dalam masyarakat.

Dimensi konseptual mengenai pendidikan IPS tampaknya telah berulang kali dibahas dalam rangkaian pertemuan ilmiah yakni Pertemuan HISPIPSI pertama tahun 1989 di Bandung, Forum Komunikasi Pimpinan FPIPS di Yogyakarta tahun 1991, di Padang tahun 1992, di Ujung Pandang tahun 1993, Konvensi Pendidikan kedua di Medan tahun 1992. Salah satu materi yang selalu menjadi agenda pembahasan adalah mengenai

konsep PIPS. Dalam pertemuan Ujung Pandang tahun 1993, M. Numan Somantri (1993) selaku pakar dan Ketua HISPIPSI kembali menegaskan adanya dua versi PIPS sebagaimana dirumuskan dalam Pertemuan Yogyakarta tahun 1991, yakni sebagai berikut: "Versi PIPS untuk Pendidikan Dasar dan Menengah: PIPS adalah penyederhanaan, adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia, yang diorganisasi dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis/psikologis untuk tujuan pendidikan".

Sedangkan "Versi PIPS Untuk HISPIPSI dan Jurusan Pendidikan IPS-IKIP, PIPS adalah seleksi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang diorganisir dan disajikan secara ilmiah dan psikologi untuk tujuan pendidikan". Kelihatannya HISPIPSI ingin mencoba menjernihkan pengertian PIPS dengan cara menggunakan label yang sama, yakni PIPS dengan dua versi pengertian, yakni pengertian PIPS untuk pendidikan persekolahan dan untuk pendidikan tinggi bagi guru IPS di IKIP/STKIP/FKIP. Dari dua versi pengertian itu, yang membedakan adalah dalam format sistem pengetahuannya. Untuk dunia persekolahan merupakan penyederhanaan, atau sama dengan gagasan Wesley (1937) dengan konsep "*sosial sciences simplifield ...*", sedang untuk pendidikan guru IPS berupa seleksi. Namun, rasanya perbedaannya tidak begitu jelas, kecuali seperti dikatakan oleh Soemantri (1993) dalam tingkat kesukarannya sesuai dengan jenjang pendidikan itu, yakni di dunia persekolahan disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak, sedang di perguruan tinggi disesuaikan dengan taraf pendidikan tinggi. Penjelasan ini menurut penulis terkesan bersifat tautologis. Kedua versi pengertian PIPS tersebut masih dipertahankan sampai dalam Pertemuan Terbatas HISPIPSI di Universitas Terbuka Jakarta tahun 1998 (Soemantri, 1998 : 5- 6), dan disepakati akan menjadi salah satu esensi dari

"*position paper*" HISPIPSI tentang disiplin PIPS yang akan diajukan kepada LIPI.

Jika dilihat dari pokok-pokok pikiran yang diajukan oleh Numan Soemantri (1993) selaku ketua HISPIPSI, *Position Paper* itu akan menyajikan penegasan mengenai kedudukan PIPS sebagai *synthetic discipline* atau menurut Hartonian (1992) sebagai *integrated system of knowledge*. Oleh karena itu, PIPS untuk tingkat perguruan tinggi pendidikan guru IPS, direkonseptualisasikan sebagai pendidikan disiplin ilmu sehingga menjadi Pendidikan Disiplin Ilmu Pengetahuan Sosial atau disingkat menjadi PDIPS. Dengan demikian kelihatannya HISPIPSI akan memegang dua konsep, yakni konsep PIPS untuk dunia persekolahan, dan konsep PDIPS untuk perguruan tinggi pendidikan guru IPS. Yang masih perlu dikembangkan adalah logika internal atau struktur dari kedua sistem pengetahuan tersebut. Dengan demikian masing-masing memiliki jati diri konseptual yang unik dan dapat dipahami lebih jernih. Berkenaan dengan kedudukan PIPS/PDIPS dalam konteks yang lebih luas tampaknya cukup prospektif Misalnya, dalam upaya strategis pembangunan manusia seutuhnya untuk menghadapi era globalisasi.

Dilihat dari perkembangan pemikiran yang berkembang di Indonesia sampai saat ini pendidikan IPS terpilah dalam dua arah, yakni : Pertama, PIPS untuk dunia persekolahan yang pada dasarnya merupakan penyederhaan dari ilmu-ilmu sosial, dan humaniora, yang diorganisasikan secara psiko-pedagogis untuk tujuan pendidikan pesekolahan; dan kedua, PDIPS untuk perguruan tinggi pendidikan guru IPS yang pada dasarnya merupakan penyeleksian dan pengorganisasian secara ilmiah dan meta psiko-pedagogis dari ilmu-ilmu sosial, humaniora, dan disiplin lain yang relevan, untuk tujuan pendidikan profesional guru IPS. PIPS merupakan salah satu konten dalam PDIPS.

PIPS untuk dunia persekolahan terpilah menjadi dua versi atau tradisi akademik pedagogis yakni : pertama, PIPS dalam tradisi "*citizenship transmission*" dalam bentuk mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Sejarah Indonesia; dan kedua PIPS dalam tradisi "*sosial science*" dalam bentuk mata pelajaran IPS Terpadu untuk SD, dan mata pelajaran IPS Terkonfederasi untuk SLTP, dan IPS terpisah-pisah untuk SMU. Kedua tradisi PIPS tersebut terikat oleh suatu visi pengembangan manusia Indonesia seutuhnya sebagaimana digariskan dalam GBHN dan UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Perkembangan pemikiran mengenai PIPS ini amat berpengaruh pada pemikiran PDIPS di IKIP/FKIP/STKIP. Dalam konteks perkembangan pendidikan "*sosial studies*" di Amerika atau "Pendidikan IPS" di Indonesia konsep dan praksis pendidikan demokrasi yang dikemas sebagai "*citizenship education*" atau "Pendidikan Kewarganegaraan" berkedudukan sebagai salah satu dimensi dari tujuan, konten dan proses *sosial studies* atau "pendidikan IPS", atau dapat juga dikatakan bahwa pendidikan demokrasi merupakan salah satu subsistem dalam sistem pembelajaran "*sosial studies*" atau "Pendidikan IPS". Walaupun demikian, subsistem pendidikan demokrasi ini sejak awal perkembangannya, seperti di Amerika sudah menunjukkan keunikan dan kemandiriannya sebagai program pendidikan yang ditujukan untuk mengembangkan warga negara yang cerdas dan baik. Subsistem ini, sejalan dengan perkembangan konsep dan praksis demokrasi, terus berkembang sebagai suatu bidang kajian dan program pendidikan yang dikenal dengan *citizenship education* atau *civic education*, atau untuk Indonesia dikenal dalam label yang berubah – ubah mulai dari *Civics*, Kewargaan Negara, Pendidikan Kewargaan Negara, Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Jika dikaji dengan cermat dalam konteks perkembangan sosial studies ternyata *citizenship education* yang pada dasarnya berintikan pengembangan warga negara agar mampu hidup secara demokratis merupakan bagian yang sangat penting dalam *sosial studies*. Hal itu dapat disimak sejak *sosial studies* mulai diwacanakan tahun 1937 oleh Edgar Bruce Wesley, yang definisinya tentang *sosial studies* dianggap sebagai pilar epistemologis pertama, sampai dengan munculnya paradigma sosial studies dari NCSS tahun 1994. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa esensi pendidikan demokrasi sesungguhnya merupakan bagian integral dari "*sosial studies*".

Bidang kajian dan program pendidikan demokrasi dalam bentuk kemasan "*Citizenship education*" maupun "*Civic Education*" atau pendidikan kewarganegaraan ini, kini kelihatan semakin banyak dikembangkan baik di negara demokrasi yang sudah maju maupun negara yang sedang merintis atau meningkatkan diri kearah itu. Hal itu sejalan dengan berkembangnya proses demokratisasi yang kini telah menjadi gerakan sosial-politik dan sosial-budaya yang mendunia.

Menyimak perkembangan "*sosial studies*" secara umum dan Pendidikan IPS di Indonesia sampai saat ini maka perlu adaya reorientasi pendidikan IPS sebagai berikut;

- 1) Menegaskan kembali visi pendidikan IPS sebagai program pendidikan yang menitikberatkan pada pengembangan individu siswa sebagai "aktor sosial" yang mampu mengambil keputusan yang bernalar dan sebagai "warga negara yang cerdas, memiliki komitmen, bertanggung jawab, dan partisipatif".
- 2) Menegaskan kembali misi pendidikan IPS untuk memanfaatkan konsep, prinsip dan metode ilmu-ilmu sosial dan bidang keilmuan lain untuk mengembangkan karakter aktor sosial dan warga negara Indonesia yang cerdas dan baik.

- 3) Memantapkan kembali tradisi pendidikan IPS sebagai pendidikan kewarganegaraan yang diwadahi oleh mata Pelajaran Kewarganegaraan dan sebagai Pendidikan sosial yang diwadahi oleh mata pelajaran IIPS terpadu dan mata pelajaran IPS Terpisah.
- 4) Menata kembali sarana programatik pendidikan IPS untuk berbagai jenjang pendidikan (Kurikulum, Satuan Pelajaran, dan Buku Teks) sehingga memungkinkan tercapainya tujuan pendidikan IPS.
- 5) Menata kembali sistem pengadaan dan penyegaran guru pendidikan IPS sehingga dapat dihasilkan calon guru pendidikan IPS yang profesional.

D. Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut:

- 1) Uraikan secara singkat, padat dan jelas mengenai sejarah perkembangan Pendidikan IPS di Indonesia
- 2) Berdasarkan kajian mengenai sejarah perkembangan pendidikan IPS, coba Anda bandingkan pemikiran Pendidikan IPS di Indonesia dengan pemikiran *sosial studies* yang ada di Amerika.
- 3) Uraikan secara sistimatis mengenai pengembangan kurikulum IPS Sekolah Dasar di Indonesia
- 4) Jelaskan menurut pandangan dan pemikiran Anda mengenai Paradigma Pendidikan IPS di Indonesia

BAB III

PENDIDIKAN IPS TERPADU

A. Petunjuk Belajar

Pada bab III dalam buku ini, Anda diajak untuk mengkaji secara mendalam mengenai konsep IPS Terpadu. Konsep pembelajaran terpadu dalam IPS menjadi penting, sekaitan dengan ciri khas dari kajian IPS itu sendiri dalam memahami konsep dan memecahkan masalah kajiannya memang perlu dilakukan secara integratif melalui pendekatan interdisiplin. Model pembelajaran terpadu merupakan model yang memadukan materi dari beberapa mata pelajaran atau kajian ilmu dalam satu tema. Keterpaduan dalam pembelajaran IPS dimaksudkan agar pembelajaran IPS lebih bermakna, efektif, dan efisien.

Namun dalam kenyataannya, pelaksanaan pembelajaran IPS Terpadu di sekolah sebagian besar masih dilaksanakan secara terpisah. Pencapaian Standar Kompetensi Dasar mata pelajaran IPS masih dilakukan sesuai dengan bidang kajian masing-masing (sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi) tanpa ada keterpaduan di dalamnya. Hal ini tentu saja menghambat ketercapaian tujuan IPS itu sendiri yang dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang diwujudkan melalui pendekatan interdisipliner.

Atas dasar pemikiran di atas, maka dalam rangka implementasi Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dalam pembelajaran IPS Terpadu serta untuk memenuhi ketercapaian pembelajarannya, maka diperlukan pemahaman terhadap implementasi model pembelajaran terpadu dalam IPS. Hal ini penting, untuk memberikan gambaran tentang pembelajaran terpadu yang dapat menjadi acuan dan contoh konkret pelaksanaan pembelajaran IPS Terpadu di persekolahan.

Oleh karena itu, dalam mempelajari bab ini Anda diminta untuk dapat memahami dan merancang pembelajaran IPS Terpadu dan dapat mengimplementasikannya dalam kegiatan simulasi di kelas.

B. Kompetensi

Setelah Anda selesai mempelajari bab III ini diharapkan Anda dapat menjelaskan tentang:

- 1) Pendekatan Pembelajaran IPS Terpadu.
- 2) Model Pembelajaran Terpadu dalam IPS.
- 3) Ciri-Ciri Pembelajaran IPS Terpadu.

Pemahaman secara komprehensif terhadap tiga materi di atas, menjadi syarat bagi Anda dalam memenuhi kompetensi yang ketiga, yakni pemilihan kompetensi berkenaan dengan konsep Pendidikan IPS Terpadu.

C. Konten

1. Konsep Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)? Apakah perbedaan antara IPS dengan Pendidikan IPS (PIPS)? Ilmu Pengetahuan Sosial (*Sosial Sciences*) adalah sebuah program pendidikan dan bukan sub-disiplin ilmu tersendiri, sehingga tidak akan ditemukan baik dalam nomenklatur dalam filsafat ilmu, disiplin ilmu-ilmu sosial (*sosial science*), maupun ilmu pendidikan (Soemantri, 2001:89). Dengan demikian, IPS adalah ilmu-ilmu sosial yang diorganisasikan secara sistematis dan dibangun melalui penyelidikan ilmiah dan penelitian yang sudah direncanakan.

Menurut Mayhood dkk., (1991:10), "*The Sosial Studies are comprissed of those aspepts of history, geography, and pilosophy which in practice are selected for instructional purposes in schools and collegs*". Bahkan National Council for the Sosial Studies (NCCS) memberikan definisi yang lebih tegas, seperti yang dikutip Catur (2004), bahwa IPS sebagai "*the study of*

political, economic, cultural, and environment aspects of societies in the past, present and future".

Perkembangan Pendidikan IPS di AS sangat gencar pasca Perang Dunia I, ketika integrasi nasional diperlukan sebagai benteng melemahnya kebudayaan Anglo-Saxon sebagai identitas peradaban mereka. Sementara di Indonesia istilah IPS sendiri baru muncul sekitar tahun 1975-1976, pada saat penyusunan pendidikan PSP, label untuk mata pelajaran Sejarah, Ekonomi, geografi dan mata pelajaran lainnya pada tingkat dasar dan menengah. (Soemantri, 2001:101).

Pendidikan IPS adalah suatu *synthetic discipline* yang berusaha untuk mengorganisasikan dan mengembangkan substansi ilmu-ilmu sosial secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. Makna *synthetic discipline*, bahwa PIPS bukan sekedar mensistesisikan konsep-konsep yang relevan antara ilmu-ilmu pendidikan dan ilmu-ilmu sosial, tetapi juga mengkorelasikan dengan masalah-masalah kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Secara lebih tegas, bahwa Pendidikan IPS memuat tiga sub tujuan, yaitu; Sebagai Pendidikan Kewarganegaraan; Sebagai ilmu yang konsep dan generalisasinya dalam disiplin ilmu-ilmu sosial; Sebagai ilmu yang menyerap bahan pendidikan dari kehidupan nyata dalam masyarakat kemudian dikaji secara reflektif (Soemantri, 2001).

Perbedaan antara ilmu-ilmu sosial (*sosial sciences*) dengan PIPS bukanlah prinsipil, melainkan hanya perbedaan gradual. Ilmu-ilmu sosial diorganisasikan secara sistematis dan dibangun melalui penyelidikan ilmiah dan penelitian yang sudah direncanakan, sedangkan PIPS terdiri atas bahan pilihan yang sudah disederhanakan dan diorganisasikan secara psikologis dan ilmiah untuk tujuan pendidikan. (Soemantri, 2001: 73). Diperlukan bangunan yang sinergis antara PIPS di perguruan tinggi dengan PIPS untuk pendidikan dasar dan menengah guna merealisasikan konsep di atas.

Dalam pendidikan dasar dan menengah PIPS mempunyai penyederhanaan, adaptasi, seleksi dan modifikasi dari disiplin akademis ilmu-ilmu sosial yang diorganisir dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis/psikologis.

Sedangkan untuk FPIPS-FPIPS LPTK, Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial (PIIS) merupakan seleksi dari struktur disiplin ilmu-ilmu sosial yang diorganisir dan disajikan secara ilmiah (dan psikologis) untuk mewujudkan tujuan Pendidikan IPS. Pendidikan IPS mempunyai tujuan untuk mewujudkan pendidikan lanjutan bidang ilmu-ilmu sosial dan humaniora dan ikut mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik. (Soemantri, 2001: 215). Maksud ini sesuai dengan pasal 37 UU SISDIKNAS 2003, bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat IPS, yang dalam penjelasannya disebutkan bahwa IPS merupakan ilmu bumi, sejarah, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat.

Misi yang dibawa Pendidikan IPS adalah pengembangan keilmuan sekaligus nilai dan kewarganegaraan. Walaupun kerangka ini sebagian ilmuwan menolaknya, setidaknya Jatidiri PIPS di Indonesia adalah sebangun dengan maksud di atas. Secara nasional, tujuan PIPS adalah untuk mendukung tujuan pendidikan nasional yang dalam pasal 3 UU SISDIKNAS tahun 2003 disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab.

2. Pendekatan Pembelajaran Terpadu dalam IPS

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di tingkat Sekolah meliputi bahan kajian: sosiologi, sejarah, geografi, dan ekonomi. Bahan kajian itu menjadi mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Mata pelajaran IPS bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa kehidupan masyarakat (Sumaatmadja, 1980: 20). Dalam implementasinya, pendidikan IPS perlu dilakukan berbagai studi yang mengarah pada peningkatan efisiensi dan efektivitas pengembangan sebagai konsekuensi dari suatu inovasi pendidikan. Salah satu bentuk efisiensi dan efektivitas implementasi kurikulum, perlu dikembangkan berbagai model pembelajaran. Model pembelajaran terpadu merupakan salah satu model implementasi kurikulum yang dilanjutkan untuk diaplikasikan pada semua jenjang pendidikan, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD/MI) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA/MA). Model pembelajaran terpadu pada hakikatnya merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik baik secara individual maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip secara holistik dan otentik (Depdikbud. 1996:3). Pembelajaran terpadu pada hakikatnya merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan peserta didik baik secara individual maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara holistik dan autentik. Bentuk kegiatan belajar mengajar dengan struktur dan program satuan pembelajaran dipayungi tema dengan muatan materi yang dibelajarkan dikaji dari empat kajian keilmuan seperti geografi, sosiologi, ekonomi dan sejarah (Kemendikbud, 2013).

Melalui pembelajaran terpadu peserta didik dapat memperoleh pengalaman langsung, sehingga dapat menambah kekuatan untuk menerima, menyimpan, dan memproduksi kesan-kesan tentang hal-hal yang dipelajarinya. Dengan demikian, peserta didik terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai konsep yang dipelajari secara holistik, bermakna, otentik, dan aktif. Cara pengemasan pengalaman belajar yang dirancang guru sangat berpengaruh terhadap kebermaknaan pengalaman bagi para peserta didik. Pengalaman belajar lebih menunjukkan kaitan unsur-unsur konseptual menjadikan proses pembelajaran efektif. Adanya keterkaitan antara berbagai aspek dan materi yang tertuang dalam KD IPS. Pembelajaran terpadu juga dapat dikatakan pembelajaran yang memadukan materi beberapa mata pelajaran atau kajian ilmu dalam satu tema. Keterpaduan dalam pembelajaran IPS dimaksudkan agar pembelajaran IPS lebih bermakna, efektif, dan efisien (Kemendikbud, 2013).

Namun demikian, pelaksanaannya di sekolah pembelajaran IPS sebagian besar masih dilaksanakan secara terpisah. Pencapaian Standar Kompetensi Dasar mata pelajaran IPS masih dilakukan sesuai dengan bidang kajian masing-masing (sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi) tanpa ada keterpaduan di dalamnya. Hal ini tentu saja menghambat ketercapaian tujuan IPS itu sendiri yang dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu sosial (sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, budaya). Hal ini disebabkan antara lain:

- a. Kurikulum IPS itu sendiri tidak menggambarkan satu kesatuan yang terintegrasi, melainkan masih terpisah-pisah antar bidang ilmu-ilmu sosial;
- b. Latar belakang guru yang mengajar merupakan guru disiplin ilmu seperti geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi, antropologi sehingga sangat sulit untuk

- melakukan pembelajaran yang memadukan antar disiplin ilmu tersebut; serta
- c. Terdapat kesulitan dalam pembagian tugas dan waktu pada masing-masing guru mata pelajaran untuk pembelajaran IPS secara terpadu,
 - d. Meskipun pembelajaran terpadu bukan merupakan hal yang baru namun para guru di sekolah tidak terbiasa melaksanakannya sehingga "dianggap" hal yang baru.

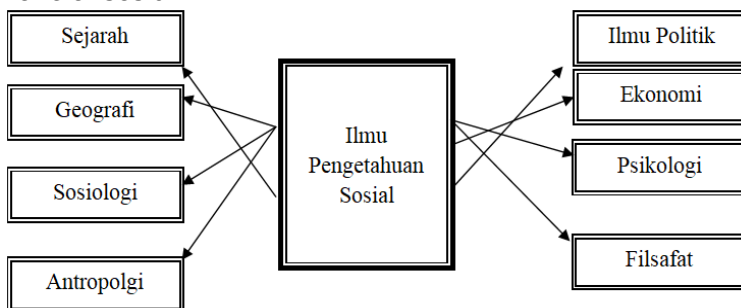
Atas dasar pemikiran di atas, maka dalam rangka implementasi Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar serta untuk memenuhi ketercapaian pembelajaran, maka diperlukan pemahaman terhadap pedoman pelaksanaan model pembelajaran terpadu IPS. Hal ini penting, untuk memberikan gambaran tentang pembelajaran terpadu yang dapat menjadi acuan dan contoh konkret dalam kerangka implementasi Standar dan Kompetensi Dasar.

3. Pembelajaran IPS Terpadu

Ilmu pengetahuan sosial (IPS) merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial seperti : sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Ilmu Pengetahuan Sosial dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan satu pendekatan interdisipliner.

Geografi, sejarah, antropologi, sosiologi, ekonomi, dan ilmu-ilmu sosial lainnya merupakan disiplin ilmu yang memiliki keterpaduan yang tinggi. Pembelajaran geografi memberikan kebulatan wawasan yang berkenaan dengan wilayah-wilayah, sedangkan sejarah memberikan wawasan berkenaan dengan peristiwa-peristiwa dari berbagai periode. Antropologi meliputi studi-studi komparatif yang berkenaan dengan nilai-nilai, kepercayaan, struktur sosial, aktivitas-aktivitas ekonomi, organisasi politik, ekspresi-ekspresi dan spiritual, teknologi, dan benda-benda budaya dari budaya-budaya terpilih.

Ilmu Politik dan Ekonomi tergolong ke dalam ilmu-ilmu tentang kebijakan pada aktivitas-aktivitas yang berkenaan dengan pembuatan keputusan. Sosiologi dan psikologi sosial merupakan ilmu-ilmu tentang perilaku seperti konsep peran, kelompok, institusi, proses interaksi dan kontrol sosial.



Gambar 3.1 Keterpaduan Cabang Ilmu Pengetahuan Sosial (Kemdikbud, 2013).

Ilmu Pengetahuan Sosial dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu-ilmu sosial (Kemendikbud, 2013).

4. Konsep Pembelajaran Terpadu Dalam IPS dan Ciri-ciri yang Melekat Padanya

Pendekatan pembelajaran terpadu dalam IPS sering disebut dengan pendekatan interdisipliner. Model pembelajaran terpadu pada hakikatnya merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan peserta didik baik secara individual maupun kelompok aktif mencari dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara holistik dan otentik (Depdikbud, 1963:3). Pendidikan IPS menekankan pada pengetahuan tentang bangsanya, semangat kebangsaan, patriotisme, serta aktivitas masyarakat di bidang ekonomi dalam *ruang* atau *space* wilayah NKRI. IPS dikembangkan sebagai mata pelajaran *integrative sosial studies*, bukan sebagai pendidikan disiplin ilmu.

Adapun prinsip perancangan pembelajaran terpadu menurut Kemendikbud (2013) yakni;

- a. Substansi materi diangkat dari konsep-konsep kunci yang terkandung dalam aspek-aspek perkembangan terkait.
- b. Antar konsep kunci yang dimaksud memiliki keterkaitan makna dan fungsi, yang apabila diramu ke dalam satu konteks tertentu (peristiwa, isu, masalah, atau tema) masih memiliki makna asal, selain memiliki makna yang berkembang dalam konteks yang dimaksud.
- c. Aktivitas belajar yang hendak dirancang dalam pembelajaran terpadu mencakup aspek perkembangan anak.
- d. Pengembangan pembelajaran terpadu dapat mengambil suatu topik dari suatu cabang ilmu tertentu, kemudian dilengkapi, dibahas, diperluas, dan diperdalam dengan cabang-cabang ilmu yang lain
- e. Tema dapat dikembangkan dari isu, peristiwa, dan permasalahan yang berkembang.

Lebih lanjut Kemdikbud (2013), menjelaskan bahwa IPS Terpadu di dalamnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Berpusat pada siswa.
- b. Memberikan pengalaman langsung kepada siswa.
- c. Pemisahan antar bidang studi/mata pelajaran tidak begitu jelas.
- d. Menyajikan konsep dari berbagai bidang studi/mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran.
- e. Bersifat luwes.
- f. Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan Siswa.

Sebagaimana telah dijelaskan di muka, Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan keterpaduan dari unsur-unsur geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar IPS berasal dari struktur keilmuan geografi, sejarah, ekonomi, dan

sosiologi, yang dikemas sedemikian rupa sehingga dapat dikembangkan menjadi pokok bahasan atau topik (tema) tertentu. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar IPS juga menyangkut berbagai masalah sosial yang dirumuskan dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner.

KI & KD dapat menyangkut peristiwa dan perubahan kehidupan masyarakat dengan prinsip sebab akibat, kewilayahan, adaptasi dan pengelolaan lingkungan, struktur, proses dan masalah sosial serta upaya-upaya perjuangan hidup agar *survive* seperti pemenuhan kebutuhan, kekuasaan, keadilan dan jaminan keamanan. KI & KD IPS menggunakan tiga dimensi (ruang, waktu, dan nilai/moral) dalam mengkaji dan memahami fenomena sosial serta kehidupan manusia secara keseluruhan (Kemendikbud, 2013).

10 Model Pembelajaran IPS Terpadu			
1	<i>Connected</i>	6	<i>Threaded</i>
2	<i>Webbed</i>	7	<i>Nested</i>
3	<i>Shared</i>	8	<i>Networked</i>
4	<i>Integrated</i>	9	<i>Immersed</i>
5	<i>Sequenced</i>	10	<i>Fragmended</i>

Sumber: Kemendikbud (2013).

Konsep-konsep dalam KD IPS memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga memerlukan model yang sesuai agar memberikan hasil keterpaduan yang optimal. Ada sejumlah KD yang mengandung konsep saling beririsan/tumpang tindih, sehingga bila dibelajarkan secara terpisah-pisah menjadi tidak efisien. Konsep-konsep semacam ini memerlukan pembelajaran model *integrated* atau *shared*. Ada KD yang mengandung konsep saling berkaitan tetapi tidak beririsan. Untuk menghasilkan kompetensi yang utuh, konsep-konsep harus dikaitkan dengan suatu tema tertentu hingga menyerupai jaring laba-laba. Ada sejumlah konsep pada KD, konsep tersebut bertautan dengan konsep KD dari

KD yang lain. Agar pembelajarannya menghasilkan kompetensi yang utuh, maka konsep-konsep tersebut harus dipertautkan (*connected*) dalam pembelajarannya (Kemendikbud, 2013).

D. Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Uraikan kembali menurut pandangan dan pemikiran Anda mengenai konsep pendekatan pembelajaran IPS Terpadu.
- 2) Sebutkan ciri-ciri dari pembelajaran IPS Terpadu, dan jelaskan ciri-ciri tersebut kaitannya dengan konsep IPS Terpadu.
- 3) Pilihlah salah satu KD yang ada dalam mata pelajaran IPS, dan rancanglah KD tersebut ke dalam pembelajaran IPS Terpadu.

BAB IV

MATERI KAJIAN DALAM PENDIDIKAN IPS

A. Petunjuk Belajar

Pada bab IV dalam buku ini, Anda diajak untuk mempelajari secara mendalam mengenai materi kajian dalam Pendidikan IPS. Ilmu Pengetahuan Sosial dengan pendekatan multi-disiplin menggunakan bagian-bagian ilmu-ilmu sosial guna kepentingan pengajaran. Untuk itu, berbagai konsep dalam ilmu sosial harus secara terintegratif. Untuk itu pada bab ini, Anda diminta untuk mengkaji secara mendalam materi IPS sebagai berikut :

- 1) Interaksi Sosial.
- 2) Saling Ketergantungan.
- 3) Kesenambungan dan Perubahan (*Continuity and Change*).
- 4) Keragaman/Kesamaan/Perbedaan.
- 5) Konflik dan Konsensus.
- 6) Pola (Patron).
- 7) Tempat (Lokasi).
- 8) Kekuasaan (*Power*).
- 9) Nilai/Kepercayaan.
- 10) Keadilan dan Pemerataan.
- 11) Kelangkaan (*Scarcity*).
- 12) Kekhususan (*Specialization*).
- 13) Budaya (*Culture*).
- 14) Nasionalisme.

B. Kompetensi

Setelah Anda selesai mempelajari bab IV ini diharapkan Anda dapat menjelaskan tentang:

- 1) Karakteristik Pendidikan IPS.
- 2) Materi Kajian Pendidikan IPS.
- 3) Pengorganisasian Materi IPS.

Pemahaman secara komprehensif terhadap tiga materi di atas, menjadi syarat bagi Anda dalam memenuhi kompetensi yang keempat, yakni pemilikan kompetensi berkenaan dengan materi kajian dalam Pendidikan IPS Terpadu.

C. Konten

1. Karakteristik Pendidikan IPS

Agar seorang guru mampu mengembangkan sebuah proses pembelajaran pendidikan IPS dengan baik maka perlu dibekali dengan pemahaman tentang karakteristik pendidikan IPS. Karakteristik pendidikan IPS yang dimaksud meliputi pengertian dan tujuan pendidikan IPS, landasan filosofis kurikulum pendidikan IPS, pengorganisasian materi disiplin-disiplin ilmu sosial yang dikembangkan dalam pendidikan IPS serta sejumlah kompetensi yang diharapkan muncul pada siswa setelah mengikuti proses pembelajaran pendidikan IPS. Pemahaman tentang karakteristik pendidikan IPS ini akan sangat penting bagi guru agar ia mampu menerjemahkan aplikasi proses pembelajaran pendidikan IPS pada tingkat sekolah dasar yang disesuaikan dengan karakteristik dasar pendidikan IPS.

Fokus kajian Pendidikan IPS adalah kehidupan manusia dengan sejumlah aktivitas sosialnya. Materi pendidikan IPS berasal dari disiplin ilmu-ilmu sosial yang kemudian diorganisasi dan disederhanakan untuk kepentingan pendidikan. Dengan demikian pengembangan pendidikan IPS pada setiap jenjang pendidikan memiliki karakteristik tersendiri yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan usia siswa. Organisasi materi pendidikan IPS pada tingkat sekolah dasar menggunakan pendekatan secara terpadu/fusi. Hal ini disesuaikan dengan karakteristik tingkat perkembangan usia siswa SD yang masih pada taraf berpikir abstrak. Materi pendidikan IPS yang disajikan pada tingkat sekolah dasar tidak menunjukkan label dari

masing-masing disiplin ilmu sosial. Materi disajikan secara tematik dengan mengambil tema-tema sosial yang terjadi di sekitar siswa.

Demikian juga halnya tema-tema sosial yang dikaji berangkat dari fenomena-fenomena serta aktivitas sosial yang terjadi di sekitar siswa. Tema-tema ini kemudian semakin meluas pada lingkungan yang semakin jauh dari lingkaran kehidupan siswa. Dengan demikian seorang guru yang akan melaksanakan proses pembelajaran IPS harus dibekali dengan sejumlah pemahaman tentang karakteristik pendidikan IPS yang meliputi pengertian dan tujuan pendidikan IPS, landasan filosofis pengembangan kurikulum pendidikan IPS serta disiplin-disiplin ilmu sosial yang dikembangkan dalam pendidikan IPS.

Untuk lebih jelasnya mengenai karakteristik pendidikan IPS akan disimpulkan sebagai berikut:

- a. Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan gabungan dari unsur-unsur geografi, sejarah, ekonomi, hukum dan politik, kewarganegaraan, sosiologi, bahkan juga bidang humaniora, pendidikan dan agama (Soemantri, 2001).
- b. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPS berasal dari struktur keilmuan geografi, sejarah, ekonomi dan sosiologi yang dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi pokok bahasan atau topik (tema) tertentu.
- c. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPS menggunakan dimensi dalam mengkaji dan memahami fenomena sosial kehidupan manusia secara keseluruhan. Ketiga dimensi tersebut terlihat pada table berikut:

Tabel 4.1. Dimensi IPS Dalam Kehidupan Manusia

Dimensi dalam kehidupan manusia	Ruang	Waktu	Nilai/Norma
--	--------------	--------------	--------------------

Area dan substansi pembelajaran	Alam sebagai tempat dan penyedia potensi sumber daya	Alam dan kehidupan yang selalu berproses, masa lalu, saat ini, dan yang akan datang	Kaidah atau aturan yang menjadi perekat dan penjamin keharmonisan kehidupan manusia dan alam
Contoh Kompetensi Dasar yang dikembangkan	Adaptasi spasial dan eksploratif	Berpikir kronologi, prospekti, antisipatif	Konsistensi dengan aturan yang disepakati dan kaidah alamiah masing-masing
Alternatif-penyajian dalam mata pelajaran	Geografi	Sejarah	Ekonomi, Sosiologi / Antropologi

2. Materi Kajian Pendidikan IPS

a. Pengertian Kajian Sosial (*Sosial Studies*)

Kajian sosial (*sosial studies*) pada dasarnya sama dengan ilmu pengetahuan sosial. Dalam sejarahnya, sosial studies berasal dari Amerika, yang berpenduduk multiras dan budaya, sebagaimana halnya di Indonesia.

Menurut kurikulum 1975, ilmu pengetahuan sosial adalah bidang studi yang merupakan panduan (fusi) dari sejumlah mata pelajaran sosial. Berbeda dengan ilmu sosial, studi sosial bukan merupakan suatu bidang keilmuan atau disiplin akademis, melainkan lebih merupakan suatu bidang pengkajian tentang gejala dan masalah sosial. Dalam kerangka kerja pengkajiannya, studi sosial menggunakan bidang-bidang keilmuan termasuk ilmu sosial.

Tentang studi sosial ini (Achmad Sanusi, 1971), memberikan penjelasan bahwa, studi sosial tidak selalu bertaraf akademis universitas, bahkan merupakan bahan-bahan pelajaran bagi siswa sejak

pendidikan dasar. Selanjutnya studi sosial dapat berfungsi sebagai pengantar kepada disiplin ilmu sosial bagi pendidikan lanjutan atau jenjang berikutnya. Studi sosial bersifat interdisipliner dengan menetapkan pilihan masalah-masalah tertentu berdasarkan sesuatu referensi dan meninjaunya dari beberapa sudut sambil mencari logika dari hubungan-hubungan yang ada satu dengan lainnya.

Maksudnya bahwa studi sosial dalam meninjau suatu gejala sosial atau masalah sosial dilihat dari berbagai aspek kehidupan. Sedangkan ilmu sosial pendekatannya bersifat disipliner dari bidang ilmunya masing-masing. Kesimpulannya dapat dikatakan bahwa studi sosial lebih memperlihatkan suatu bentuk gabungan ilmu sosial.

b. IPS sebagai Kajian Sosial (*Sosial Studies*)

IPS adalah studi atau kajian masalah-masalah sosial yang berasal dari ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk kepentingan tujuan pendidikan di sekolah yaitu menciptakan warga negara yang baik (*good citizen*). IPS bukan sekadar pengetahuan, tetapi merupakan ilmu pengetahuan yang disusun dan diorganisasikan secara baik menurut kepentingan pendidikan dan pengajaran. IPS berada di tengah-tengah antara ilmu-ilmu sosial dan pengetahuan sosial.

Dari uraian tersebut, ilmu pengetahuan sosial menggunakan bagian-bagian ilmu sosial guna kepentingan pengajaran. Untuk itu, berbagai konsep dan generalisasi ilmu sosial harus disederhanakan agar lebih mudah dipahami murid-murid yang umumnya belum matang untuk mempelajari ilmu-ilmu. Adapun materi kajian dalam pendidikan IPS yakni :

1. Interaksi Sosial
2. Saling Ketergantungan

3. Kesenambungan dan Perubahan (*Continuity and Change*)
4. Keragaman/Kesamaan/Perbedaan
5. Konflik dan Konsensus
6. Pola (Patron)
7. Tempat (Lokasi)
8. Kekuasaan (*Power*)
9. Nilai/Kepercayaan
10. Keadilan dan Pemerataan
11. Kelangkaan (*Scarcity*)
12. Kekhususan (*Specialization*)
13. Budaya (Culture)
14. Nasionalisme

Betapa pun diatas telah dikaji tentang sejumlah materi kajian dalam pendidikan IPS, namun bukan berarti bahwa kajian tersebut baku. Dalam pendidikan IPS semua kajian sangat variabelistik, artinya konsep dalam membahas sesuatu peristiwa atau masalah dapat sama, akan tetapi hasilnya berbeda. Perbedaan hasil tersebut disebabkan variable yang mempengaruhi "sebuah peristiwa" itu berbeda-beda. Dengan demikian, setiap tinjauan dalam pendidikan IPS harus selalu dipertimbangkan variable penyebabnya, sehingga pemecahan masalah dalam pendidikan IPS sangat "*tentative*". Sekali lagi, bahwa sifat "*tentative*" itu muncul karena variable penyebab dari sebuah peristiwa atau masalah berbeda-beda.

Thomas S. Kuhn (2000), dalam bukunya "*The Structure of Scientific Renolutions*", menggambarkan bahwa dalam dunia ilmu pengetahuan ada dan diyakini kebenaran pada suatu saat tertentu yang disebut "norma science". Norma science merupakan teori generalisasi, konsep dan fakta yang pada saat tertentu diterima oleh semua kalangan, baik ilmuwan maupun cendikiawan lainnya. Namun demikian, kenormalan ilmu itu suatu saat berubah karena penemuan ilmu yang baru. Perubahan tersebut

disebabkan oleh terdapatnya bukti-bukti baru, sehingga bukti-bukti lama dapat diabaikan atau dilupakan. Sebagai contoh, pada mulanya semua orang menerima bahwa benda terkecil adalah molekul, tetapi kemudian teori itu batal karena terdapat benda baru yang terkecil yaitu atom, bahkan kemudian inti atom. Contoh lain adalah pada mulanya para ilmuwan beranggapan bahwa bumi merupakan pusat tata surya (Pandangan geosentris), namun kemudian teori ini batal, karena ternyata mataharilah yang menjadi pusat tata surya (Pandangan heliosentris).

Perubahan pola pikir atau paradigma baru tersebut oleh Thomas S. Kuhn dinyatakan sebagai suatu perubahan struktur ilmu pengetahuan. Perubahan struktur ilmu pengetahuan tersebut tidak serta merta terjadi, akan tetapi melalui proses yang relative panjang. Perubahan itu bermula dari terjadinya anomali atau penyimpangan dari apa yang disebut sebagai normal *science*. Oleh karena terjadinya penyimpangan pada teori, generalisasi, konsep dan fakta yang ada maka terjadi krisis terhadap normal *science*. Selanjutnya akan terjadi dualism yaitu antara normal *science* yang sudah diragukan keabsahannya dengan pola pikir yang baru (*new paradigma*). Pada akhirnya akan terjadi revolusi terhadap *normal science* dan lahirlah *new normal science* (Ilmu pengetahuan normal yang baru), seperti perubahan dari geosentris menjadi heliosentris.

Perubahan secara revolusioner tersebut dapat terjadi di dunia ilmu pasti alam, namun tidak demikian halnya dalam pendidikan IPS. Perubahan yang terjadi di dalam pendidikan IPS bersifat evolusioner. Betapapun istilah revolusioner merupakan salah satu konsep dalam pendidikan IPS khususnya dalam pendidikan sejarah. Revolusi dalam konsep pendidikan IPS merupakan momentum terjadinya perubahan dari

satu masa ke masa yang lain dan disertai dengan perubahan tatanan kehidupan. Sebagai contoh pada tahun 1945 Indonesia mengalami revolusioner fisik. Konsep revolusioner dalam konteks ini adalah terjadinya suatu perubahan dari masa perjalanan menuju masa kemerdekaan dan perubahan dari masa pemerintah orang asing (penjajah) kepada pemerintahan sendiri (Pemerintahan NKRI).

3. Pengorganisasian Materi IPS

a. Prinsip Prinsip Penyusunan Materi IPS

Dalam menyusun materi IPS, di dalam kurikulum kita mengenal beberapa prinsip-prinsip penyusunan materi IPS, yaitu :

- 1) Prinsip Keseimbangan Materi.
- 2) Prinsip *Expanding Environment*.
- 3) Prinsip Flexibilitas.
- 4) Prinsip Pendalaman.

Untuk lebih jelasnya, ke empat prinsip di atas diuraikan seperti di bawah ini:

1) Prinsip Keseimbangan Materi

Bahan IPS diambil dari berbagai sumber seperti apa yang telah diterangkan di muka. Sudah barang tentu bahan dari tiap sumber tidaklah memenuhi persyaratan atau mengandung konsep ilmu-ilmu sosial. Bisa saja suatu saat, bahan IPS yang diramu terlalu banyak materi sejarahnya, namun dilain pihak materi ekonomi atau geografi terlalu sedikit. Oleh sebab itu, bahan dari tiap-tiap sumber hendaknya harus mengandung sejumlah konsep yang mempunyai aspek-aspek ilmu-ilmu sosial yang cukup dan seimbang. Keseimbangan ini dapat dicapai untuk tiap-tiap tingkatan atau kelas atau satu tingkat sekolah. Pada kurikulum SD, kita jumpai topik integratif dengan aspek geografi, sosiologi, ekonomi, sejarah, antropologi yang seimbang. Dilain pihak ada juga topik-topik

korelatif yang beraspek geografi, sejarah, ekonomi secara berimbang, namun dengan aspek sosiologi, antropologi, pendidikan yang lebih kecil.

2) Prinsip Expanding Environment

Di dalam menyusun urutan materi maupun ruang lingkup IPS, pengorganisasian materi IPS dapat menggunakan prinsip lingkungan yang makin meluas (*expanding environment*), atau juga lingkungan masyarakat yang meluas (*expanding community*).

Dari pernyataan di atas, jenis pelajaran dimulai dari lingkungan :

- a) Keluarga
- b) Sekolah
- c) Desa
- d) Kecamatan
- e) Kabupaten, dan seterusnya samapai ke seluruh dunia

Lingkungan masyarakat pun, bisa dimulai dari keluarga, tetangga terdekat, meluas ke masyarakat kampung - masyarakat desa - masyarakat desa lain (pertanian), masyarakat nelayan, masyarakat industri, masyarakat pertambangan, masyarakat kota dan seterusnya.

Dalam buku text SD kita jumpai *sequence* tersebut di atas. Segala aspek (sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, dan sebagainya) haruslah dikembangkan menurut prinsip tersebut di atas.

3) Prinsip Fleksibilitas

Di dalam kenyataan, kondisi setiap lingkungan berbeda-beda. Begitupun pada lingkungan tiap-tiap sekolah memiliki perbedaan, baik lingkungan fisik, sosial, ekonomi, kultural politik dan sebagainya. Kurikulum selalu menentukan urutan-urutan tertentu yang kadang-kadang kaku, sehingga kadang-kadang tidak sesuai

dengan kenyataan yang dijumpai anak-anak ataupun pengalaman anak.

Bahan IPS tentang kota besar, mungkin tidak menarik bagi anak kota. Namun sebaliknya bahan tersebut dapat menjadi pengetahuan yang menarik bagi anak nelayan atau anak pegunungan yang jauh dari kota. Karena itu fleksibilitas perlu diatur, baik tentang urutan (*sequence*), ruang lingkup (*scope*), waktu (lamanya pembahasan suatu topik), maupun topik-topik yang insidental (bencana alam, gunung meletus, tanah longsor, banjir, gas beracun, wabah penyakit, dan sebagainya).

Flexibilitas juga diperlukan untuk keluasan atau kedalam suatu konsep yang sangat erat hubungannya keluasan atau kedalaman suatu konsep yang sangat erat hubungannya dengan lingkungan anak.

4) Prinsip Pendalaman

Materi IPS adalah amat luas, sumbernya banyak, dan banyak menggunakan disiplin ilmu-ilmu sosial (multidisiplin). Karakter seperti ini, dapat membuat bahan pelajaran yang dikemas dan disajikan menjadi sangat dangkal. Pelajaran yang dangkal umumnya mudah dilupakan, untuk itu dalam prinsip pendalaman hendaknya:

- a) IPS harus melakukan pemilihan sejumlah konsep-konsep dasar yang korelatif atau integratif dari ilmu-ilmu sosial yang disusun dalam satuan-satuan yang bulat. Satuan-satuan inilah yang dibahas secara mendalam dari berbagai sudut dan dilaksanakan dengan berbagai kaitan.
- b) Satuan-satuan konsep itu dibahas dalam waktu yang relatif panjang (2 minggu, 3 minggu, 4 minggu).

- c) Menggunakan langkah-langkah pengajaran IPS (orientasi perencanaan, kegiatan, dan kulminasi).
- d) Topik-topik untuk satu tahun (catur wulan atau semester) tak boleh terlalu banyak.

4. Bentuk Materi IPS

Materi IPS yang berasal dari berbagai sumber adalah bermacam-macam bentuknya:

- a. Konsep-konsep dasar dan kumpulan konsep-konsep dari ilmu ilmu sosial, misalnya: pasar, nilai, harga, penduduk, provinsi, peta, dan lain sebagainya.
- b. Topik-topik dari subjek (ilmu-ilmu sosial), misalnya : keluarga, koperasi, lembaga negara, demokrasi, ASEAN, PBB, dan sebagainya.
- c. Tema-tema dari berbagai kejadian lingkungan dan masyarakat, misalnya: peristiwa alam, perkembangan teknologi, keragaman suku bangsa, aktivitas ekonomi, dan sebagainya.
- d. Problema-problema, baik yang menyangkut individual, sekolah, nasional maupun problema dunia, misalnya: masalah potensi diri, masalah tawuran, masalah pengangguran, masalah pencemaran lingkungan, dan sebagainya. Problema biasanya bersifat integrative, yang dengan demikian pembahasannya harus menggunakan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin.
- e. Isu kontemporer (*contemporary issues*): hal-hal yang baru tercetus, misalnya bencana alam yang baru terjadi, pemilihan umum yang baru atau akan dilaksanakan, masalah kenaikan BBM, korupsi, dan sebagainya.
- f. General idea: cita-cita yang bersifat umum, misalnya demokrasi, hak-hak asasi manusia, kelestarian alam, peninggalan-peninggalan bersejarah, persatuan bangsa, dan seterusnya.

5. Beberapa Sistem Menyusun Materi IPS

Cara menyusun bahan pelajaran, merupakan keterampilan penting yang dimiliki seorang guru berkaitan dengan pengorganisasian materi IPS. Beberapa cara menyusun bahan, dikenal adanya dua pola, yakni: (1) pola tradisional: yang menggunakan *structural approach*, dengan penekanan pada subyek (*subject matter*) masing-masing cabang ilmu, yang berarti materi/bahan pelajaran disajikan secara terpisah-pisah berdasarkan konteks disiplin ilmu masing-masing (*separated*); dan (2) pola modern: yang menggunakan *integrated approach*, dengan penekanan pada unit kurikulum (*unit curriculum*). Unit ialah satu bentuk organisasi kurikulum yang bermaksud menyusun bahan-bahan yang relevan dalam bentuk satu kesatuan yang bermakna, yang berarti bahan-bahan pelajaran dikemas sebagai satu-kesatuan yang bermakna yang diambil dari beberapa disiplin ilmu (*integrated*).

Dalam perkembangan selanjutnya, memang pola penyusunan materi berkembang dari "*subject curriculum*" ke "*unit curriculum*". Untuk lebih jelasnya, di bawah ini diperkenalkan beberapa istilah yang berkaitan dengan penyusunan materi:

- a. Subject (*separate subject*), yakni: mata pelajaran terpisah, yang berarti bahan pelajaran diperoleh dari cabang ilmu tertentu yang kemudian diajarkan secara tersendiri atau terpisah-pisah.
- b. Korelasi: bahan diperoleh dari hubungan dan relasi antara subyek-subyek dari beberapa cabang ilmu sosial. Korelasi merupakan tahap awal dari sintesa, tetapi belum merupakan sintesa sepenuhnya karena masih tampak konsep/generalisasi dari cabang ilmu-ilmu itu masing-masing (kepribadian ilmu masing-masing masih tampak).
- c. Konsentrasi: bahan dari satu cabang ilmu tertentu dijadikan inti, dan bahan-bahan dari cabang ilmu sosial lainnya menjadi pelengkap. Jadi titik tolak

berawal dari suatu disiplin tertentu. Tahap korelasi dan konsentrasi dapat merupakan tahap peralihan bagi penyusunan materi pengajaran sosial sebenarnya.

- d. Fusi : dua subjek bergabung membentuk konsep-konsep baru (umpamanya geografi dan sejarah, ekonomi dengan geografi, ssejarah dan civics). Bahan pengajaran sosial di SD (IPS) biasanya memfusikan sejarah. Geografi dan civics.
- e. Integrasi: titik tolak bukan lagi dari suatu disiplin ilmu tertentu. Identitas disiplin ilmu sudah hilang dan subjek berubah menjadi masalah (*problema approach*), yang kemudian masalah tersebut dikaji secara interdisipliner/multi disiplin (*Integrated approach*).
- f. Unifikasi: tahap penyatuan (unifikasi) ini sebetulnya sama dengan integrasi (perbedaan hanya pada masalah isitilah semata-mata). Tahap ini juga disebut unit curriculum, yang berarti *integrated curriculum* dan *unit curriculum* pada hakikatnya adalah sama.

D. Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut !

- 1) Uraikan menurut pandangan dan pemikiran Anda mengenai karakteristik dari Pendidikan IPS.
- 2) Sebutkan dan jelaskan materi-materi yang terkandung dalam mata pelajaran IPS.
- 3) Uraikan beberapa teknik mengorganisasikan materi IPS, dan berikan contohnya masing-masing.

BAB V

PENDIDIKAN NILAI DALAM PEMBELAJARAN IPS

A. Petunjuk Belajar

Pada bab V dalam buku ini, Anda diajak untuk mempelajari secara mendalam mengenai materi pendidikan nilai dalam pembelajaran IPS. Kajian pendidikan nilai dipandang penting, sekaitan dengan tujuan dari Pendidikan IPS itu sendiri yang salah satunya menekankan pada terbentuknya warga masyarakat yang baik. Untuk itu pada bagian awal bab ini, Anda diminta untuk dapat memahami konsepsi nilai sebagai sesuatu yang berharga, menggolongkan jenis-jenis nilai, dan dapat mengimplementasikannya berdasarkan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Pada bagian lain dalam buku ini, juga dipaparkan esensi implementasi nilai dan kepatuhan terhadap norma pada hakikatnya merupakan pembelajaran moral dan menjadi bagian dalam pendidikan karakter dalam pembelajaran IPS. Oleh karena itu, pemahaman tentang nilai, norma dan moral pada bab ini menjadi dasar bagi Anda dalam mempelajari fungsi Pendidikan IPS sebagai medium sekaligus sebagai program sistemik pembelajaran nilai dan moral sekaligus sebagai bagian dari pembentukan warga negara yang baik (*a good citizenship*).

Karakter yang baik berkaitan dengan mengetahui yang baik (*knowing the good*), mencintai yang baik (*loving the good*), dan melakukan yang baik (*acting the good*). Mengetahui yang baik berarti dapat memahami dan membedakan antara yang baik dan yang buruk. Mengetahui yang baik berarti mengembangkan kemampuan untuk menyimpulkan suatu keadaan, dan dengan sengaja memilih sesuatu yang baik untuk dilakukan, dan kemudian melakukannya (*practical wisdom*). Artinya, karakter warga

negara yang baik meliputi beberapa aspek yang melibatkan pengetahuan (*moral knowing*), perasaan (*moral feeling*), dan tindakan (*moral action*). Dengan demikian esensi dari pendidikan IPS sebagai pendidikan nilai-moral dalam bab ini, diharapkan dapat mendukung terhadap pencapaian karakter warga negara yang baik.

B. Kompetensi

Setelah Anda selesai mempelajari bab V ini diharapkan Anda dapat menjelaskan tentang:

- 1) Pengertian Nilai, Norma, dan Moral.
- 2) Hakikat Nilai.
- 3) Nilai dan Karakter.
- 4) Nilai-nilai dan Karakter Warga Negara.

Pemahaman secara komprehensif terhadap empat materi di atas, menjadi syarat bagi Anda dalam memenuhi kompetensi yang kelima, yakni pemilikan kompetensi berkenaan dengan materi pendidikan nilai dalam pembelajaran IPS.

C. Konten

1. Pengertian Nilai, Norma, dan Moral

a. Pengertian Nilai

Mendengar kata nilai kita sepintas akan membayangkan harga dalam nominal, atau berupa angka. Nilai itu relatif, karena sesuatu itu bernilai terletak pada situasi atau waktu dan tempat dimana dan kapan memaknai sesuatu. Bagi seseorang sesuatu itu bernilai, sedangkan bagi orang lain mungkin tidak. Arti kata nilai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah harga; harga uang; angka kepandaian; banyak sedikitnya isi, kadar, mutu; sifat-sifat yang penting atau berguna bagi manusia; sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya.

Kata nilai (*value*) termasuk pokok bahasan penting dalam filsafat. Persoalan nilai dibahas dalam salah satu cabang filsafat yaitu aksiologi (filsafat nilai).

Nilai biasanya digunakan untuk menunjuk kata benda yang abstrak, yang dapat diartikan sebagai keberhargaan (*worth*) atau kebaikan (*goodness*). Banyak ahli di dunia yang berbicara tentang nilai, mendefinisikan nilai dan memberi pengertian tentang nilai. Berikut ini beberapa pengertian nilai menurut para ahli.

Pengertian nilai menurut *Dictionary of Sociology and Related Sciences* dalam Kaelan M.S. (2008: 87), dikemukakan bahwa nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok, (*The believed capacity of any object to statisfy a human desire*). Jadi nilai itu pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Sesuatu itu mengandung nilai artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada objek tersebut. Dengan demikian nilai itu adalah suatu kenyataan yang tersembunyi dibalik kenyataan-kenyataan lainnya. Adanya nilai karena adanya kenyataan-kenyataan lain sebagai pembawa nilai (*wartranger*). Sedangkan menurut *Dictionary* dalam Winataputra (1989), nilai adalah harga atau kualitas sesuatu. Artinya, sesuatu dianggap memiliki nilai apabila sesuatu tersebut secara instrinsik memang berharga.

Berdasarkan uraian di muka dapat disimpulkan bahwa pengertian dan makna nilai adalah suatu bobot/kualitas perbuatan kebaikan yang terdapat dalam berbagai hal yang dianggap sebagai sesuatu yang berharga, bermutu, berguna, menunjukkan kualitas dan memiliki manfaat bagi manusia. Dalam pembelajaran di sekolah materi pembelajaran nilai sangat penting untuk ditanamkan sejak dini karena nilai bermanfaat sebagai standar pegangan hidup.

Dalam nilai terkandung cita-cita, harapan, harapan, dambaaan-dambaan dan keharusan. Maka

apabila kita berbicara tentang nilai, sebenarnya kita berbicara tentang hal yang ideal yang merupakan cita-cita, harapan, dambaan dan keharusan. Berbicara tentang nilai berarti berbicara tentang *das Sollen*, bukan *das Sein*, kita masuk kerokhaniaan bidang makna normative, bukan kognitif, kita masuk ke dunia ideal dan bukan dunia real. Meskipun demikian, di antara keduanya, antara *das Sollen* dan *das Sein*, antara yang makna normatif dan kognitif, antara dunia ideal dan dunia real itu saling berhubungan atau saling berkait secara erat. Artinya bahwa *das Sollen* itu harus menjelma menjadi *das Sein*, yang ideal harus menjadi real, yang bermakna normatif harus direalisasikan dalam perbuatan sehari-hari yang merupakan fakta.

b. Hierarki Nilai

Terdapat berbagai macam pandangan tentang nilai hal ini sangat tergantung pada titik tolak dan sudut pandangnya masing-masing dalam menentukan tentang pengertian serta hierarki nilai. Misalnya kalangan materialis memandang bahwa nilai yang tertinggi adalah nilai material. Kalangan hedonis berpandangan bahwa nilai yang tertinggi adalah nilai kenikmatan. Pada hakikatnya segala sesuatu itu bernilai, hanya nilai macam apa yang ada serta bagaimana hubungan nilai tersebut dengan manusia. Banyak usaha untuk menggolong-golongkan nilai tersebut dan penggolongan tersebut amat beranekaragam, tergantung pada sudut pandang dalam rangka penggolongan tersebut.

Max Sceler dalam Kaelan M.S. (2008: 88), mengemukakan bahwa nilai-nilai yang ada, tidak sama luhurnya dan sama tingginya. Nilai-nilai itu pada kenyataannya ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai-nilai lainnya. Menurut tinggi rendahnya, nilai-nilai dapat

dikelompokkan dalam empat tingkatan sebagai berikut:

- 1) Nilai-nilai kenikmatan: dalam tingkatan ini terdapat deretan nilai-nilai yang mengenakan dan tidak mengenakan (*die Wertreihe des Angenehmen und Unangenehmen*), yang menyebabkan orang senang atau menderita tidak enak.
- 2) Nilai-nilai kehidupan: dalam tingkat ini terdapatlah nilai-nilai yang penting bagi kehidupan (*Werte des vitalen Fuhlens*) misalnya kesehatan, kesegaran jasmani, kesejahteraan umum.
- 3) Nilai-nilai kejiwaan: dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai kejiwaan (*geistige werte*) yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun lingkungan. Nilai-nilai semacam ini ialah keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat.
- 4) Nilai-nilai kerohanian: dalam tingkat ini terdapatlah modalitas nilai dari yang suci dan tak suci (*wermodalitat des Heiligen ung Unheiligen*). Nilai-nilai semacam ini terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi.

Walter G. Everet dalam *The Liang Gie* (2010:43) menggolongkan nilai manusiawi kedalam delapan kelompok sebagai berikut:

- 1) Nilai-nilai Ekonomik
Mencakup semua benda yang dapat diperjualbelikan dan nilainya ditunjukkan oleh harga pasar dari sesuatu benda. Nilai ekonomik hanyalah merupakan sarana untuk mencapai berbagai nilai lainnya.
- 2) Nilai-nilai Badaniah
Ini meliputi berbagai benda yang membantu tercapainya kesehatan, efisiensi, dan keindahan dari kehidupan jasmani manusia.
- 3) Nilai-nilai Rekreasi

Kelompok ini terdiri atas nilai-nilai dari permainan dan waktu luang yang dapat menyumbang pada pengkayaan kehidupan.

4) Nilai-nilai Perserikatan

Ini menyangkut aneka bentuk perserikatan manusia, seperti persahabatan, kehidupan keluarga sampai hubungan-hubungan sejagat. Kelompok nilai ini dapat juga disebut nilai sosial.

5) Nilai Perwatakan

Kelompok nilai ini meliputi seluruh kebajikan perseorangan maupun kemasyarakatan yang diinginkan, termasuk keadilan, kedermawanan, pengendalian diri, dan kejujuran.

6) Nilai-nilai Estetis

Ini adalah nilai-nilai keindahan sebagaimana terdapat pada alam dan karya seni

7) Nilai-nilai Intelektual

Kelompok ini mencakup nilai-nilai pengetahuan dan pengajaran kebenaran

8) Nilai-nilai Keagamaan

Nilai ini bersangkutan paut dengan agama. Agama adalah suatu pencarian terhadap kehidupan yang baik dengan bantuan tertib kosmik. Ruang lingkungannya meliputi pemujaan, kebaktian dan keterikatan pada nilai yang dianggap nilai terluhur.

Notonagoro dalam Kaelan M.S. (2008:89) membagi nilai menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia, atau kebutuhan material ragawi manusia.
- b. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau beraktivitas.
- c. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia nilai kerohanian dibedakan atas empat macam: 1) Nilai kebenaran, yang bersumber pada akal (ratio, budi, cipta) manusia.

2) Nilai keindahan atau nilai estetis, yang bersumber pada unsur perasaan (*esthetis, gevoel, rasa*) manusia. 3) Nilai kebaikan atau nilai moral, unsur kehendak (*will, Wolen, karsa*) manusia. 4) Nilai religious, yang merupakan nilai kerokhaniaan tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber kepada kepercayaan atau keyakinan manusia.

Masih banyak lagi cara mengelompokkan nilai, misalnya seperti yang dilakukan N. Rescher, yaitu pembagian nilai berdasarkan pembawa nilai (*trager*), hakikat keuntungan yang diperoleh, dan hubungan antara pendukung nilai dan keuntungan yang diperoleh, Begitu pula dengan pengelompokkan nilai menjadi nilai intrinsik dan ekstrinsik, nilai objektif dan nilai subjektif, nilai positif dan nilai negatif (*disvalue*), dan sebagainya.

Dari uraian mengenai bermacam-macam nilai di atas, dapat dikemukakan pula bahwa yang mengandung nilai itu bukan hanya sesuatu yang berwujud material saja, akan tetapi juga sesuatu yang berwujud non-material atau immaterial. Bahkan sesuatu yang immaterial itu dapat mengandung nilai yang sangat tinggi dan mutlak bagi manusia. Nilai-nilai material relatif lebih mudah diukur, yaitu dengan menggunakan alat indra maupun alat pengukur seperti berat, panjang, luas, dan sebagainya. Sedangkan nilai kerokhaniaan/spiritual lebih sulit mengukurnya. Dalam menilai hal-hal kerokhaniaan/spiritual, yang menjadi alat ukurnya adalah hati nurani manusia yang dibantu oleh alat indra, cipta, rasa karsa dan keyakinan manusia.

Notonagoro dalam Kaelan M.S. (2008:89) berpendapat bahwa nilai Pancasila tergolong nilai-nilai kerohanian, tapi nilai-nilai kerohanian yang mengakui adanya nilai material dan nilai vital. Nilai-nilai material, nilai vital, nilai kebenaran, nilai keindahan atau estetis, nilai kebaikan atau nilai moral, maupun nilai kesucian

yang sistematis dan hirarkis yang dimulai dari sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar, sampai dengan sila ke lima yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai tujuannya.

Ada sekelompok nilai yang memiliki kedudukan atau hirarki yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai-nilai lain yang ada. Nilai ada yang lebih rendah dan ada tingkat nilai yang lebih tinggi yang sifatnya mutlak. Tingkatan nilai ini terletak pada filsafat dari masyarakat, bangsa sebagai subjek pendukung nilai. Misalnya, kita bangsa Indonesia, menempatkan nilai kerokhaniah atau religius pada tingkatan nilai yang lebih tinggi dan nilai mutlak.

Pancasila adalah falsafah, pandangan hidup dan dasar negara kita memuat nilai-nilai luhur yang mendalam yang harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam tatanan nilai kehidupan bernegara, ada yang disebut sebagai nilai dasar. Nilai dasar adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang kurang lebih mutlak. Nilai dasar berasal dari nilai-nilai kultural atau budaya yang berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu yang berakar dari kebudayaan, sesuai dengan UUD 1945 yang mencerminkan hakikat nilai kultural. Nilai instrumental adalah pelaksanaan umum nilai-nilai dasar, biasanya dalam wujud norma sosial atau norma hukum, yang selanjutnya akan terkritisasi dalam lembaga-lembaga yang sesuai dengan kebutuhan tempat dan waktu. Nilai instrumental, walaupun lebih rendah dari nilai dasar, tetapi tidak kalah penting karena nilai ini mewujudkan nilai umum menjadi konkret serta sesuai dengan zaman. Nilai instrumental merupakan tafsir positif terhadap nilai dasar yang umum. Nilai praksis adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Semangatnya nilai praksis ini seyogianya sama dengan semangat nilai dasar dan instrumental. Nilai inilah yang

sesungguhnya merupakan bahan ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental sungguh-sungguh hidup dalam masyarakat atau tidak, Usiono (2007:122-123). Nilai itu bersifat relatif dan subjektif, relatif artinya terletak pada waktu dan tempat. Subjektif yaitu berbeda-beda bagi setiap orang.

c. Pengertian Norma

Norma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berarti aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai peduan, tatanan dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan diterima. Norma juga merupakan sesuatu yang mengikat dalam sebuah kelompok masyarakat, yang pada keselanjutannya disebut norma sosial, karena menjaga hubungan dalam bermasyarakat. Norma pada dasarnya adalah bagian dari kebudayaan, karena awal dari sebuah budaya itu sendiri adalah intraksi antara manusia pada kelompok tertentu yang nantinya akan menghasilkan sesuatu yang disebut norma. Setiap warga masyarakat harus menaati norma yang berlaku. Dengan menaati norma, maka tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi tertib, aman, rukun, dan damai. Masyarakat yang taat terhadap norma yang berlaku dapat membentuk suatu kehidupan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, Tim Abdi Guru (2006:2).

Setiap kelompok, masyarakat, bangsa atau negara diikat oleh norma-norma yang menjamin keamanan dan keberadaanya demi kelangsungan hidupnya. Norma yang ada akan merupakan pedoman hidup bagi anggota masyarakat, bangsa atau negara yang telah menyepakati norma tersebut, yang bersifat mengikat, untuk patuh dan taat, apabila melanggar akan dikenakan sanksi berupa hukuman. Norma tersebut menjadi patokan dan batasan bagi setiap anggota masyarakat untuk berbuat dan bertindak dan menentukan sesuatu itu baik atau buruk. Norma pada

dasarnya berisi perintah dan larangan dalam bertindak, yaitu sesuatu yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam lingkungan kehidupan.

d. Jenis-jenis Norma yang Ada dalam Masyarakat

Norma berisi larangan dan perintah. Perintah adalah keharusan yang harus dilakukan seseorang untuk berbuat sesuatu dengan kebaikan. Larangan adalah keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu karena menimbulkan kerugian. Dengan adanya norma sebagai petunjuk kepada manusia tentang bagaimana manusia harus bersikap bertingkah laku dalam masyarakat agar tercipta kehidupan bersama yang tertib, tenteram, aman, dan harmonis. Norma yang ada dalam masyarakat itu ada bermacam-macam, dan memiliki sifat yang berbeda-beda. Dan pemberian sanksi terhadap pelanggarannya juga berbeda sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran dan jenis norma apa yang dilanggar. Jenis-jenis norma yang ada di masyarakat (Tim Bina Guru 2006:6-7) antara lain yaitu :

- 1) Norma Agama. Norma agama adalah petunjuk hidup yang berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-Nya (Rasul/Nabi), yang berisi perintah, larangan atau anjuran-anjuran. Norma agama bersifat abadi dan universal karena berasal dari wahyu Tuhan dan diberlakukan untuk alam semesta. Pelanggar norma agama mendapat sanksi secara tidak langsung, artinya hukuman atau sanksinya diterima diakhirat nanti, berupa siksaan di neraka.
- 2) Norma Kesusilaan. Norma kesusilaan adalah norma yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Sanksi bagi pelanggar kesusilaan tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakannya, yakni merasa bersalah, menyesal, malu dan sebagainya.

- 3) Norma Kesopanan. Norma kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok manusia yang ada di dalam masyarakat dan dianggap sebagai tuntunan pergaulan sehari-hari oleh masyarakat itu. Norma kesopanan dan norma kesusilaan bersifat relative, artinya apa yang dianggap orang sebagai norma kesopanan dan norma kesusilaan berbeda-beda di berbagai tempat, lingkungan atau waktu. Sanksi bagi yang melanggar norma kesopanan tidak tegas, tetapi dapat diberikan oleh masyarakat berupa cemoohan, celaan, hinaan, atau dikucilkan dan diasingkan dari pergaulan.
- 4) Norma Hukum. Norma hukum adalah pedoman hidup yang dibuat oleh lembaga negara atau lembaga politik suatu masyarakat atau bangsa. Hukum sebagai system norma berfungsi untuk menertibkan dan menstabilkan kehidupan sosial. Disebut norma hukum karena keberadaannya diakui oleh masyarakat sebagai ketentuan yang sah dan ada penegak hukum sebagai pihak yang berwenang untuk memberikan sanksi atas pelanggaran. Sanksi bagi pelanggar norma hukum, tegas, nyata, mengikat dan bersifat memaksa. Bagi yang melanggar hukum akan ditindak tegas oleh aparat penegak hukum dan diproses melalui persidangan di pengadilan. Siapa yang salah akan dikenai hukuman sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Misalnya pelanggaran norma hukum yang dinyatakan oleh hakim di pengadilan dihukum dengan pidana penjara, kurungan, denda atau bahkan hukuman mati sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

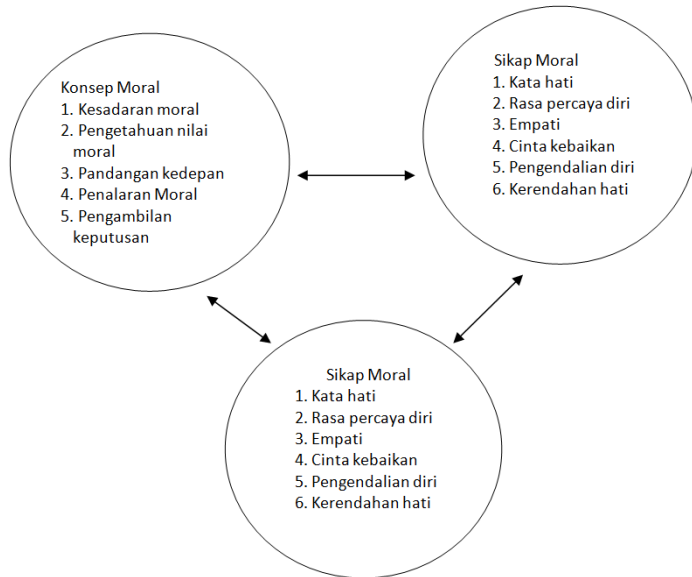
e. Pengertian Moral

Kita sering mengatakan bahwa anak ini bermoral baik, dan anak itu moralnya tidak baik atau bejat. Moral menyangkut tingkah laku seseorang yang kasat

mata yang dapat kita ketahui dengan beinteraksi dengannya, kita dengan mudah dapat mengatakan bahwa ini baik dan yang itu tidak baik, ini benar dan yang itu salah berdasarkan aturan atau norma yang berlaku.

Moral dalam KBBI berarti: ajaran, baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dsb: akhlak, budi pekerti, susila. Moral adalah hal-hal yang sesuai dengan ide-ide yang diterima umum tentang tindakan manusia, mana yang baik dan mana yang wajar.

Moral menurut Thomas Lickona dalam Wahab (2002:1.20), disebut "*educating for character*" atau pendidikan watak. Lickona mengartikan watak atau karakter sesuai dengan pandangan filosof Michael Novak, yakni suatu perpaduan yang harmonis dari berbagai kebijakan yang tertuang dalam keagamaan, sastra, pandangan kaum cerdik pandai dan manusia pada umumnya sepanjang zaman. Lickona memandang karakter atau watak itu memiliki tiga unsure yang saling berkaitan yakni moral *knowing*, moral *feeling*, and moral *behavior* atau konsep moral, rasa dan sikap moral dan perilaku moral, sebagaimana digambarkan sebagai berikut :



Berdasarkan pandangan Lickona mengenai moral bahwa karakter seseorang berkaitan erat dengan keriga hal diatas yaitu, konsep moral, sikap moral dan perilaku moral. Moral atau karakter seseorang didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, dengan mengetahui kebaikan maka ia punya keinginan untuk berbuat baik, dengan keinginan yang kuat dari dalam diri, seseorang akan melakukan perbuatan kebaikan, dengan singkat dapat dikatakan bahwa dengan mengetahui maka muncul keinginan dengan adanya keinginan akan mendorong dirinya untuk berbuat kebaikan.

f. Hubungan Nilai, Norma dan Moral

Norma selalu berjalan seiring dengan nilai dan moral, jika nilai adalah sebuah penghargaan terhadap sesuatu maka norma adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Moral adalah ajaran baik buruk atau tingkahlaku baik dan buruk atau benar salah. Dari norma tersebut kita bisa mengukur moral seseorang apakah yang di lakukan oleh seseorang itu suatu hal yang baik atau

tidak, benar atau salah dengan berpatokan pada norma. Dengan patuh dan taat pada norma yang berlaku sudah pasti bermoral baik, dengan moral yang baik tentu saja akan mendapat nilai yang baik dalam pandangan masyarakat dalam kehidupan baik secara pribadi maupun bermasyarakat. Nilai, norma dan moral tidak dapat dipisahkan dan saling terkait satu sama lain, yang mana ketiganya selalu berhubungan dan mempengaruhi kehidupan manusia.

Untuk mewujudkan ketiga hal di atas diperlukan pendidikan sejak anak berusia muda. Sekarang ini sedang digalakkan pendidikan karakter untuk membangun moral bangsa, dan hal itu sudah menjadi salah satu tujuan pendidikan khususnya di Indonesia.

Dengan pendidikan nilai, norma dan moral, kita berharap manusia akan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta menghargai kemampuan dan karya orang lain lebih bertanggung jawab, adil, santun penuh toleran dalam bersikap dan bertindak sehingga dapat mengembangkan diri dalam bidangnya.

2. Hakikat Nilai

Dalam bagian ini penulis akan membahas pokok bahasan mengenai hakikat dan makna nilai berdasarkan pengertian tentang nilai menurut para ahli, agar memperoleh persepsi dan pemahaman yang memadai dari berbagai sumber dan pendapat. Beberapa hal yang perlu dipahami sebelum pembahasan lebih jauh, diantaranya adalah; pertama, telah disepakati bahwa nilai itu ada, tapi tidak mudah untuk dipahami, sifatnya abstrak dan tersembunyi dibelakang fakta. Kedua, ciri-ciri nilai menurut Bertens dalam (Mulyana, 2004) adalah sebagai berikut: Pertama, nilai berkaitan dengan subyek. Kedua, nilai tampil dalam suatu konteks praktis, ketika subyek ingin membuat sesuatu. Ketiga, nilai menyangkut sifat-sifat yang ditambahkan subyek pada sifat-sifat yang dimiliki objek.

Suatu nilai adalah sebuah keyakinan, suatu cara bertindak yang spesifik, atau suatu keadaan akhir dari eksistensi secara pribadi atau sosial yang lebih diinginkan. Sementara itu Djahiri (1966), menyatakan bahwa nilai merupakan seperangkat ide, gagasan, serta sesuatu yang berharga menurut standar logika, estetika, etika, agama, dan hukum yang menjadi orientasi motivasi dalam berperilaku dan bersikap maka nilai yang dianut dapat dijadikan standar dalam mengukur suatu aktivitas.

Nilai adalah suatu konsep yang berada dalam pikiran manusia yang bersifat tersembunyi, tidak berada dalam dunia empiris. Nilai berhubungan dengan pandangan seseorang tentang baik dan buruk, indah dan tidak indah, layak dan tidak layak, adil dan tidak adil, dan lain sebagainya (Gulo, 2002). Pandangan seseorang tentang semua itu tidak bisa diraba, kita hanya mungkin dapat mengetahuinya dari perilaku yang bersangkutan. Oleh karena itulah nilai pada dasarnya standar perilaku, ukuran yang menentukan atau kriteria seseorang tentang baik dan tidak baik, indah dan tidak indah, layak dan tidak layak, dan lain sebagainya, sehingga standar itu yang akan mewarnai perilaku seseorang. Dalam hubungan ini, Fraenkel (dalam Gulo, 2002) mengemukakan beberapa ciri tentang nilai sebagai berikut.

- a. Nilai adalah suatu konsep yang tidak berada di dalam dunia empirik, tetapi di dalam pikiran manusia. Studi tentang nilai biasanya berada dalam lapangan estetika dan etika. Estetika berhubungan dengan apa yang indah, yang enak dinikmati, sedangkan etika berhubungan dengan bagaimana seharusnya orang berperilaku, apa yang benar dan apa yang salah.
- b. Nilai adalah standar perilaku, ukuran yang menentukan apa yang indah, apa yang efisien, apa yang berharga yang ingin dipelihara dan dipertahankan. Sebagai standar, nilai merupakan pedoman untuk menentukan pilihan. Antara lain menentukan jenis tindakan atau perbuatan apa yang

patut dilakukan. Standar perbuatan seperti itu disebut nilai – nilai moral yang menuntun seseorang untuk berbuat sesuatu tentang apa yang dianggap benar dan layak.

- c. Nilai itu direfleksikan dalam perbuatan atau perkataan. Nilai itu sangat abstrak dan menjadi konkret apabila seseorang bertindak dengan cara tertentu.
- d. Nilai itu merupakan abstraksi atau idealis manusia tentang apa yang dianggap paling penting dalam hidup mereka. Karena itu, nilai dapat dibandingkan, dipertentangkan, dianalisis dan didiskusikan serta digeneralisasikan pada pihak lain, nilai juga memiliki dimensi emosional. Nilai tidak hanya sesuatu yang idealis, tetapi juga merupakan komitmen emosional yang kuat.

Komitmen terhadap suatu nilai tertentu terjadi melalui pembentukan sikap. Menurut Thorstone (dalam Gulo, 2002), sikap atau attitude *ialah a degree of positive or negative associated psychological object* atau tingkat kecendrungan atau pernyataan gejala senang atau tidak senang dari seseorang terhadap sesuatu objek. Jika seseorang berhadapan dengan dengan suatu objek tertentu, maka responsnya diekspresikan dalam bentuk sangat senang, agak senang, tidak acuh, kurang senang atau tidak senang. Kalau objek itu adalah music rock, maka ekspresi itu tampak dalam bentuk gerakan kakinya yang dihentak-hentakan secara spontan (sangat senang), atau sebaliknya, ia tutup telinga (tidak senang).

Sikap yang kelihatan senang atau tidak senang itu berada dalam kawasan afektif, tidak bisa dipisahkan dari kognitif dan psikomotorik. Penalaran (kognitif) terhadap suatu objek dan kemampuan untuk bertindak terhadapnya (psikomotorik) turut menentukan sikap seseorang terhadap objek yang bersangkutan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

- Nilai diketahui dari penampilannya

- Pengembangan domain afektif pada nilai tidak bisa dipisahkan dari aspek kognitif dan psikomotorik
- Masalah nilai adalah masalah emosional dan karena itu dapat berubah, berkembang, sehingga bisa dibina
- Perkembangan nilai tidak terjadi sekaligus tetapi melalui tahap – tahap tertentu.

a. Jenis-Jenis Nilai

Dalam teori nilai yang digagasnya, Spranger (dalam Mulyana, 2004) menjelaskan adanya enam orientasi nilai yang sering dijadikan rujukan oleh manusia dalam kehidupannya. Dalam pemunculannya, enam nilai tersebut cenderung menampilkan sosok yang khas terhadap pribadi seseorang. Karena itu, Spranger merancang teori nilai itu dalam istilah tipe manusia (*the types of man*), yang berarti setiap orang memiliki orientasi yang lebih kuat pada salah satu diantara enam nilai yang terdapat dalam teorinya. Enam nilai yang dimaksud adalah nilai teoritik, nilai ekonomis, nilai estetik, nilai sosial, nilai politik, dan nilai agama. Nilai-nilai tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1) Nilai Teoritik

Nilai ini melibatkan pertimbangan logis dan rasional dalam memikirkan dan membuktikan kebenaran sesuatu. Nilai teoritik memiliki kadar benar-salah menurut pertimbangan akal pikiran. Karena itu, nilai ini erat degan konsep, aksioma, dalil, prinsip, teori, dan generalisasi yang diperoleh dari sejumlah pengamatan dan pembuktian ilmiah. Kadar kebenaran teoritik muncul dalam beragam bentuk sesuai dengan wilayah kajiannya. Kebenaran teoritik filsafat lebih mencerminkan hasil pemikiran radikal dan komprehensif atas gejala-gejala yang lahir dalam kehidupan; sedangkan kebenaran ilmu pengetahuan menampilkan kebenaran obyektif yang dicapai dari hasil pengujian dan pengamatan yang mengikuti

norma ilmiah. Karena itu, komunitas manusia yang tertarik pada nilai ini adalah filosof dan ilmuwan.

2) Nilai Ekonomis

Nilai ini terikat dengan pertimbangan nilai yang berkadar untung-rugi. Obyek yang ditimbangnya adalah "harga" dari suatu barang atau jasa. Secara praktis nilai ekonomi dapat ditemukan dalam pertimbangan nilai produksi, pemasaran, konsumsi barang, perincian kredit keuangan, dan pertimbangan kemakmuran hidup secara umum. Kelompok manusia yang memiliki minat kuat terhadap nilai ini adalah para pengusaha, ekonom, atau setidaknya orang yang memiliki jiwa materialistik.

3) Nilai Estetik

Nilai estetik menempatkan nilai tertingginya pada bentuk dan keharmonisan. Apabila nilai ini ditilik dari sisi subyek yang memilikinya, maka akan muncul kesan indah-tidak indah. Nilai estetik ini lebih mengandalkan pada hasil penilaian pribadi seseorang yang bersifat subyektif. Nilai estetik banyak dimiliki oleh para seniman seperti musisi, pelukis, atau perancang model

4) Nilai Sosial

Raven (1977) mendefinisikan nilai sosial sebagai berikut: "*Sosial values are set of society attitude considered as a truth and it is become the standard for people to act in order to achieve democratic and harmonious life. The values are used as standards to act and to construct a sincere relationship among the society*".

Raven menjelaskan bahwa nilai-nilai sosial merupakan seperangkat sikap masyarakat yang dihargai sebagai suatu kebenaran dan dijadikan standar untuk bertingkah laku guna memperoleh kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis. Nilai sosial tersebut digunakan sebagai acuan atau

pedoman untuk bertingkah laku guna menata hubungan sesama warga masyarakat secara sukarela.

Nilai tertinggi yang terdapat pada nilai ini adalah kasih sayang antar manusia. Karena itu kadar nilai ini bergerak pada rentang antara kehidupan yang individualistik dengan altruistik. Sikap tidak berpraduga jelek terhadap orang lain, sosiabilitas, keramahan, dan perasaan simpati dan empati merupakan perilaku yang menjadi kunci keberhasilan dalam meraih nilai sosial. Dalam psikologi sosial, nilai sosial yang paling ideal dapat dicapai dalam konteks hubungan interpersonal, yakni ketika seseorang dengan yang lainnya saling memahami. Sebaliknya, jika manusia tidak memiliki perasan kasih sayang dan pemahaman terhadap sesamanya, maka secara mental ia hidup tidak sehat. Nilai sosial banyak dijadikan pegangan hidup bagi orang yang senang bergaul, suka berderma, dan cinta sesama manusia atau yang dikenal sebagai sosok filantropik (Mulyana, 2004).

5) Nilai Politik

Nilai tertinggi dalam nilai ini adalah kekuasaan dengan kadar nilainya yang bergerak dari intensitas pengaruh yang rendah sampai pada pengaruh yang tinggi (otoriter). Kekuatan merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap pemilikan nilai politik pada diri seseorang yang kurang tertarik pada nilai ini. Dalam konteks persaingan nilai politik ini bersifat universal, namun apabila dilihat dari kadar pemilikannya nilai politik memang menjadi tujuan utama orang tertentu, seperti para politisi atau penguasa.

6) Nilai Agama

Secara hakiki sebenarnya nilai ini merupakan nilai yang memiliki dasar kebenaran yang paling kuat dibandingkan dengan nilai-nilai sebelumnya. Nilai ini

bersumber dari kebenaran tertinggi yang datangnya dari Tuhan. Struktur mental manusia dan kebenaran mistik-transendental merupakan dua sisi unggul yang dimiliki nilai agama. Nilai tertinggi yang harus dicapai adalah kesatuan (*unity*) yaitu adanya keselarasan semua unsur kehidupan; antara kehendak manusia dengan perintah Tuhan, antara ucapan dan tindakan, atau antara *`itiqad* dengan perbuatan. Spranger melihat bahwa pada sisi nilai inilah kesatuan filsafat hidup dapat dicapai. Di antara kelompok manusia yang memiliki orientasi kuat terhadap nilai ini adalah para nabi, imam, atau orang-orang yang shaleh.

Nilai terdapat di dalam semua bidang kehidupan (Gulo, 2002). Di dalam bidang pergaulan ada nilai-nilai sebagai pedoman bagi seseorang untuk bergaul, yang kita kenal dengan nilai kesopanan. Di dalam kehidupan berekonomi ada nilai-nilai ekonomi yang menjadi pedoman untuk berekonomi. Didalam pergaulan hukum ada nilai-nilai yurisdiksi sebagai pegangan tentang apa yang adil dan yang tidak adil. Keseluruhan nilai-nilai tersebut membentuk suatu sistem nilai, yang susunannya bagi setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang menempatkan nilai ekonomi pada tempat yang paling tinggi, dan semua yang lain di tempatkan menurut urutan kepentingannya di bawah ekonomi.

Nilai Yuridis misalnya, jika ditempatkan di bawah nilai ekonomi berarti keadilan ditentukan oleh ekonomi. Kalau nilai religi di tempatkan di bawahnya maka ibadah berorientasi pada keadilan dan ekonomi. Sebaliknya, kalau nilai religi ditempatkan paling tinggi, berarti nilai lain seperti ekonomi, yuridis, etik dan lain sebagainya terarah pada religi. Setiap orang mempunyai susunan tertentu tentang nilai, yang paling penting, agak penting, kurang penting dan sebagainya. Yang dikatakan materialistis adalah orang yang memutlakkan nilai ekonomi. Susunan nilai itu

bisa berubah-ubah. Bagi seseorang apa yang dianggapnya penting hari ini, besok dianggapnya kurang penting. Karena sifatnya yang demikian, maka sistem nilai itu bisa dibina di dalam diri seseorang.

b. Manfaat Nilai

Untuk menjelaskan manfaat nilai bagi kehidupan manusia dapat dilacak dari posisi nilai yang berada dalam tiga wilayah pengetahuan manusia, yaitu wilayah filosofis, wilayah ilmu pengetahuan, dan wilayah mistik. Kegunaan nilai dalam wilayah pengetahuan itu dijelaskan sebagai berikut.

c. Manfaat Nilai dalam Wilayah Filsafat

Ketika suatu nilai kebenaran diperoleh melalui pemikiran filsafat, nilai itu dapat dijadikan rujukan dalam menentukan cara hidup suatu masyarakat atau bangsa. Jika nilai kebenaran kemudian diakui secara luas dan benar-benar dijadikan rujukan dalam bermasyarakat atau berbangsa, maka status nilai bergeser dari nilai kebenaran filosofis ke arah nilai keyakinan ideologis. Pancasila misalnya, merupakan ideologi bangsa kita yang dirumuskan dari hasil pemikiran filosofis tentang nilai-nilai luhur bangsa. Nilai-nilai yang dicapai melalui pemikiran filosofis itu dikristalisasi ke dalam lima sila yang secara hierarkis menempatkan nilai ketuhanan sebagai nilai tertinggi, diikuti oleh nilai kodrat kemanusiaan, kemudian nilai etis-filosofis persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial. Karena itu, William O'Neil (2001) mengindikasikan bahwa hasil pemikiran filosofis yang tadinya elitis dapat menjadi keyakinan ideologis yang populis tatkala diterima sebagai fakta atau kebenaran oleh suatu kelompok.

Namun pada batas-batas tertentu, nilai kebenaran yang dicapai melalui filsafat tidak selalu menjadi ideologi suatu bangsa. Kebenaran-kebenaran itu berfungsi sebagai rujukan nilai dalam memecahkan masalah yang spesifik. Sebagai misal, Filsafat

Pendidikan menemukan kebenaran bahwa manusia adalah hewan yang dapat dididik (*animal educandum*). Kebenaran ini dapat dijadikan rujukan untuk melakukan suaha-usaha pendidikan ke arah menyediakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan anak. Demikian pula, ketika Filsafat Pendidikan Islam menemukan adanya potensi keagamaan (*hidayat al-diniyyat*) dalam diri anak, maka hal itu dapat dijadikan petunjuk bagi pengembangan sistem pendidikan yang dapat menumbuhkan kesadaran beragama anak. Dengan demikian, nilai-nilai kebenaran atau keutamaan yang dicapai melalui filsafat berguna bagi penyelesaian masalah kehidupan manusia, mulai dari permasalahan yang lebih spesifik sampai pada permasalahan ideologi suatu bangsa (Mulyana, 2004).

d. Manfaat Nilai dalam Wilayah Ilmu Pengetahuan

Teori-teori ilmu pengetahuan dapat dipastikan memiliki nilai. Setidaknya dalam teori itu terkandung nilai logis yang sekaligus mencerminkan tradisi kebenaran ilmu pengetahuan. Dalam Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora, nilai dapat kita temukan bukan saja sebagai nilai logis, tetapi juga sebagai nilai etis dan nilai estetis. Sebagai misal, teori struktur berpikir yang digagas Robert Kaplan (1966) dalam linguistik mencakup tiga nilai tersebut. Teori linguistik ini menyatakan bahwa orang Inggris memiliki proses berpikir yang linier (*linear system*), sedangkan orang Timur cenderung berputar (*coil system*). Nilai kebenaran logis dalam teori ini dapat diperoleh ketika kita berpikir bahwa pada kenyataan orang Inggris dan orang Timur pada umumnya menggunakan cara berpikir demikian. Ketika orang Inggris mengemukakan pendapat, mereka cenderung *to-the-point*. Ini berbeda dari orang Timur pada umumnya yang tidak langsung pada sasaran yang dituju. Sedangkan nilai etis dalam teori linguistik itu dapat diperoleh dengan

cara menelaah perilaku menghargai terhadap orang lain sebagai akibat dari cara berpikir kebahasaan yang berbeda. Boleh jadi, bagi orang Inggris etika berargumen dengan orang lain diungkapkan dengan terus terang. Tetapi, orang Timur tidak demikian. Etika berargumen perlu dikemas dalam bahasa yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Demikian pula untuk nilai estetis. Nilai ini dapat kita peroleh dari dua teori tentang sistem berpikir itu dengan cara menelaah struktur keindahan bahasa. Meskipun nilai keindahan dalam berpikir itu relatif, tetapi unsur keindahan pasti ada dalam kedua teori itu. Dengan demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam teori linguistik itu dapat bermanfaat bagi pemahaman kita tentang latar belakang budaya bangsa, sekaligus untuk memperbaiki budaya berpikir.

Lebih khusus lagi, pada wilayah ilmu pengetahuan ini tidak sedikit teori-teori nilai yang telah digagas oleh para ahli nilai. Misalnya, teori klasifikasi nilai menurut Rokeach (1973) yang membagi nilai ke dalam nilai instrumental dan nilai terminal dapat dijadikan petunjuk bagi proses penyadaran nilai terhadap peserta didik. Teori nilai ini setidaknya dapat memberikan petunjuk bahwa penyadaran nilai perlu dimulai dari nilai-nilai instrumental sebelum sampai pada kesadaran nilai terminal. Sifat nilai instrumental yang lebih operasional dibanding nilai terminal kemungkinan proses penyadaran nilai berlangsung efektif. Sebagai misal, menanamkan rasa keindahan pada diri anak, guru dapat membiasakan hidup bersih pada anak didik ketika mereka berada di lingkungan sekolah. Inilah kegunaan teori nilai pada wilayah ilmu pengetahuan

e. Manfaat Nilai dalam Dunia Spiritual (Mistik)

Kebiasaan para sufi untuk memperbanyak unsur rohani (lahut) dan membatasi unsur jasmani (nasut) merupakan bukti bahwa nilai ada dalam wilayah

mistik. Hal ini dapat dipahami karena nilai menjadi rujukan bagi mereka dalam bertindak. Tidaklah mungkin kalau mereka tidak meyakini bahwa di sana ada sesuatu yang berharga. Karena itu, tindakan mereka yang diarahkan pada pencerahan batin melalui pengembangan rasa adlah upaya mereka dalam meraih nilai. Nilai ini bersifat mistik-theistik. Sumbernya dari Tuhan.

Nilai-nilai apa saja yang dikejar oleh para sufi itu? Mudah diduga bahwa para sufi mengejar nilai-nilai yang bersifat ruhaniah, bukan jasmaniah. Karenanya, tema-tema abstrak yang secara spesifik digunakan oleh kaum sufi itulah nilai-nilai yang dijadikan rujukan mereka. Nilai itu dapat berupa nilai kemuliaan, nilai keutamaan, nilai kemaslahatan, dan nilai kesucian, yang semuanya berpusat pada nilai keyakinan mereka terhadap Tuhan. Lebih dalamlagi, para sufi selalu merindukan dirinya terisi oleh nilai yang melekat pada sifat-sifat Tuhan seperti nilai kemurahan dan nilai kasih sayang. Mereka berharap adanya kulminasi kesadaran nilai pada dirinya. Sebab itu, cara mereka menghuni dunia kehidupan batin sulit dipahami oleh orang yang tidak secara sukarela mengikuti relung kehidupan itu. Keyakinan terhadap nilai-nilai ini berguna bagi pencerahan hati agar hati dapat membimbing pikiran dan tindakan.

Sebenarnya masih ada nilai-nilai yang berkembang dalam wilayah mistik ini seperti dalam mistik-magis putih. Namun, kalau dilihat dari tujuannya mistik-magis ini agak berbeda dari mistik biasa yang dianut kaum sufi. Tujuan belajar mistik-magis putih ada kaitannya dengan kekuatan atau kepintaran dalam melakukan sesuatu. Karena itu, nilai kekuatan dan nilai kepintaran boleh jadi merupakan nilai yang paling diutamakan. Keyakinan terhadap nilai seperti itu bermanfaat untuk membantu orang lain atau untuk mempertahankan diri.

3. Nilai dan Karakter

a. Pengertian Nilai

Nilai yang dalam bahasa Inggris disebut “*value*”, menurut Djahiri (1999), dapat diartikan sebagai harga, makna, isi dan pesan, semangat, atau jiwa yang tersurat dan tersirat dalam fakta, konsep, dan teori, sehingga bermakna secara fungsional. Disini, nilai difungsikan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan kelakuan seseorang, karena nilai dijadikan standar perilaku. Sedangkan menurut *Dictionary* dalam Winataputra (1989), nilai adalah harga atau kualitas sesuatu. Artinya, sesuatu dianggap memiliki nilai apabila sesuatu tersebut secara intrinsik memang berharga.

Di dalam *Dictionary of Sociology and Related Sciences* ditemukan bahwa nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok (*The beleived Capacity of any object to statisfy a human desire*). Jadi nilai itu pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Sesuatu itu mengandung nilai artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu itu, misalnya bunga itu indah, perbuatan itu susila. Indah, susila adalah sifat atau kualitas yang melekat pada bunga dan perbuatan. Dengan demikian, maka nilai itu sebenarnya adalah suatu kenyataan yang “tersembunyi” di balik kenyataan-kenyataan lainnya. Ada nilai itu, karena adanya kenyataan-kenyataan lain sebagai pembawa nilai yang disebut wartrager (Kaelan, 2003:87).

Menilai berarti, suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, kemudian untuk selanjutnya diambil keputusan. Keputusan itu merupakan keputusan nilai yang dapat menyatakan berguna atau tidak berguna, benar atau

tidak benar, baik atau tidak baik, indah atau tidak indah. Keputusan yang dilakukan oleh subjek penilai tentu berhubungan dengan unsur-unsur yang ada pada manusia, sebagai subjek penilai, yaitu unsur-unsur jasmani, akal, rasa, karsa (kehendak) dan kepercayaan. Sesuatu itu dikatakan bernilai apabila sesuatu itu berharga, berguna, benar, indah, baik, dan lain sebagainya.

Di dalam nilai itu sendiri terkandung cita-cita, harapan-harapan, dambaan dambaan dan keharusan. Oleh karena itu, apabila kita berbicara tentang nilai, sebenarnya kita berbicara tentang hal yang ideal, tentang hal yang merupakan cita-cita, harapan, dambaan, dan keharusan. Berbicara tentang nilai berarti berbicara tentang *das solen* bukan *das sein*. Kita masuk ke rohanian bidang makna normatif, bukan kognitif, kita masuk dunia ideal dan bukan dunia real.

Meskipun demikian, di antara keduanya, antara *das solen* dan *das sein*, antara yang makna normatif dan kognitif, antara dunia ideal dan dunia real itu saling berhubungan atau saling berkait secara erat. Artinya bahwa *das solen* itu harus menjelma menjadi *das sein*, yang ideal menjadi real, yang bermakna normatif harus direalisasikan dalam perbuatan sehari-hari yang merupakan fakta.

Pendidikan nilai adalah pendidikan yang mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai dalam diri peserta didik. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai, berusaha mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai budaya bangsa dan nilai-nilai filsafat bangsa yaitu Pancasila. Pelaksanaannya selain melalui taksonomi yang dikembangkan oleh Bloom, juga bisa menggunakan jenjang afektif yaitu Pendidikan Kewarganegaraan menerima nilai (*receiving*), menanggapi nilai/ penanggapan nilai (*responding*), penghargaan nilai

(*valuing*), pengorganisasian nilai (*organization*), karakterisasi nilai (*characterization*).

Nilai Pancasila yang digali dari bumi Indonesia sendiri merupakan pandangan hidup/panutan hidup bangsa Indonesia. Kemudian, ditingkatkan kembali menjadi Dasar Negara yang secara yuridis formal ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu sehari setelah Indonesia merdeka. Secara spesifik, nilai Pancasila telah tercermin dalam norma seperti norma agama, kesusilaan, kesopanan, kebiasaan, serta norma hukum.

Dengan demikian, nilai Pancasila secara individu hendaknya dimaknai sebagai cermin perilaku hidup sehari-hari yang terwujud dalam cara bersikap dan dalam cara bertindak. Misalnya, nilai contoh gotong-royong. Jika perbuatan gotong-royong dimaknai sebagai nilai, maka akan lebih bermakna jika nilai gotong-royong tersebut telah menjadi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak seseorang secara individu maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, nilai gotong-royong seperti yang dicontohkan tadi adalah perilaku yang menunjukkan adanya rasa saling membantu sesama dalam melakukan sesuatu yang bisa dikerjakan secara bersama-sama sebagai perwujudan dari rasa solidaritas yang memiliki makna kebersamaan dalam kegiatan bergotong-royong.

b. Macam-Macam Nilai

1) Nilai Dasar

Meskipun nilai bersifat abstrak dan tidak dapat diamati oleh panca indra manusia, namun dalam kenyataannya nilai berhubungan dengan tingkah laku manusia. Setiap memiliki nilai dasar yaitu berupa hakikat, esensi, intisari atau makna yang dalam dari nilai-nilai tersebut. Nilai dasar berifat universal karena karena menyangkut kenyataan obyek dari segala sesuatu. Contohnya

tentang hakikat Tuhan, manusia serta makhluk hidup lainnya.

Apabila nilai dasar itu berkaitan dengan hakikat Tuhan maka nilai dasar itu bersifat mutlak karena Tuhan adalah *kausa prima* (penyebab pertama). Nilai dasar yang berkaitan dengan hakikat manusia maka nilai-nilai itu harus bersumber pada hakikat kemanusiaan yang dijabarkan dalam norma hukum yang diistilahkan dengan hak dasar (hak asasi manusia). Dan apabila nilai dasar itu berdasarkan kepada hakikat suatu benda (kuantitas, aksi, ruang dan waktu) maka nilai dasar itu juga dapat disebut sebagai norma yang direalisasikan dalam kehidupan yang praksis. Nilai Dasar yang menjadi sumber etika bagi bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila

2) Nilai Instrumental

Nilai instrumental adalah nilai yang menjadi pedoman pelaksanaan dari nilai dasar. Nilai dasar belum dapat bermakna sepenuhnya apabila belum memiliki formulasi serta parameter atau ukuran yang jelas dan konkrit. Apabila nilai instrumental itu berkaitan dengan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari maka itu akan menjadi norma moral. Namun apabila nilai instrumental itu berkaitan dengan suatu organisasi atau Negara, maka nilai instrumental itu merupakan suatu arahan, kebijakan, atau strategi yang bersumber pada nilai dasar sehingga dapat juga dikatakan bahwa nilai instrumental itu merupakan suatu eksplisitasi dari nilai dasar. Dalam kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia, nilai-nilai instrumental dapat ditemukan dalam pasal-pasal undang-undang dasar yang merupakan penjabaran Pancasila.

3) Nilai Praksis

Nilai praksis merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam kehidupan yang lebih nyata dengan demikian nilai praksis merupakan pelaksanaan secara nyata dari nilai-nilai dasar dan nilai-nilai instrumental.

4) Hakikat Pendidikan Nilai

Pada dasarnya, Pendidikan Nilai dapat dirumuskan dari dua pengertian dasar yang terkandung dalam istilah pendidikan dan nilai. Ketika dua istilah itu disatukan, arti keduanya menyatu dalam definisi Pendidikan Nilai. Namun, karena arti pendidikan dan arti nilai dimaksud dapat dimaknai berbeda, definisi Pendidikan Nilai pun dapat beragam bergantung pada tekanan dan rumusan yang diberikan pada kedua istilah itu.

Mulyana (2004:119) mengungkapkan bahwa secara umum, Pendidikan Nilai dimaksudkan untuk membantu peserta didik agar memahami, menyadari, dan mengalami nilai-nilai serta mampu menempatkannya secara integral dalam kehidupan. Untuk sampai pada tujuan dimaksud, tindakan-tindakan pendidikan yang mengarah pada perilaku yang baik dan benar perlu diperkenalkan oleh para pendidik.

Di dalam proses Pendidikan Nilai, tindakan-tindakan pendidikan yang lebih spesifik dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang lebih khusus bahwa Pendidikan Nilai secara khusus ditujukan untuk: 1) menerapkan pembentukan nilai kepada peserta didik, 2) menghasilkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai yang diinginkan, dan 3) membimbing perilaku yang konsisten dengan nilai-nilai tersebut. Dengan demikian, Pendidikan Nilai meliputi tindakan mendidik yang berlangsung mulai dari usaha penyadaran nilai sampai pada perwujudan perilaku-perilaku yang bernilai.

Pendidikan Nilai membantu peserta didik dengan melibatkan proses-proses sebagai berikut:

1. *Identification of a core of personal and sosial values* (Adanya proses identifikasi nilai personal dan nilai sosial terhadap stimulasi yang diterima).
2. *Philosophical and rational inquiry into the core* (Adanya penyelidikan secara rasional dan filosofis terhadap inti nilai-nilai dari stimulus yang diterima).
3. *Affective or emotive response to the core* (Respon afektif dan respon emotif terhadap inti nilai tersebut).
4. *Decision-making related to the core based on inquiry and response* (Pengambilan keputusan berupa nilai-nilai dan perilaku terhadap stimulus, berdasarkan penyelidikan terhadap nilai-nilai yang ada dalam dirinya).

Sasaran yang hendak dituju dalam Pendidikan Nilai adalah penanaman nilai-nilai luhur ke dalam diri peserta didik. Pendidikan Nilai seyogianya dikembangkan pada diri dan bersifat umum untuk setiap orang. Pendidikan Nilai merupakan proses membina makna-makna yang esensial, karena hakikatnya manusia adalah makhluk yang memiliki kemampuan untuk mempelajari dan menghayati makna esensial, makna yang esensial sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Pendidikan Nilai membina pribadi yang utuh, terampil berbicara, menggunakan lambang dan isyarat yang secara faktual diinformasikan dengan baik, manusia berkreasi dan menghargai estetika ditunjang oleh kehidupan yang kaya dan penuh disiplin.

Dari beberapa pengertian tentang Pendidikan Nilai dapat ditarik suatu definisi Pendidikan Nilai yang mencakup keseluruhan

aspek sebagai pengajaran atau bimbingan kepada peserta didik agar menyadari nilai kebenaran, kebaikan dan keindahan, melalui proses pertimbangan nilai yang tepat dan pembiasaan bertindak yang konsisten.

5) Pentingnya Pendidikan Nilai

Peradaban suatu bangsa sangat ditentukan oleh manusia-manusia pada bangsa itu. Maju mundurnya peradaban bangsa sangat erat terkait dengan akhlak/moral bangsa itu, dan baik-buruknya moral suatu bangsa sangat ditentukan oleh faktor pendidikan. Melalui Pendidikan Nilai, pendidikan menjadi lebih bernilai, tidak hambar dan tidak hampa.

Dalam hal ini penulis membuat analogi pentingnya Pendidikan Nilai dalam proses pembelajaran. Pendidikan Nilai diibaratkan sebagai pupuk, peserta didik diibaratkan sebagai tanah, dan berbagai bidang studi diibaratkan sebagai berbagai macam tanaman. Analogi tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut: setiap siswa menerima berbagai mata pelajaran di sekolah, jika setiap mata pelajaran tersebut tidak memiliki ruh.

Pendidikan Nilai dalam arti tidak diintegrasikan kepada Pendidikan Nilai maka penyampaian mata pelajaran tersebut terasa hampa dan tak bersari, demikian juga siswa sebagai obyek yang menerima berbagai pelajaran tersebut tidak tumbuh menjadi siswa yang utuh (ada sesuatu yang hilang dalam diri siswa), demikian halnya jika pada suatu tanah pertanian ditanami berbagai macam tanaman tetapi tidak dipupuk dengan pupuk yang kualitas super maka tidak akan mengemburkan tanah, dan tidak akan menumbuhkan suburkan tanaman tersebut, walaupun tanaman itu hidup tapi tumbuh tidak sempurna. Jika

pupuk itu diberikan sesuai dengan kadarnya dan ditunjang dengan pemeliharaan yang baik, maka tanah pertanian itu akan gembur dan akan menyuburkan tanaman, mengokohkan akar-akar tanaman, dan diatas tanah tersebut akan tumbuh tanaman yang beraneka ragam dengan akar yang kuat, tidak mudah terseok-seok oleh angin, dan tidak mudah tercerabut. Jika lahan pertanian yang berhasil ini ada di sepanjang hamparan tanah Indonesia, maka wajah Indonesia menjadi wajah yang hijau menyejukkan, indah mempesona, dan sehat membawa manfaat. Dalam proses pembelajaran siswa menerima berbagai macam pelajaran yang bermuatan Pendidikan Nilai, maka setiap ilmu yang telah mereka dapatkan melalui berbagai macam pelajaran plus Pendidikan Nilai itu akan megokohkan akar-akar setiap siswa, dari proses pendidikan inilah lahir siswa-siswa yang berfikir sholeh dan beramal cerdas, cerdas intelektual, spiritual, emosional, dan sosial. Ilustrasi inilah tataran aksiologi dari Pendidikan Nilai.

Pendidikan Nilai bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai luhur ke dalam peserta didik. Salah satu bentuk nilai-nilai luhur tersebut sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

c. Makna Karakter

1) Pengertian Karakter

Karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti "to mark" atau menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku, sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus dan perilaku jelek lainnya dikatakan orang berkarakter jelek. Sebaliknya, orang yang perilakunya sesuai dengan kaidah moral disebut dengan berkarakter mulia.

Pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Dekdiknas adalah "bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak". Adapun berkarakter, adalah berkepribadian, berperilaku, bersifat, dan berwatak.

Karakter mulia berarti individu memiliki pengetahuan tentang potensi dirinya, yang ditandai dengan nilai-nilai seperti reflektif, percaya diri, rasional, logis, kritis, analitis, kreatif dan inovatif, mandiri, hidup sehat, bertanggung jawab, cinta ilmu, sabar, berhati-hati, rela berkorban, pemberani, dapat dipercaya, jujur, menepati janji, adil, rendah hati, malu berbuat salah, pemaaf, berhati lembut, setia, bekerja keras, tekun, ulet/gigih, teliti, berinisiatif, berpikir positif, disiplin, antisipatif, inisiatif, visioner, bersahaja, bersemangat, dinamis, hemat/efisien, menghargai waktu, pengabdian/dedikatif, pengendalian diri, produktif, ramah, cinta keindahan (estetis, sportif, tabah, terbuka, tertib). Individu juga memiliki kesadaran untuk berbuat yang terbaik atau unggul, dan individu juga mampu bertidak sesuai potensi dan kesadarannya tersebut. Karakter adalah realisasi perkembangan positif sebagai individu (intelektual, emosional, sosial, etika, dan perilaku).

Individu yang berkarakter baik atau unggul adalah seseorang yang berusaha melakukan hal-hal

yang terbaik terhadap Tuhan YME, dirinya, sesama, lingkungan, bangsa dan negara serta dunia internasional pada umumnya dengan mengoptimalkan potensi (pengetahuan) dirinya dan disertai dengan kesadaran, emosi dan motivasinya (perasaannya).

2) Nilai-Nilai Karakter

Berdasarkan kajian nilai-nilai agama, norma-norma sosial, peraturan/hukum, etika akademik, dan prinsip-prinsip HAM, telah teridentifikasi butir-butir nilai yang dikelompokkan menjadi lima nilai utama, yaitu nilai-nilai perilaku manusia dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, dan lingkungan serta kebangsaan. Berikut adalah daftar nilai-nilai utama yang dimaksud dan deskripsi ringkasnya:

- **Nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan**

Yaitu religius; pikiran, perkataan dan tindakan seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan/atau ajaran agamanya.

- **Nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri (personal)**

Jujur

Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, baik terhadap diri dan pihak lain.

Bertanggung jawab

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan YME.

Bergaya hidup sehat

Segala upaya untuk menerapkan kebiasaan yang baik dalam menciptakan hidup yang sehat dan menghindari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan.

Disiplin

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.

Kerja keras

Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan guna menyelesaikan tugas (belajar/pekerjaan) dengan sebaik-baiknya.

Percaya diri

Sikap yakin akan kemampuan diri sendiri terhadap pemenuhan tercapainya setiap keinginan dan harapannya.

Berjiwa wirausaha

Sikap dan perilaku yang mandiri dan pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya.

Berpikir logis, kritis, dan inovatif

Berpikir dan melakukan sesuatu secara kenyataan atau logika untuk menghasilkan cara atau hasil baru dan termutakhir dari apa yang telah dimiliki.

Mandiri

Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.

Ingin tahu

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.

Cinta ilmu

Cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap pengetahuan.

3) Hakikat Pendidikan Karakter

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, Pasal 3 dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, Berakhlak mulia, Sehat, Berilmu, Cakap, Kreatif, Mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai karakter kepada peserta didik yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran pada peserta didik yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Dalam pendidikan karakter di LKP, semua komponen (pemangku pendidikan) harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan LKP, pelaksanaan aktivitas pembelajaran, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan dan ethos kerja seluruh warga LKP.

Dengan demikian, pendidikan karakter adalah segala sesuatu yang dilakukan pendidikan, yang mampu mempengaruhi karakter peserta didik. Pendidik membantu membentuk watak peserta didik. Hal ini mencakup keteladanan bagaimana perilaku pendidik, cara pendidik berbicara atau

menyampaikan materi, bagaimana pendidik bertoleransi, dan berbangsa hal terkait lainnya.

4) Pentingnya Pendidikan Karakter

Karakter baik merupakan persyaratan agar kompetensi yang dimiliki seseorang dipakai secara bijaksana. Kompetensi hanya akan menjadi kekayaan dan membawa masalah bagi orang banyak apabila kompetensi tersebut disertai dengan karakter baik. Sebaliknya orang yang berkompentensi tinggi namun karakternya tidak baik cenderung akan memakai kompetensinya untuk hal-hal yang merugikan masyarakat. Dengan demikian, apabila dalam satu masyarakat kerusakan karakter meluas, maka bangsa tersebut akan digerogoti sendiri oleh warganya, atau dengan kata lain masyarakatnya akan melakukan tindakan merusak diri sendiri.

Sebuah peradaban akan menurun apabila terjadidemoralisasi pada masyarakatnya. Banyak pakar, filsuf, dan orang-orang bijak yang mengatakan bahwa faktor moral (akhlak) adalah hal utama yang harus dibangun terlebih dahulu agar bisa membantu sebuah masyarakat yang tertib aman dan sejahtera.

Hubungan antara kualitas karakter dan kemajuan bangsa amat erat. Bangsa yang maju ditandai dengan kualitas karakter masyarakatnya yang baik. Thomas Lickona, profesor pendidikan dari *Cortland University*, mengungkapkan bahwa ada sepuluh tandan-tanda zamanyang harus diwaspadai karena tanda-tanda itu sudah ada berarti bahwa sebuah bangsa sedang menuju jurang kehancuran. Dengan kata lain, jika sepuluh tanda itu ada di Indonesia, bersiap-bersiap bahwa Indonesia aka menuju jurang kehancuran. Ke sepuluh tanda tersebut adalah:

a. Meningkatkan kekerasan di kalangan remaja

- b. Penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk
- c. Pengaruh peer group yang kuta dalam tindak kekerasan
- d. Meningkatkan perilaku merusak diri seperti penggunaan narkoba alkohol, dan seks bebas.
- e. Semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk.
- f. Menurunnya etos kerja
- g. Semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan pendidik
- h. Rendahnya rasa tanggung jwaba individu dan warga negara
- i. Membudayanya rasa tanggung jawab individudan warga negara
- j. Adanya rasa saling curigai dan kebencian di antara sesama.

4. Nilai-Nilai dan Karakter Warga Negara

a. Hakikat dan Pengertian Nilai

Nilai atau dalam bahasa Inggris disebut *value* berarti harga, penghargaan, atau tafsiran. Artinya, harga atau penghargaan yang melekat pada sebuah objek. Objek yang dimaksud dapat berbentuk benda, barang, keadaan, perbuatan, atau perilaku. Nilai merupakan sesuatu yang abstrak. Nilai hanya bisa dipikirkan, dipahami, dan dihayati. Nilai juga berkaitan dengan cita-cita, harapan, keyakinan, dan hal-hal yang bersifat batiniah. Menilai berarti menimbang, yaitu kegiatan manusia yang menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk mengambil suatu keputusan (Lilik, 2012).

Ada berbagai macam nilai yang dikenal dalam masyarakat, diantaranya: (a) nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia, misalnya sandang, pangan dan papan, (b) nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi

manusia untuk dapat mengadakan kegiatan, misalnya buku sangat penting bagi siswa untuk mengadakan kegiatan belajar dan modal yang sangat penting bagi pengusaha untuk melakukan kegiatan bisnis, (c) nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia, misalnya solat bagi umat islam dan kebaktian bagi umat kristiani.

Secara umum, di Indonesia dikenal tiga tingkatan/ hierarki nilai, yaitu:

- 1) Nilai dasar, merupakan hakikat, esensi, intisari, atau makna yang terdalam dari nilai-nilai tersebut. Nilai dasar ini bersifat universal karena menyangkut hakikat kenyataan objektif segala sesuatu. Nilai dasar di Indonesia biasa juga dikenal sebagai nilai asli, yaitu nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila.
- 2) Nilai instrumental, merupakan suatu pedoman yang dapat diukur atau diarahkan. Nilai instrumental merupakan suatu eksplisitasi dari nilai dasar.
- 3) Nilai praksis, pada hakikatnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam suatu kehidupan nyata (Periaman, 2013).

Nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat selalu memiliki sifat (a) abstrak, tetapi selalu ada dalam kehidupan manusia, (b) normatif, artinya mengandung harapan, cita-cita, dan suatu keharusan sehingga nilai memiliki sifat ideal (*das sollen*), (c) nilai merupakan motivator/ daya dorong bagi manusia dalam melakukan tindakan. Setiap masyarakat akan memiliki nilai-nilai yang mereka junjung tinggi. Nilai-nilai ini akan menjiwai perilaku anggota masyarakatnya. Nilai-nilai ini ditanamkan dan dibelajarkan agar menjadi habituasi/ kebiasaan bagi anggota masyarakatnya dalam berperilaku.

b. Nilai-Nilai Asli Bangsa Indonesia

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai

Pancasila dijadikan landasan pokok dan landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Artinya, Pancasila merupakan sumber acuan dalam bertingkah laku dan bertindak dalam menentukan dan menyusun tata aturan hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila berisi lima sila yang pada hakikatnya berisi lima nilai dasar yang fundamental. Nilai-nilai dasar dari Pancasila tersebut adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.

Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai asli bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai yang digali, tumbuh dan berkembang dari budaya bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif sekaligus objektif. Sifat **objektif** nilai-nilai Pancasila adalah:

- 1) Rumusan Pancasila memiliki makna yang terdalam, menunjukkan adanya sifat universal dan abstrak.
- 2) Inti dari nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia.
- 3) Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Sedangkan nilai-nilai Pancasila bersifat **subjektif** artinya keberadaan nilai-nilai Pancasila itu terlekat pada bangsa Indonesia sendiri karena:

- 1) Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia
- 2) Nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia
- 3) Nilai-nilai Pancasila mengandung nilai kerokhaniaan yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia.

Sebagai bangsa yang telah memiliki nilai asli dalam Pancasila, sudah selayaknya warga negara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam sikap dan perbuatannya. Apabila nilai-nilai asli ini terabaikan, maka secara otomatis kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sudah tidak kokoh lagi. Jika dasar negara tidak kokoh, maka keruntuhan

bangsa Indonesia hanya tinggal menghitung hari. Penjabaran dari nilai-nilai Pancasila tersebut adalah:

1) Ketuhanan Yang Maha Esa

- a) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- c) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- d) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- e) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
- f) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
- g) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.



Gambar 5.1 Perwujudan nilai Ketuhanan
(beribadah menurut ajaran agama & bekerja sama
antar umat beragama)

2)Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

- a) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
- c) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
- d) Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
- e) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
- f) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
- g) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
- h) Berani membela kebenaran dan keadilan.
- i) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
- j) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.



Gambar 5.2 Perwujudan nilai Kemanusiaan (tolong menolong & peduli pada orang lain yang membutuhkan bantuan)

3) Persatuan Indonesia

- a) Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- b) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
- c) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
- d) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.

- e) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- f) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
- g) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

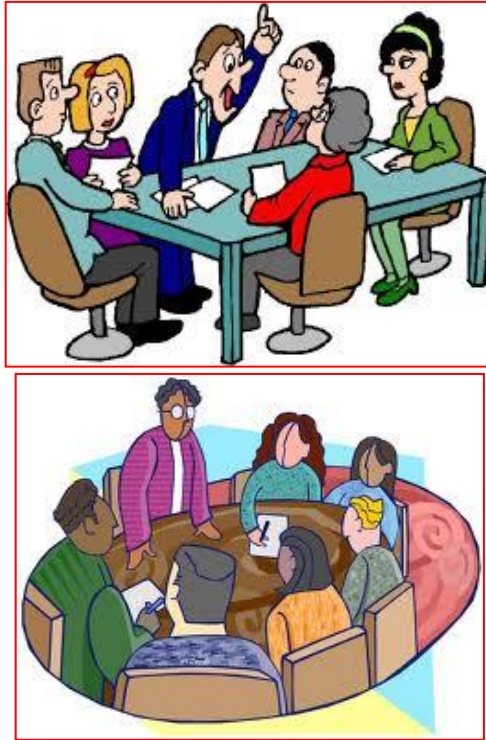


Gambar 5.3 Perwujudan nilai Persatuan (bela negara & cinta tanah air)

4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan

- a) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
- b) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.

- c) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
- d) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
- e) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
- f) Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
- g) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- h) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
- i) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.



Gambar 5.4 Perwujudan nilai Kerakyatan (menghargai pendapat orang lain & musyawarah mufakat)

5) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

- a) Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- b) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
- c) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- d) Menghormati hak orang lain.
- e) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.

- f) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
- g) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
- h) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
- i) Suka bekerja keras (Handika, 2013).



Gambar 5.5 Perwujudan nilai Keadilan (seimbang antara hak & hak kewajiban serta mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi)

c. Fungsi Nilai Bagi Kehidupan Warga Negara

Bagi manusia, nilai berfungsi sebagai landasan, alasan, atau motivasi dalam segala tingkah laku dan perbuatannya. Nilai mencerminkan kualitas pilihan tindakan dan pandangan hidup seseorang dalam

masyarakat. Nilai akan membentuk kepribadian dan kebiasaan sehingga ketika seseorang melakukannya kadang tidak melalui proses berpikir atau pertimbangan lagi (bawah sadar). Biasanya nilai demikian telah tersosialisasi dan terbentuk sejak kecil. Jika nilai ini tidak dilakukan, maka akan muncul rasa malu atau rasa bersalah.

Sumber-sumber dalam mengembangkan nilai adalah:

- 1) Agama, masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena itu, kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama dan kepercayaannya. Secara politis, kehidupan bernegara pun didasari pada nilai-nilai yang berasal dari agama.
- 2) Pancasila, Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan seni.
- 3) Budaya, tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat tanpa didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat itu. Nilai-nilai budaya itu dijadikan dasar dalam pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antar anggota masyarakat itu.
- 4) Tujuan Pendidikan Nasional, memuat berbagai nilai kemanusiaan yang harus dimiliki warga negara Indonesia (Hasan, 2010:8).

Ada tiga fungsi nilai dalam masyarakat, yaitu:

- 1) Sebagai Faktor Pendorong

Tinggi rendahnya individu dan satuan manusia dalam masyarakat bergantung pada tinggi rendahnya nilai-nilai yang menjiwai mereka. Apabila nilai-nilai dijunjung tinggi oleh sebagian besar masyarakat, maka harapan ke arah

kemajuan bangsa bisa terencana. Hal ini merupakan cita-cita untuk menjadi manusia yang berbudi luhur dan beradab.

2) Sebagai Petunjuk Arah

Nilai-nilai dalam masyarakat juga memberikan petunjuk bagi setiap warganya untuk menentukan pilihan terhadap jabatan dan peranan yang akan diambil. Misalnya, setiap pendatang baru harus dapat menyesuaikan diri dan menjunjung tinggi nilai-nilai masyarakat yang didatanginya agar tidak menyebabkan pandangan masyarakat menjadi kurang simpati terhadap dirinya. Dengan demikian, pendatang baru dapat menghindari hal yang dilarang atau tidak disenangi masyarakat dan mengikuti pola pikir serta pola tindakan yang diinginkan.

3) Sebagai Benteng Perlindungan

Pengertian benteng di sini berarti tempat yang kokoh karena nilai-nilai merupakan tempat perlindungan yang kuat dan aman terhadap rongrongan dari luar sehingga masyarakat akan senantiasa menjaga dan mempertahankan nilai sosialnya. Misalnya, nilai-nilai keagamaan dan nilai keadilan untuk membentengi diri dari nilai-nilai barat yang sekuler, individualis dan egoisme.

d. Karakter Warga Negara

1) Pengertian Karakter Warga Negara

Secara etimologis istilah karakter berasal dari bahasa Yunani *karasso* yang berarti cetak biru, format dasar, atau sidik seperti dalam sidik jari. Interpretasi atas istilah ini bermacam-macam. Ada dua cara interpretasi yaitu (1) karakter sebagai sekumpulan kondisi yang telah diberikan begitu saja, atau telah ada begitu saja dalam diri kita (karakter bawaan/*given character*) dan (2) karakter sebagai tingkat kekuatan melalui mana seorang individu mampu menguasai kondisi tersebut.

Karakter adalah sebuah proses yang dikehendaki/pembinaan melalui pendidikan (Mounier dalam Koesoema, 2010:90-91).

Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (*virtues*) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Kebajikan terdiri atas sejumlah nilai, moral, dan norma, seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya, dan hormat kepada orang lain. Interaksi seseorang dengan orang lain menumbuhkan karakter masyarakat dan karakter bangsa. Oleh karena itu, pengembangan karakter bangsa hanya dapat dilakukan melalui pengembangan karakter individu seseorang (Hasan, 2010:3).

Dalam mata pelajaran PPKn, karakter warga negara sering dikenal dengan istilah *civic disposition*, yaitu sifat-sifat yang harus dimiliki setiap warga negara untuk mendukung efektivitas partisipasi politik, berfungsinya sistem politik yang sehat, berkembangnya martabat, harga diri dan kepentingan umum (Cholisin, 2005: 8). Ada dua teori mengenai asal-mula karakter warga negara, yaitu:

- a) Teori pertama mengatakan bahwa karakter itu seperti gen kita, sudah dibawa sejak lahir, seperti warna rambut dan golongan darah. Artinya, kalau saat ini kita mempunyai sifat pemaarah itu karena kita sudah mempunyai sifat pemaarah sejak dilahirkan.
- b) Teori kedua mengatakan karakter itu dipengaruhi oleh lingkungan, di mana kalau lingkungan yang membentuk baik maka akan terlahirlah sebuah karakter yang baik tetapi kalau lingkungan yang membentuk jelek maka akan terlahirlah karakter yang jelek juga.

Seorang warga negara dituntut untuk memiliki karakter dan menerapkannya sesuai dengan perannya. Karakter tersebut adalah:

- a) Karakter individual, yaitu nilai-nilai unik dan baik yang terpatuh dalam diri dan mendarah daging dalam perilaku seseorang. Misalnya: jujur dan kerja keras.
- b) Karakter privat, seperti: tanggung jawab moral, disiplin diri, dan penghargaan terhadap harkat martabat manusia dari setiap individu.
- c) Karakter publik, seperti: kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main, berpikir kritis, kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi (Muhtadi, 2013).

2) Macam-Macam Karakter Warga Negara

Karakter yang baik berkaitan dengan mengetahui yang baik (*knowing the good*), mencintai yang baik (*loving the good*), dan melakukan yang baik (*acting the good*). Mengetahui yang baik berarti dapat memahami dan membedakan antara yang baik dan yang buruk. Mengetahui yang baik berarti mengembangkan kemampuan untuk menyimpulkan atau meringkas suatu keadaan, sengaja memilih sesuatu yang baik untuk dilakukan, dan kemudian melakukannya (*practical wisdom*).

Thomas Lickona memandang bahwa karakter warga negara meliputi beberapa aspek yang melibatkan pengetahuan (*moral knowing*), perasaan (*moral feeling*), dan tindakan (*moral action*).

a. *Moral Knowing*/ Pengetahuan Moral

- 1) *Moral awariness* (kesadaran moral), saat ini kesadaran moral merupakan kelemahan moral yang melanda hampir semua manusia dari segala jenis usia.

- 2) *Knowing moral values* (pengetahuan nilai-nilai moral), nilai-nilai moral seperti rasa hormat terhadap kehidupan dan kebebasan, tanggung jawab terhadap orang lain, kejujuran, keadilan, toleransi, sopan-santun, disiplin diri, integritas, kebaikan, dan keberanian secara keseluruhan menunjukkan sifat-sifat orang yang baik. Kesemuanya itu merupakan warisan dari generasi masa lalu bagi kehidupan masa depan.
- 3) *Perspective taking*, adalah kemampuan untuk mengambil pelajaran dari peristiwa yang menimpa atau terjadi pada orang lain, melihat suatu keadaan sebagaimana mereka melihatnya, mengimajinasikan bagaimana mereka berpikir, bereaksi, dan merasakannya.
- 4) *Moral reasoning* (alasan moral), meliputi pemahaman mengenai apa itu perbuatan moral dan mengapa harus melakukan perbuatan moral. Misalnya, mengapa penting untuk menepati janji? Mengapa harus melakukan yang terbaik?
- 5) *Decision making* (pengambilan keputusan), kemampuan seseorang untuk mengambil sikap ketika dihadapkan dengan problema adalah suatu keahlian yang bersifat reflektif. Apa yang dipilih dan apa akibat atau resiko dari pengambilan keputusan moral itu, bahkan harus sudah diajarkan sejak kecil.
- 6) *Self knowledge* (mengetahui diri sendiri), menjadi orang yang bermoral memerlukan kemampuan untuk melihat perilaku diri sendiri dan mengevaluasinya secara kritis.

b. Moral Feeling/ Perasaan Moral

- 1) *Conscience* (kesadaran), kesadaran memiliki dua sisi: sisi kognitif (pengetahuan tentang

- sesuatu yang benar), dan sisi emosional (perasaan adanya kewajiban untuk melakukan apa yang benar itu). Kesadaran yang matang, di samping adanya perasaan kewajiban moral, ada juga kemampuan mengonstruksikan kesalahan. Apabila seseorang dengan kesadarannya merasa berkewajiban untuk menunjukkan suatu perbuatan dengan cara tertentu, maka ia pun bisa menunjukkan cara untuk tidak melakukan perbuatan yang salah.
- 2) *Self esteem* (penghargaan diri), ketika kita memiliki ukuran yang sehat terhadap penghargaan diri, maka kita menilai diri kita sendiri. Ketika kita menilai diri kita sendiri, kita akan menghargai atau menghormati diri kita sendiri. Kita tidak akan menyalahgunakan anggota tubuh atau pikiran kita atau mengizinkan pihak-pihak untuk menyalahgunakan diri kita.
 - 3) *Empathy* (empati), adalah identifikasi dengan atau seakan-akan mengalami keadaan yang dialami pihak lain. Empati memungkinkan kita untuk memasuki perasaan yang dialami pihak lain.
 - 4) *Loving the good*, bentuk karakter yang paling tinggi diperlihatkan dalam kelakuan yang baik. Ketika seseorang mencintai yang baik, maka dengan senang hati ia akan melakukan yang baik.
 - 5) *Self-control*, diperlukan untuk kebaikan moral.
 - 6) *Humality* (kerendahan hati), merupakan kebajikan moral yang sering diabaikan, padahal merupakan bagian yang esensial dari karakter yang baik. Kerendahan hati merupakan sisi yang efektif dari pengetahuan

diri (*self knowledge*). Kerendahan hati dan pengetahuan diri merupakan sikap berterus terang bagi kebenaran dan keinginan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan.

3) **Moral Action (Tindakan Moral)**

Moral action (tindakan moral) dalam pengertian yang luas adalah akibat atau hasil dari *moral knowing* dan *moral feeling*. Apabila seseorang memiliki kualitas moral intelek dan emosi, kita bisa memperkirakan bahwa mereka akan melakukan apa yang mereka ketahui dan rasakan.

- a) Kompetensi (*competence*), adalah kemampuan untuk mengubah penilaian dan perasaan moral ke dalam tindakan moral yang efektif. Misalnya untuk memecahkan masalah konflik, diperlukan keahlian-keahlian praktis: mendengar, menyampaikan pandangan tanpa mencemarkan pihak lain, dan menyusun solusi yang dapat diterima masing-masing pihak.
- b) Kemauan (*will*), pilihan yang benar (tepat) akan suatu perilaku moral biasanya merupakan sesuatu yang sulit. Untuk menjadi dan melakukan sesuatu yang baik biasanya mensyaratkan adanya keinginan bertindak yang kuat. Kemauan merupakan inti (*core*) dari dorongan moral.
- c) Kebiasaan (*habit*), memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kebiasaan baik dan memberikan praktik yang cukup untuk menjadi orang baik (Sudrajat, 2013: 4-7).

Pendidikan adalah suatu upaya sadar untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Usaha sadar itu tidak boleh dilepaskan dari lingkungan peserta didik berada karena peserta didik hidup tidak terpisahkan dalam lingkungannya

dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam lingkungannya. Pendidikan berperan sebagai sarana enkulturasi yaitu mewariskan nilai-nilai dan karakter masyarakat ke generasi mendatang. Atribut dari suatu karakter adalah nilai itu sendiri. Nilai-nilai dan karakter itu merupakan kebanggaan bangsa dan menjadikan bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa-bangsa lain.

Tabel di bawah ini menggambarkan karakter yang harus dimiliki oleh warga negara.

No	Karakter Warga Negara	Deskripsi
1	Religius	Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
2	Jujur	Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
3	Toleransi	Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
4	Disiplin	Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
5	Kerja Keras	Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
6	Kreatif	Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
7	Mandiri	Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
8	Demokratis	Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan

No	Karakter Warga Negara	Deskripsi
		kewajiban dirinya dan orang lain.
9	Rasa ingin tahu	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar
10	Semangat kebangsaan	Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
11	Cinta tanah air	Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.
12	Menghargai prestasi	Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
13	Bersahabat/komunikatif	Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.
14	Cinta damai	Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.
15	Gemar membaca	Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
16	Peduli lingkungan	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
17	Peduli sosial	Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
18	Tanggung	Sikap dan perilaku seseorang untuk

No	Karakter Warga Negara	Deskripsi
	jawab	melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

(Sumber: Hasan, 2013:9-10).

f. Contoh Perwujudan Penanaman Karakter Warga Negara

1) Karakter Religius



Gambar 5.6 Membiasakan diri berdoa sebelum dan sesudah belajar

2) Karakter Cinta Tanah Air





Gambar 5.7. Melaksanakan upacara bendera & melestarikan kekayaan budaya daerah

3) Karakter Peduli Lingkungan



Gambar 5.8. Melakukan Penghijauan & Mendaur Ulang Sampah Plastik

4) Karakter Peduli Sosial



Gambar 5.9 Membantu korban bencana & peduli pada pendidikan anak

g. Upaya Membentuk Nilai dan Karakter Warga Negara

Upaya untuk membentuk nilai-nilai dan karakter warga negara sebenarnya dimulai sejak seorang anak lahir dalam keluarganya. Tetapi, dapat juga dibantu oleh saluran pendidikan formal maupun non-formal. Pada prinsipnya, pengembangan nilai dan karakter warga negara tidak dimasukkan sebagai pokok bahasan, tetapi terintegrasi ke dalam mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya sekolah. Prinsip pembelajaran mengusahakan agar peserta didik mengenal dan menerima nilai-nilai dan karakter bangsa sebagai milik mereka dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya melalui tahapan mengenal pilihan, menilai pilihan, menentukan

pendirian, dan selanjutnya menjadikan suatu nilai sesuai dengan keyakinan diri (Hasan, 2010:11).

Ada beberapa prinsip dalam mengembangkan nilai dan karakter bangsa, yaitu:

- 1) Berkelanjutan, mengandung makna bahwa proses pengembangan nilai-nilai dan karakter merupakan sebuah proses panjang, dimulai dari keluarga, awal peserta didik masuk sampai selesai dari suatu satuan pendidikan.
- 2) Melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya sekolah, mensyaratkan bahwa proses pengembangan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa dilakukan melalui setiap mata pelajaran, kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler.
- 3) Nilai tidak diajarkan tapi dikembangkan, mengandung makna bahwa materi nilai dan karakter bukanlah bahan ajar biasa, seperti halnya ketika mengajarkan suatu konsep, teori, prosedur, ataupun fakta.
- 4) Proses pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan, prinsip ini menyatakan bahwa proses pendidikan nilai dan karakter dilakukan oleh peserta didik, bukan oleh guru.

Perencanaan dan pelaksanaan pendidikan nilai dan karakter dilakukan oleh kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan (konselor) secara bersama-sama sebagai suatu komunitas pendidik dan diterapkan ke dalam kurikulum melalui hal-hal berikut ini:

- 1) Program pengembangan diri
 - a) Kegiatan rutin sekolah

Kegiatan rutin merupakan kegiatan yang dilakukan peserta didik secara terus-menerus dan konsisten setiap saat. Contoh kegiatan ini adalah upacara pada hari besar kenegaraan, pemeriksaan kebersihan badan (kuku, telinga, rambut, dan lain-lain) setiap hari Senin, beribadah bersama atau shalat bersama setiap

dhuhur (bagi yang beragama Islam), berdoa waktu mulai dan selesai pelajaran, mengucap salam bila bertemu guru, atau teman.

b) Kegiatan spontan

Kegiatan spontan yaitu kegiatan yang dilakukan secara spontan pada saat itu juga. Kegiatan ini dilakukan ketika terjadi perbuatan yang kurang baik dari peserta didik. Misalnya, mengingatkan teman yang membuang sampah tidak pada tempatnya dan melerai pertengkaran teman.

c) Keteladanan

Keteladanan adalah perilaku dan sikap dalam memberikan contoh terhadap tindakan-tindakan yang baik sehingga diharapkan menjadi panutan bagi peserta didik untuk mencontohnya. Misalnya, berpakaian rapi, datang tepat pada waktu, bekerja keras, bertutur kata sopan, kasih sayang, perhatian terhadap peserta didik, jujur, dan menjaga kebersihan.

d) Pengkondisian

Untuk mendukung keterlaksanaan pendidikan nilai dan karakter bangsa, maka sekolah harus dikondisikan sebagai pendukung kegiatan itu. Sekolah harus mencerminkan kehidupan nilai-nilai dan karakter yang diinginkan. Misalnya, toilet yang selalu bersih, bak sampah ada di berbagai tempat dan selalu dibersihkan, sekolah terlihat rapi dan alat belajar ditempatkan secara teratur.

2) Pengintegrasian dalam mata pelajaran

Pengembangan nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa diintegrasikan dalam setiap pokok bahasan dari setiap mata pelajaran. Nilai-nilai tersebut dicantumkan dalam silabus dan RPP.

3) Budaya sekolah

Budaya sekolah adalah suasana kehidupan sekolah tempat peserta didik berinteraksi dengan

sesamanya, guru dengan guru, konselor dengan sesama, pegawai administrasi dengan sesama, dan antar anggota kelompok masyarakat sekolah. Kepemimpinan, keteladanan, keramahan, toleransi, kerja keras, disiplin, kepedulian sosial, kepedulian lingkungan, rasa kebangsaan, dan tanggung jawab merupakan nilai-nilai dan karakter yang dikembangkan dalam budaya sekolah (Hasan, 2010:14-19).

D. Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut :

- 1) Uraikan kembali menurut pandangan dan pemikiran Anda mengenai pengertian nilai, norma, dan moral.
- 2) Terangkan secara sistimatis hubungan antara nilai, norma dan moral.
- 3) Jelaskan pentingnya pemilikan nilai dan moral serta kepatuhan terhadap norma bagi pembentukan warga negara yang baik (*a good citizenship*).

BAB VI

PENDIDIKAN IPS BERORIENTASI KARAKTER KEBANGSAAN

A. Petunjuk Belajar

Pada bab VI dalam buku ini, Anda diajak untuk mempelajari secara mendalam mengenai Pendidikan IPS dalam kaitannya dengan pembangunan karakter bangsa. Untuk itu pada bagian awal bab ini, Anda diminta untuk dapat memahami konsepsi karakter, dan lebih lanjut dapat merancang pendidikan IPS sebagai program pendidikan karakter.

Pendidikan karakter pada hakikatnya adalah pendidikan nilai yang melibatkan aspek pengetahuan (*cognitive*), perasaan (*feeling*), dan tindakan (*action*). Pendidikan nilai/moral yang menghasilkan karakter, didalamnya terkandung tiga komponen karakter yang baik (*components of good character*), yakni: pengetahuan tentang moral (*moral knowing*), perasaan tentang moral (*moral feeling*) dan perbuatan moral (*moral action*). Oleh karena itu, karakter yang baik berkaitan dengan: mengetahui dengan baik (*knowing the good*), mencintai dengan baik (*loving the good*), dan melakukan yang baik (*acting the good*). Mengetahui yang baik berarti dapat memahami dan membedakan antara yang baik dan yang buruk. Mengetahui yang baik berarti mengembangkan kemampuan untuk menyimpulkan suatu keadaan, dan dengan sengaja memilih sesuatu yang baik untuk dilakukan, dan kemudian melakukannya (*practical wisdom*). Artinya, karakter warga negara yang baik meliputi beberapa aspek yang melibatkan pengetahuan (*moral knowing*), perasaan (*moral feeling*), dan tindakan (*moral action*). Dengan demikian esensi dari pendidikan IPS sebagai pembangunan karakter bangsa dalam bab ini, diharapkan dapat

mendukung terhadap pencapaian karakter warga negara yang baik.

B. Kompetensi

Setelah Anda selesai mempelajari bab VI ini diharapkan Anda dapat menjelaskan tentang:

- 1) Hakikat Pendidikan Karakter.
- 2) Tujuan Pendidikan Budaya dan Karakter.
- 3) Posisi Pendidikan IPS dalam Pembangunan Karakter.
- 4) Pendidikan IPS sebagai Wahana Program Sistemik Pembangunan Karakter Bangsa.
- 5) Pembangunan Karakter dalam Pembelajaran IPS.
- 6) Desain Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran.
- 7) Ilmu Pengetahuan Sosial.

Pemahaman secara komprehensif terhadap enam materi di atas, menjadi syarat bagi Anda dalam memenuhi kompetensi yang ke enam, yakni pemilikan kompetensi berkenaan dengan materi Pendidikan IPS dalam pembangunan karakter bangsa.

C. Konten

1. Hakikat Pendidikan Karakter

Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan akibat dari keputusan yang dibuatnya (Suyatno, 2009). Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti yang melibatkan aspek pengetahuan (*cognitive*), perasaan (*feeling*), dan tindakan (*action*). Menurut Thomas Lickona, tanpa ketiga aspek ini, pendidikan karakter tidak akan efektif. Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, peserta didik akan memiliki kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi ini adalah bekal penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa

depan, karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis (Suyatno, 2009).

Untuk memenuhi keberhasilan akademis yang dimaksud, Pusat Pengembangan Kurikulum (PUSKUR) telah mengembangkan konsep pendidikan budaya dan karakter bangsa dan menuangkannya dalam suatu dokumen resmi yang berjudul "Pedoman Pengembangan Budaya dan Karakter Bangsa di Sekolah". Dalam dokumen tersebut "budaya diartikan sebagai keseluruhan sistem berpikir, nilai, moral, norma dan keyakinan (*belief*) manusia yang dihasilkan masyarakat. Sistem berpikir, nilai, moral, norma dan keyakinan itu adalah hasil dari interaksi manusia dengan sesamanya dan lingkungan alamnya". Sedangkan karakter dimaknai sebagai "watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (*virtues*) yang diyakininya dan digunakannya sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Kebajikan terdiri atas sejumlah nilai, moral, dan norma seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya, hormat kepada orang lain, dan sebagainya. Interaksi seseorang dengan orang lain menumbuhkan karakter masyarakat dan karakter bangsa. Berdasarkan kedua pengertian tersebut dan pengertian pendidikan yang dinyatakan dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maka "pendidikan budaya dan karakter bangsa diartikan sebagai proses internalisasi serta penghayatan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang dilakukan peserta didik secara aktif di bawah bimbingan guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan serta diwujudkan dalam kehidupannya di kelas, sekolah, dan masyarakat".

2. Tujuan Pendidikan Budaya dan Karakter

Selanjutnya di dalam dokumen tersebut juga dirumuskan tujuan pendidikan budaya dan karakter bangsa yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Mengembangkan potensi afektif peserta didik sebagai manusia dan warganegara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa
- b. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius
- c. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggungjawab peserta didik sebagai penerus bangsa
- d. Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan
- e. Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan (*dignity*) (puskur, 2010).

Bila ditilik kandungan isi dari tujuan di atas, pendidikan budaya dan karakter bukan berbobot pada *transfer of knowledge* tetapi lebih memiliki kedudukan sebagai *transfer of values*. Nilai-nilai dalam Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa dikembangkan dengan bersumber pada:

- a. *Agama*: masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena itu kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama. Secara politis kehidupan kenegaraan pun didasari pada nilai-nilai yang berasal dari agama. Atas dasar pertimbangan itu, maka nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa harus didasarkan pada nilai-nilai dan kaidah yang berasal dari agama.
- b. *Pancasila*: negara Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Pancasila terdapat pada

Pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945 tersebut. Artinya, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi dan kemasyarakatan diatur dalam pasal-pasal UUD 1945. Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan dan kemauan, dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupannya sebagai warga negara.

- c. *Budaya*, adalah suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat tersebut. Nilai-nilai budaya tersebut dijadikan dasar dalam memberi makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antaranggota masyarakat tersebut. Posisi budaya yang demikian penting dalam kehidupan masyarakat mengharuskan budaya menjadi sumber nilai-nilai dari pendidikan budaya dan karakter bangsa.
- d. *Tujuan Pendidikan Nasional*; tujuan pendidikan nasional adalah kualitas yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia, dikembangkan oleh berbagai satuan pendidikan di berbagai jenjang dan jalur. Di dalam tujuan pendidikan nasional terdapat berbagai nilai kemanusiaan yang harus dimiliki seorang warga negara Indonesia. Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional adalah sumber yang paling operasional dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa dibandingkan ketiga sumber yang disebutkan di atas.

3. Posisi Pendidikan IPS Dalam Pembangunan Karakter

Bagaimana posisi dan peran pendidikan IPS dalam pengembangan pendidikan karakter seperti diamankan

tujuan pendidikan nasional? Di Indonesia, IPS merupakan kajian yang menunjuk pada ujud keterpaduan dari pembelajaran ilmu-ilmu sosial (*integrated sosial sciences*) (lih. Zamroni, 2010: 7). Jadi sifat keterpaduan ini menjadi ciri pokok mata kajian yang disebut IPS. Oleh karena itu, S. Hamid Hasan (2010: 1) menegaskan bahwa IPS adalah studi integratif tentang kehidupan manusia dalam berbagai dimensi ruang dan waktu dengan segala aktivitasnya. Sementara itu kalau mengacu pada kajian *Sosial Studies, National Council for Sosial Studies* (NCSS) dijelaskan bahwa: "*Sosial studies are the integrated study of the sosial sciences and humanities to promote civic competence. Within the school program, sosial studies provides coordinated, systematic study drawing upon such disciplines as anthropology, archaeology, economics, geography, history, law, philosophy, political science, psychology, religion, and sociology, as well as appropriate content from the humanities, mathematics, and the natural sciences. The primary purpose of sosial studies is to help young people develop the ability to make informed and reasoned decisions for the public good as citizens of a culturally diverse, democratic society in an interdependent world*" (1994:3).

Hakikat IPS dalam pengertian yang terpadu inilah yang diajarkan di tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP). Dengan pengertian itu menunjukkan bahwa IPS sebenarnya merupakan pelajaran yang cukup komprehensif yang dapat menjadi salah satu instrument untuk ikut memecahkan masalah-masalah sosio-kebangsaan di Indonesia. Kalau demikian apa tujuan pembelajaran IPS itu? Tujuan pembelajaran IPS, secara umum dapat dirumuskan antara lain untuk mengantarkan, membimbing dan mengembangkan potensi peserta didik agar : (1) menjadi warga negara (dan juga warga dunia) yang baik; (2) mengembangkan pemahaman mengenai pengetahuan dasar kemasya-

rakatan, (3) mengembangkan kemampuan berpikir kritis dengan penuh kearifan dan keterampilan inkuiri untuk dapat memahami, menyikapi, dan mengambil langkah-langkah untuk ikut memecahkan masalah sosial kebangsaan, (4) membangun komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan menghargai serta ikut mengembangkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan budaya Indonesia, dan (5) mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dalam kehidupan masyarakat yang majemuk, baik lokal, regional maupun internasional.

Memahami uraian tentang pengertian dan tujuan pembelajaran IPS di atas, nampaknya sangat erat kaitannya dengan pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang dapat dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan moral atau pendidikan budi pekerti itu, memiliki arah dan tujuan yang sama dengan tujuan pembelajaran IPS, yakni sama-sama bertujuan agar peserta didik dan warga belajar pada umumnya menjadi warga negara yang baik. Bahkan secara tegas Gross menyatakan bahwa *Values Education as sosial studies "to prepare students to be well-functioning citizens in democratic society"* (dikutip dari Hamid Darmadi, 2007: 8). Dalam konteks tujuannya, keduanya memiliki banyak persamaan. Pembelajaran IPS diarahkan untuk menjadikan warga negara yang baik, melahirkan pelaku-pelaku sosial yang cerdas, arif dan bermoral. Dalam konteks pendidikan karakter, para peserta didik dengan potensi yang dimilikinya, difasilitasi untuk mengembangkan perilaku jujur, bertanggung jawab, santun, kasih sayang dan saling menghormati, berlatih berpikir kritis dan kreatif, percaya diri dan membangun kemandirian; memiliki semangat kebangsaan, dan bangga terhadap hasil karya budaya bangsa sendiri. Thomas Lickona (2000:48) menyebutkan beberapa nilai kebaikan yang perlu dihayati dan dibiasakan dalam kehidupan peserta didik agar tercipta kehidupan yang

harmonis di lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat. Beberapa nilai itu antara lain: kejujuran, kasih sayang, pengendalian diri, saling menghargai, kerjasama, tanggung jawab. Terkait dengan ini, maka dalam pengembangan pendidikan karakter di sekolah, guru harus juga bekerja sama dengan keluarga atau orang tua/wali peserta didik. Bahkan menurut Cletus R. Bulach (2002:80), orang tua dan guru perlu membuat kesepakatan tentang nilai-nilai utama apa yang perlu dibelajarkan misalnya: *respect for self, others, and property; honesty; self-control/discipline*.

Uraian tersebut, menunjukkan begitu eratnya anatara makna pembelajaran dan pendidikan IPS dengan tujuangn pengembangan pendidikan karakter. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa apabila pembelajaran IPS itu dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan pembelajaran IPS yang sebenarnya, maka proses pembelajaran itu secara tidak langsung merupakan proses pendidikan karakter. Pembelajaran IPS dapat berperan sebagai pendidikan nilai atau pendidikan karakter, karena dalam pembelajaran IPS juga membelajarkan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai keindonesiaan.

Pembelajaran IPS juga dapat menjadi kerangka untuk memantapkan rekayasa sosial dalam pendidikan karakter. Bagaimana dalam proses pendidikan dan pembelajaran itu diarahkan agar peserta didik menjadi warga negara yang baik, dilatih untuk memahami aspek-aspek kehidupan bermasyarakat dan berbangsa atas dasar nilai dan moralitas, memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Semuanya ini jelas terkait dengan pendidikan karakter bangsa.

Agar pembelajaran IPS itu dapat berperan dan menjadi instrumen penting bagi pengembangan pendidikan karakter, maka perlu dilakukan pembenahan-pembenahan mendasar oleh para pelaku pendidikan dan institusi yang mengelola pendidikan IPS. Program

pendidikan IPS harus menempatkan UU Sisdiknas terutama pasal 3 tentang tujuan pendidikan nasional sebagai rujukan utama dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional secara utuh. Penyelenggaraan pendidikan selama ini telah kehilangan ruh dan aspek moralitas, sehingga tidak jarang melahirkan kultur yang tidak sehat. Muncullah perilaku ketidakjujuran dalam pendidikan, seperti yang terjadi kasus pada UN, ijazah palsu, perjokian, plagiat, lemahnya internalisasi nilai kebaikan dan terfragmentasikannya ranah-ranah pendidikan yang lebih didominasi ranah kognitif (ALPTKI, 2009:2).

Proses pembelajaran IPS, harus dibangun sebagai sebuah proses transaksi kultural yang harus mengembangkan karakter sebagai bagian tak terpisahkan dari pengembangan IPTEKS pada umumnya. Pelaksanaan pendidikan IPS saat ini yang lebih didominasi oleh praktik pendidikan di tingkat individual yang cenderung kognitif-intelektualistik, perlu diarahkan kembali sebagai wahana pembelajaran masyarakat, wahana pengembangan pendidikan karakter bangsa, sebagai proses pembangunan kecerdasan, akhlak dan kepribadian warga belajar secara utuh sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Dalam mendesain kurikulum pendidikan IPS, termasuk dalam proses pembelajarannya, harus juga berangkat dari hakikat dan karakter peserta didik, bukan berorientasi pada materi semata (Wayan Lasmawan, 2010:2). Pendekatan esensialisme sudah saatnya untuk dimodifikasi dengan teori rekonstruksi sosial yang mengacu pada teori pendidikan interaksional (Nana Syaodih Sukmadinata, 1996: 6). Sesuai dengan tuntutan zaman dan perkembangan kehidupan masyarakat, pembelajaran IPS harus dikembalikan sesuai dengan khittah konseptualnya yang bersifat terpadu yang menekankan pada interdisipliner dan trasdisipliner, dengan pembelajaran yang kontekstual dan

transformatif, aktif dan partisipatif dalam perpektif nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Sesuai dengan maksud dan tujuannya, pembelajaran IPS harus memfokuskan perannya pada upaya mengembangkan pendidikan untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat dan lingkungannya secara bermartabat.

4. Pendidikan IPS Sebagai Program Pembangunan Karakter Bangsa

Edgar B. Wesley, mengemukakan tentang batasan Pendidikan IPS sebagai "program pendidikan yang memilih bahan pendidikan dari disiplin ilmu ilmu sosial dan *humanities* yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan" (Hertzberg, 1981). Sumbangan pendidikan IPS untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia di masa depan di antaranya ialah ikut meningkatkan mutu manusia Indonesia agar mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap cita-cita luhur bangsa, memiliki ketrampilan memecahkan masalah sosial secara tepat dan bertanggung jawab, mampu menyesuaikan diri terhadap tuntutan berbagai pekerjaan, mensenafaskan keimanan, ketaqwaan dan kebudayaan, serta menjadikan dialog kreatif sebagai praktek komunikasi dalam kelas dan sebagai persiapan untuk menyongsong budaya demokratis dalam masyarakat Indonesia. Dari sisi paedagogis, pendidikan IPS diperlukan untuk membangun dan membentuk karakter atau tradisi nilai yang baik pada anak karena misi yang diemban untuk dapat mensesuaikan antara apa yang diajarkan di sekolah dan kesesuaiannya dengan situasi masyarakat. Perlunya kesesuaian antara kajian akademis dengan masalah-masalah sosial di sekolah dan dengan keadaan masyarakat secara menyeluruh. Lewat kajian isi pembelajaran dalam Pendidikan IPS diharapkan siswa belajar menjadi anggota masyarakat yang baik, memahami hak-hak dan kewajibannya, terutama dalam

kehidupan sehari-hari di masyarakat sekitar, sadar akan situasi hidupnya di sekitar orang banyak, memiliki kepedulian sosial yang tinggi, dapat melakukan kerjasama dan gotong royong dengan sesama. Untuk itu dalam pembelajaran Pendidikan IPS perlu dilakukan secara multi dan interdisiplin. Sebagaimana dikemukakan di depan, kita menghadapi tiga kondisi yang memunculkan masalah karakter bangsa. Salah satu pilar penting untuk meretas jalan atas kebuntuan penyelesaian masalah karakter bangsa adalah lewat pendidikan, khususnya Pendidikan IPS.

Pendidikan IPS yang diintroduksi lewat proses pembelajaran di sekolah akan dapat memperkuat basic karakter anak. Karakter atau tradisi nilai seseorang tentu bukan hanya sebagai hasil pewarisan genetika, tetapi lebih merupakan hasil dari proses budaya dan pendidikan yang berlangsung di keluarga, masyarakat, dan sekolah. Ketiga lembaga tersebut (keluarga, masyarakat, dan sekolah) mempunyai peran yang sangat besar dalam membentuk perilaku seseorang. Melalui pendidikan keluarga, anak dikenalkan nilai-nilai yang diyakini dan dijunjung tinggi oleh keluarga. Sedangkan di sekolah anak seharusnya dikenalkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, karena salah satu fungsi pendidikan sekolah adalah sebagai jembatan antara keluarga dan masyarakat, sehingga pada saatnya mereka bisa hidup bersama secara damai.

Beberapa strategi dalam pembangunan karakter atau tradisi nilai tersebut antara lain: (1) mengambil keteladanan orang tua, (2) di sekolah dengan mengambil keteladanan model perilaku dari guru, (3) intervensi (pembelajaran) dan habituasi (pembiasaan) secara terintegrasi dengan mata pelajaran (baik secara intra maupun inter disiplin ilmu), (4) penguatan dan penghargaan (motivasi), (5) membangun iklim (budaya) sekolah yang baik dan kondusif, (6) kegiatan ko - kurikuler dan ekstrakurikuler yang mendukung

penanaman tradisi nilai yang baik. Sesungguhnya dalam rumusan pendidikan nasional sudah cukup terjabar dengan baik tentang karakter yang perlu dimiliki anak. Di antara rumusan tersebut adalah bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Di samping itu secara historis sesungguhnya Ki Hajar Dewantara sendiri sudah tegas merumuskan tentang pendidikan karakter seperti dikemukakannya, bahwa: pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (*intellect*) dan tubuh anak. Bagianbagian itu tidak boleh dipisahkan, agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita. Antara moral dan karakter keduanya tidak bisa dipisahkan.

Pada akhirnya dengan pembelajaran Pendidikan IPS diharapkan tercapai beberapa tujuan, baik pada ranah individu (anak) maupun masyarakat dengan tradisi nilai yang baik. Secara individual akan terbentuk perilaku jujur, bertanggung-jawab, cerdas, sehat dan bersih, peduli dan kreatif secara konsisten dalam berbagai konteks (salah satu bentuknya adalah pribadi yang anti korupsi) Sedangkan pada tingkat masyarakat, bangsa, dan negara akan terbentuk kesadaran nasional sebagai bangsa yang berjiwa dan berkepribadian luhur, terdapatnya keteladanan dari tokoh-tokoh tingkat sekolah, daerah, maupun nasional, terciptanya situasi masyarakat dalam berbagai lapisan yang semakin damai dan tenteram, serta terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang adil dan makmur.

5. Pembangunan Karakter Dalam Pembelajaran IPS

Pembangunan karakter bangsa yang sudah diupayakan dengan berbagai bentuk, hingga saat ini belum terlaksana dengan optimal. Hal itu tercermin dari semakin meningkatnya kriminalitas, pelanggaran hak asasi manusia, ketidakadilan hukum, kerusakan lingkungan yang terjadi di berbagai pelosok negeri, pergaulan bebas, pornografi dan pornoaksi, tawuran yang terjadi di kalangan remaja, kekerasan dan kerusuhan, serta korupsi yang kian merambah pada semua sektor kehidupan. Masyarakat Indonesia yang terbiasa dengan kesantunan dalam berperilaku, musyawarah-mufakat dalam menyelesaikan masalah, kearifan lokal yang kaya dengan pluralitas, sikap toleran dan gotong royong, mulai cenderung berubah menjadi hegemoni kelompok-kelompok yang saling mengalahkan dan berperilaku egois individual. Gambaran fenomena tersebut, menunjukkan bangsa ini tengah mengalami krisis moral yang menegaskan terjadinya ketidakpastian jati diri dan karakter bangsa.

Memperhatikan situasi dan kondisi karakter bangsa paska-reformasi yang dinilai sudah memprihatinkan, seyogyanya seluruh komponen bangsa sepakat untuk menempatkan pembangunan karakter bangsa (*nation and character building*) sebagai prioritas yang utama. Ini berarti setiap upaya pembangunan harus selalu dipikirkan keterkaitan dan dampaknya terhadap pengembangan karakter bangsa. Pemerintah reformasi memang telah merumuskan misi pembangunan nasional yang memosisikan pendidikan karakter sebagai misi pertama dari delapan misi guna mewujudkan visi pembangunan nasional. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2007), yakni; terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan Pancasila, yang dicirikan dengan watak dan

perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotongroyong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, dan berorientasi ipteks (Kemko Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, 2010). Pembangunan karakter bangsa memiliki urgensi yang sangat luas dan bersifat multidimensional. Sangat luas karena terkait dengan pengembangan multiaspek potensi-potensi keunggulan bangsa, dan bersifat multidimensional karena mencakup dimensi-dimensi kebangsaan yang hingga saat ini sedang dalam proses "menjadi". Urgensi pembangunan karakter dengan sifatnya yang demikian, mensyaratkan karakter sebagai: (1) perekat fondasi bangunan kehidupan berbangsa dan bernegara; (2) "kemudi" dalam mencapai cita-cita dan tujuan hidup bersama; dan (3) kekuatan esensial dalam membangun karakter bangsa yang bermartabat.

Namun, pembangunan karakter bangsa bukanlah urusan sepihak yang datang dari atas. Gerakan pembangunan karakter bangsa harus mendapat dukungan seluruh komponen pada akar bawah. Krisis moral yang tengah melanda bangsa ini, mensyaratkan untuk segera dilakukannya *rediscovery* nilai-nilai luhur budaya bangsa atau revitalisasi atau semacam *invented tradition* (Hobsbawm, 1983: 1) melalui gerakan nasional yang melibatkan seluruh komponen sebagai konsensus yang lahir dari kesadaran nasional.

Pembangunan karakter bangsa harus diaktualisasikan secara nyata dalam bentuk aksi nasional dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa sebagai upaya untuk menjaga jati diri bangsa dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam naungan NKRI. Pembangunan karakter bangsa harus dilakukan melalui pendekatan sistematis, integratif dan berkelanjutan. Strategi pembangunan karakter dapat dilakukan melalui sosialisasi, enkulturasi dan internalisasi melalui berbagai institusi dengan

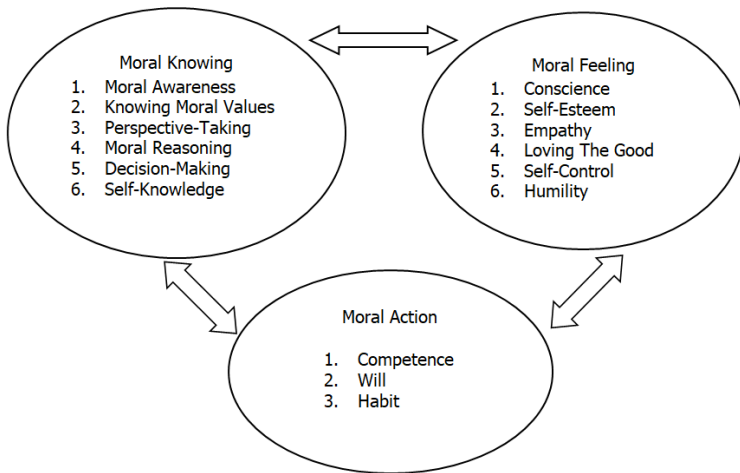
memperhatikan kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat serta pendekatan multidisiplin yang tidak menekankan pada indoktrinasi.

Tanpa bermaksud mengucilkan arti institusi yang lain, pendidikan sebagai institusi masih dinilai layak sebagai wahana sistemik dalam membangun karakter anak bangsa. Namun sayang, puluhan tahun kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan (baca: pendidikan formal) sebagai wahana sistemik pembangunan karakter belum memberikan luaran optimal terhadap pembentukan karakter peserta didik. Hal ini diduga pendidikan saat ini lebih cenderung mementingkan capaian kompetensi akademik ketimbang capaian kompetensi karakter. Untuk itu usulan adanya pendidikan karakter yang teraktualisasikan secara integralistik sebagai wahana sistemik pengembangan kecerdasan moral (*building moral intelligence*) perlu mendapat dukungan berbagai pihak dalam menghasilkan luaran peserta didik yang memiliki kompetensi kecerdasan plus moral. Tetapi fakta di lapangan menunjukkan dominasi pembelajaran konvensional dalam proses pembelajaran di kelas, masih menjadi indikator kuat sebagai penghalang teraktualisasikannya pengembangan kecerdasan moral peserta didik. Pembelajaran konvensional dengan ciri: (1) pendekatan *teacher centered*; (2) dominasi ekspositori; (3) pembelajaran berorientasi tekstual; (4) evaluasi berorientasi pada kognitif tingkat rendah; dan (5) posisi guru sebagai *transfer of knowledge* (Setiawan, 2012), dari berbagai hasil kajian dan penelitian belum secara optimal memberikan kontribusi terhadap pengembangan kecerdasan moral peserta didik. Bahkan, pembelajaran dalam dunia pendidikan yang masih didominasi oleh *transfer of knowledge* sebagai akibat tumbuhnya budaya verbalistik (Sanusi, 1993), menjadi penyebab implementasi pembelajaran dalam dunia pendidikan cenderung lebih memprioritaskan kompetensi akademik. Menghadapi fakta di atas, pendidikan formal sebagai institusi pengemban pendidikan karakter secara

mikro perlu melakukan pembenahan diri. Pertama, mendesain peran pendidikan karakter dengan pola integralistik dalam mengembangkan kecerdasan moral sebagai upaya pengkondisian moral (*moral conditioning*). Kedua, mengembangkan pembelajaran inovatif dalam pendidikan karakter sebagai upaya aplikatif dalam melatih moral (*moral training*). Pembenahan ini merupakan upaya kreatif sekolah, yang sadar akan perannya sebagai wadah sistemik pembentukan karakter dalam mengembangkan nilai-nilai moral terhadap peserta didik. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh (Halstead dan Taylor, 2000: 169) bahwa: "*to build on and supplement the values children have already begun to develop by offering further exposure to a range of values that are current in society (such as equal opportunities and respect for diversity); and to help children to reflect on, make sense of and apply their own developing values*".

6. Desain Pendidikan Karakter Berbasis Kecerdasan Moral dalam Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial

Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan akibat dari keputusan yang dibuatnya (Suyatno, 2009). Pendidikan karakter pada hakikatnya adalah pendidikan nilai (Kirschenbaum, 2000; Goleman, 2001) yang melibatkan aspek pengetahuan (*cognitive*), perasaan (*feeling*), dan tindakan (*action*). Menurut pandangan Lickona (1992), pendidikan nilai/moral yang menghasilkan karakter, didalamnya terkandung tiga komponen karakter yang baik (*components of good character*), yakni: pengetahuan tentang moral (*moral knowing*), perasaan tentang moral (*moral feeling*) dan perbuatan moral (*moral action*) sebagaimana tergambar berikut ini:



Sumber: Lickona (1991)

Ketiga komponen ini di atas, dalam aplikasi pendidikan karakter harus terbangun secara terkait. *Moral knowing* yang meliputi: kesadaran moral, pengetahuan nilai-moral, pandangan ke depan, penalaran moral, pengambilan keputusan dan pengetahuan diri, adalah hal esensial yang perlu diajarkan kepada peserta didik. Namun, pendidikan karakter sebatas *moral knowing* tidaklah cukup. Untuk itu perlu berlanjut sampai pada *moral feeling* yang meliputi: kata hati, rasa percaya diri, empati, cinta kebaikan, pengendalian diri dan kerendahan hati. Bahkan terus berlanjut pada tahap yang paling penting yakni *moral action*. Disebut penting karena pada tahap ini motif dorongan seseorang untuk berbuat baik, nampak pada aspek kompetensi, keinginan dan kebiasaan yang ditampilkannya. Ketersusunan tiga komponen moral yang saling berhubungan secara sinergis, menjadi syarat aktualisasi pendidikan karakter dalam mengembangkan kecerdasan moral peserta didik. Kecerdasan moral (*moral intelligence*) adalah kemampuan memahami hal yang benar dan yang salah dengan keyakinan etika yang kuat dan bertindak berdasarkan keyakinannya tersebut

dengan sikap yang benar serta perilaku yang terhormat (Borba, 2008: 4). Pendidikan karakter berbasis kecerdasan moral menjadi sesuatu yang urgen, karena kecerdasan moral terbangun dari beberapa kebajikan utama yang kelak akan membantu peserta didik dalam menyikapi dan menghadapi tantangan hidup yang penuh dengan kontradiktif. Lebih lanjut, Borba (2008: 7) menguraikan tujuh kebajikan utama yang perlu dimiliki peserta didik dalam mengembangkan kecerdasan moral, yakni: empati, hati nurani, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan hati, toleransi, dan keadilan.

Dengan desain pendidikan karakter berbasis kecerdasan moral yang diaktualisasikan secara sistematis dan berkelanjutan, peserta didik akan memiliki sejumlah kebajikan utama yang berguna bagi dirinya dalam menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. Dengan demikian, pendidikan karakter berbasis kecerdasan moral merupakan upaya pengembangan kemampuan peserta didik yang berorientasi pada pemilikan kompetensi kecerdasan plus karakter.

Agar pendidikan karakter berbasis kecerdasan moral dapat terlaksana secara efektif, maka perlu didesain pengkondisian moral (*moral conditioning*) sebagai tahap awal implementasi. Menurut Lickona (1991:187-189; 220-221), ada sebelas prinsip agar pendidikan karakter dapat terlaksana secara efektif: (1) mengembangkan nilai-nilai universal sebagai fondasi; (2) mendefinisikan karakter secara komprehensif yang mencakup aspek pikiran, perasaan dan perilaku; (3) menggunakan pendekatan yang komprehensif dan proaktif; (4) menciptakan komunitas sekolah yang penuh perhatian; (5) memberi kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan tindakan moral; (6) membuat kurikulum akademik yang bermakna; (7) mendorong motivasi peserta didik; (8) melibatkan seluruh komponen sekolah sebagai komunitas pembelajaran moral; (9)

menumbuhkan kebersamaan dalam kepemimpinan moral; (10) melibatkan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra; dan (11) mengevaluasi karakter sekolah baik terhadap staf sekolah sebagai pendidik karakter maupun peserta didik dalam memmanifestasikan karakter yang baik.

Desain pengkondisian moral di atas, pada konteks mikro mensyaratkan pendidikan karakter di sekolah dapat diaktualisasikan melalui empat pilar, yakni: (1) kegiatan belajar mengajar di kelas, dengan mengimplementasikan pendidikan karakter yang menggunakan pendekatan terintegrasi dalam semua mata pelajaran (*embedded approach*); (2) kegiatan keseharian dalam bentuk penciptaan budaya sekolah (*school culture*); (3) kegiatan ko kurikuler dan atau ekstrakurikuler; dan (4) kegiatan keseharian di rumah dan dalam masyarakat (Katresna72, 2010: 9). Dari desain ini, menunjukkan bahwa dalam pendidikan karakter mengharuskan adanya tiga basis desain dalam pemrogramannya yang terbagi menjadi: (1) desain pendidikan karakter berbasis kelas. Desain ini berbasis pada relasi guru sebagai pendidik dan peserta didik sebagai pembelajar di dalam kelas. Konteks pendidikan karakter adalah proses relasional komunitas kelas dalam konteks pembelajaran; (2) desain pendidikan karakter berbasis kultur sekolah. Desain ini mencoba membangun kultur sekolah yang mampu membentuk karakter peserta didik dengan bantuan pranata sosial sekolah agar nilai tertentu terbentuk dan terbatinkan dalam diri peserta didik; dan (3) desain pendidikan karakter berbasis komunitas. Dalam mendidik, komunitas sekolah tidak berjuang sendirian. Masyarakat di luar lembaga pendidikan, seperti keluarga, masyarakat umum, dan negara, juga memiliki tanggung jawab moral untuk mengintegrasikan pembentukan karakter dalam konteks kehidupan peserta didik.

Pendidikan karakter hanya akan bisa efektif jika tiga desain pendidikan karakter ini dilaksanakan secara

simultan dan sinergis. Melalui desain seperti ini, diharapkan pendidikan karakter dapat berperan dalam mengembangkan kecerdasan moral secara komprehensif dan berkelanjutan.

a. *Moral Training* sebagai Strategi Mengembangkan Kecerdasan Moral

Pengkondisian moral sebagai tahap awal implementasi pendidikan karakter pada konteks mikro, perlu dilanjutkan ke tahap latihan moral (*moral training*). Namun pengkondisian moral dalam pendidikan karakter belum sempurna, manakala desain pendidikan karakter berbasis kelas masih didominasi pembelajaran konvensional. Artinya, sebaik apapun pengkondisian moral dirancang dalam rangka mengimplementasikan pendidikan karakter berbasis kecerdasan moral, tidak akan efektif jika kegiatan belajar-mengajar di kelas guru masih menampilkan ciri: *teacher centered*, dominasi ekspositori, berorientasi tekstual, berorientasi pada kognitif tingkat rendah dan *transfer of knowledge*. Desain *moral training* dalam mengembangkan kecerdasan moral, menuntut bergesernya pembelajaran konvensional ke arah pembelajaran inovatif. Mengapa demikian? Karena pendidikan karakter dengan pola pembelajaran konvensional, hanya akan mengajarkan pendidikan moral sebatas tekstual semata dan kurang mempersiapkan peserta didik untuk menyikapi kehidupan yang kontradiktif (Zubaedi, 2011: 2). Untuk itu, sekolah sebagai salah satu pengemban pendidikan karakter sudah saatnya berbenah secara kreatif mengembangkan pembelajaran inovatif. Pergeseran pembelajaran konvensional ke arah pola pembelajaran inovatif menjadi syarat dalam pendidikan karakter untuk dapat mengembangkan kecerdasan moral secara efektif. Pergeseran yang dimaksud, dapat ditampilkan seperti pada tabel berikut:

Pembelajaran Konvensional	Pembelajaran Inovatif
Pendekatan <i>Teacher Centered</i>	Pendekatan <i>Student Centered</i>
Dominasi Ekspositori	Multi model dan metode
Minim media	Multimedia
<i>Textbook Center</i>	Multi sumber belajar
Pembelajaran Verbalistik	Pembelajaran Konstektual
Evaluasi dominasi kognitif tingkat rendah (C1, C2)	Evaluasi: Kognitif, Afektif dan Psikomotor
Posisi guru sebagai <i>transfer of knowledge</i>	Posisi guru sebagai <i>director of learning</i>

Sumber: Setiawan (2012)

Pembelajaran inovatif dalam pendidikan karakter, dirancang untuk menghasilkan kegiatan belajar-mengajar yang lebih efektif dan bermakna. Pembelajaran inovatif menjadi kondisi kondusif dalam melatih moral untuk mengembangkan kecerdasan moral peserta didik. *Moral training* merupakan bagian strategi pengembangan kecerdasan moral yang penting. Melalui *moral training*, pendidikan karakter tidak terhenti sebatas *moral knowing* tetapi berlanjut pada tahap *moral feeling* dan *moral action* yang secara sinergis berkontribusi terhadap pengembangan kecerdasan moral peserta didik. Penerapan *moral training* dalam pembelajaran inovatif pada pendidikan berbasis karakter diharapkan dapat: (1) mengembangkan kecerdasan moral secara komprehensif; (2) memberi pengalaman belajar bervariasi dengan suasana belajar yang menyenangkan; (3) peserta didik lebih kritis dan kreatif; (4) meningkatkan kematangan emosional; dan (5) mau berpartisipasi dalam proses perubahan. *Moral training* menjadi lebih penting, ketika dikaitkan dengan tujuan pendidikan moral yang hendak dicapai. Menurut

Frankena (dalam Adisusilo, 2012:128), tujuan pendidikan moral mencakup: (1) membantu peserta didik untuk dapat mengembangkan tingkah-laku yang secara moral baik dan benar; (2) membantu peserta didik untuk dapat meningkatkan kemampuan refleksi secara otonom,...; (3) membantu peserta didik untuk menginternalisasikan nilai-nilai moral, norma-norma dalam menghadapi kehidupan konkretnya; (4) membantu peserta didik untuk mengadopsi prinsip-prinsip universal, nilai-nilai kehidupan sebagai pijakan untuk pertimbangan moral dalam menentukan suatu keputusan; dan (5) membantu peserta didik untuk mampu membuat keputusan yang benar, bermoral, dan bijaksana.

Paparan di atas, sekaligus menunjukkan bahwa pergeseran pola pembelajaran dari konvensional ke inovatif dalam melatih moral peserta didik, menuntut guru secara profesional untuk dapat menguasai berbagai pendekatan, model, strategi, metode, teknik, berikut komponen lainnya, dalam kegiatan belajar-mengajar yang kemudian diskenariokan dalam rencana program pembelajaran.

Sekaitan dengan keterhubungan antara pembelajaran inovatif dengan pendidikan karakter, sudah selayaknya seorang guru profesional mampu merancang RPP berkarakter sebagai skenario *moral training* dalam mengembangkan kecerdasan moral peserta didik. Dalam menyusun RPP berkarakter, guru sebagai aktor pendidik karakter dapat berpedoman pada deskripsi nilai-nilai pembangunan karakter bangsa yang telah dirumuskan Depdiknas (dalam Setiawan, 2012) sebagai berikut:

No	Nilai Karakter	Indikator	
1	Taqwa	1	mengucapkan doa setiap memulai dan mengakhiri suatu pekerjaan.

No	Nilai Karakter	Indikator
		2 bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan Allah
		3 mengerjakan setiap perintah agama dan menjauhi larangan-Nya.
		4 menyesal setiap membuat kesalahan dan segera mohon ampun kepada Tuhan.
		5 menolak setiap ajakan untuk melakukan perbuatan tercela.
2	Jujur	1 berkata benar (tidak bohong).
		2 berbuat sesuai aturan (tidak curang).
		3 menepati janji yang diucapkan.
		4 bersedia menerima sesuatu atas dasar hak
		5 menolak sesuatu pemberian yang bukan haknya.
		6 berpihak pada kebenaran.
		7 menyampaikan pesan orang lain.
		8 satunya kata dengan perbuatan.
3	Disiplin	1 patuh pada setiap peraturan yang berlaku.
		2 patuh pada etika sosial/masyarakat setempat
		3 menolak setiap ajakan untuk melanggar hukum.
		4 dapat mengendalikan diri

No	Nilai Karakter	Indikator
		terhadap perbuatan tercela.
		5 hemat dalam menggunakan uang dan barang.
		6 menyelesaikan tugas tepat waktu.
		7 meletakkan sesuatu pada tempatnya.
		8 dapat menyimpan rahasia.
4	Demokratis	1 bersedia mendengarkan pendapat orang lain.
		2 menghargai perbedaan pendapat.
		3 tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
		4 toleran dalam bermusyawarah/diskusi.
		5 bersedia melaksanakan setiap hasil keputusan secara bersama.
		6 menghargai kritikan yang dilontarkan orang lain.
		7 membuat keputusan yang adil.
5	Adil	1 memperlakukan orang lain atas dasar kebenaran.
		2 mampu meletakkan sesuatu menurut tempatnya.
		3 tidak ingin lebih atas sesuatu yang bukan haknya.
		4 membela orang lain yang diperlakukan tidak adil.
		5 memperlakukan orang lain sesuai haknya.

No	Nilai Karakter	Indikator	
		6	tidak membedakan orang dalam pergaulan.
		7	menghargai kerja orang lain sesuai hasil kerjanya.
6	Bertanggung Jawab	1	menyelesaikan setiap pekerjaan yang dibebankan sampai tuntas. .
		2	tidak mencari-cari kesalahan orang lain.
		3	berani menanggung resiko terhadap perbuatan yang dilakukan.
		4	bersedia menerima pujian atau celaan terhadap tindakan yang dilakukan.
		5	berbicara dan berbuat secara berterus-terang (tidak seperti ungkapan, lempar batu sembunyi tangan).
		6	melaksanakan setiap keputusan yang sudah diambil dengan tepat dan bertanggung jawab.
7	Cinta tanah air	1	merasa bangga sebagai orang yang bertanah air Indonesia.
		2	bersedia membela tanah air untuk kejayaan bangsa.
		3	peduli terhadap rusaknya hutan/lingkungan di tanah air.
		4	bersedia memelihara lingkungan dan melindungi

No	Nilai Karakter	Indikator
		flora dan fauna Indonesia.
		5 dapat menyimpan rahasia negara.
		6 mau hidup dimanapun di wilayah negara kesatuan Indonesia.
8	Orientasi pada keunggulan	1 gemar membaca.
		2 belajar dengan bersungguh-sungguh. .
		3 mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan sebaik mungkin.
		4 berupaya mendapat hasil yang terbaik.
		5 senang dalam kegiatan yang bersifat kompetitif.
		6 tidak cepat menyerah mengerjakan sesuatu yang mengandung tantangan.
		7 memiliki komitmen kuat dalam berkarya.
		8 menjaga din hidup sehat.
		9 gemar membaca dan menulis.
9	Gotong Royong	1 memahami bahwa kerjasama merupakan kekuatan.
		2 memahami hasil kerjasama adalah untuk kebaikan bersama.
		3 dapat menyumbangkan pikiran dan tenaga untuk

No	Nilai Karakter	Indikator	
			kepentingan bersama.
		4	dapat melaksanakan pekerjaan bersama dengan cara yang menyenangkan.
		5	bantu-membantu demi kepentingan umum.
		6	bersedia secara bersama-sama membantu orang lain.
		7	bersedia secara bersama-sama membela kebenaran.
		8	dapat bekerja dengan giat dalam setiap kelompok kerja.
10	Menghargai	1	mengucapkan terima kasih atas pemberian atau bantuan orang lain.
		2	santun dalam setiap kontak sosial.
		3	menghormati pemimpin dan orang tua.
		4	menghormati simbol-simbol negara.
		5	tidak mencela hasil karya orang lain.
		6	memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin.
		7	tidak mengganggu orang yang sedang beribadah menurut agamanya.
		8	menerima orang lain apa adanya.
11	Rela Berkorban	1	mau mendengarkan teman berbicara sampai selesai walaupun ada keperluan lain

No	Nilai Karakter	Indikator
		yang mendesak.
		2 bersedia membantu teman orang lain yang mengalami musibah.
		3 ikhlas bekerja membantu orang lain dan harus meninggalkan pekerjaan sendiri untuk sementara.
		4 bersedia menyumbang untuk kepentingan dana kemanusiaan dalam keuangan pribadi sangat terbatas.
		5 rela memberi fasilitas (kemudahan) kepada orang lain sungguh pun secara diri sendiri sangat membutuhkan fasilitas tersebut.
		6 mau memperjuangkan kepentingan orang lain walaupun mengandung resiko untuk diri sendiri.

Sumber: Puskur (2010).

Beberapa nilai karakter pada tabel, dapat dikemas melalui penerapan model-model pembelajaran inovatif dalam mengembangkan kecerdasan moral peserta didik. Ada begitu banyak model-model pembelajaran dengan segala kelebihan dan kekurangan. Tanpa mengecilkan arti model-model pembelajaran yang begitu banyak, guru dapat menggunakan model analisis nilai sebagai salah satu modifikasi yang termasuk ke dalam Values Clarification Technique (VCT). Hall (1973:11) menjelaskan bahwa

VCT sebagai *"by values clarification we mean a methodology or process by which we help a person to discover values through important choices he has made and is continually, in fact, acting upon in and through his life"*. Melalui VCT, peserta didik dilatih untuk menentukan nilai-nilai hidup yang tepat sesuai dengan tujuan hidupnya dan menginternalisasikannya ke dalam pribadi sebagai pedoman dalam bernalar, bersikap dan berperilaku moral. *Moral training* dengan VCT dinilai pas dalam menerapkan pembelajaran nilai, dan dapat dimodifikasi secara kreatif oleh guru dalam mengembangkan kecerdasan moral peserta didik, seperti pada contoh di bawah ini:

- 1) Menginformasikan topik;
- 2) Menginformasikan langkah kegiatan, dengan langkah-langkah, seperti:
- 3) memberi contoh masalah/kasus yang bertentangan dengan topik → mengkaji nilai yang terkait dengan esensi contoh kasus → Menguji komitmen peserta didik terhadap suatu nilai tertentu → memberikan penguatan terhadap komitmen peserta didik;
- 4) Meminta peserta didik mengemukakan contoh-contoh perbuatan yang mencerminkan sikap sesuai topik dari media massa, ilustrasi, dan pengalaman;
- 5) Menugaskan peserta didik menganalisis kasus dengan menunjukkan berbagai nilai yang terkait;
- 6) Menugaskan peserta didik mendiskusikan nilai yang terkait dengan suatu kasus;
- 7) Merumuskan dan melaporkan hasil diskusi dengan menggunakan format model analisis nilai, seperti contoh berikut:

Kelompok	Media-Stimulus	Kategori Nilai Karakter	Kecerdasan Moral
Nama Kelompok	Gambar, foto, lagu, film, puisi, cerita, kasus	Esensi nilai-nilai karakter (Pilih salah satu nilai)	Penalaran terhadap indikator-indikator

	yang mengandung dilema moral	karakter yang ada pada tabel)	karakter (<i>moral knowing, moral feeling, dan moral action</i>)
--	------------------------------	-------------------------------	--

- 8) Silang pendapat secara klasikal;
- 9) Ajukan pertanyaan secara klasikal;
- 10) Menugaskan peserta didik mengemukakan contoh-contoh akibat tindakan seseorang yang bertentangan dengan nilai esensial.

Langkah-langkah *moral training* dalam pembelajaran VCT di atas, dapat dirancang dengan memberikan media-stimulus, seperti: (1) gambar-gambar yang sarat dengan pesan moral dan berkaitan dengan materi pembelajaran; (2) pemanfaatan musik/lagu yang dapat membangkitkan motivasi peserta didik dalam berlatih moral; (3) penayangan film yang mengisahkan nilai-nilai kehidupan; (4) pemanfaatan cerita, puisi dan karya sastra lainnya yang mengandung nilai-nilai moral; dan (5) kasus-kasus yang berisi masalah-masalah kehidupan yang sarat dengan dilema moral.

D. Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut :

- 1) Uraikan menurut pandangan dan pemikiran Anda mengenai hakikat pendidikan karakter.
- 2) Terangkan secara singkat, padat dan jelas mengenai Pendidikan IPS sebagai wahana program sistemik pembangunan karakter bangsa.
- 3) Pilihlah salah satu KD dalam IPS, dan disainlah KD tersebut ke dalam pembelajaran IPS sebagai program pembangunan karakter bangsa.

BAB VII

PENDIDIKAN IPS SEBAGAI PROGRAM PENGUATAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL

A. Petunjuk Belajar

Pada bab VII, Anda diajak untuk mempelajari secara mendalam mengenai Pendidikan IPS sebagai program sistemik penguatan nilai-nilai kearifan lokal. Oleh karena itu, pada bab ini terutama pada bagian proses pembelajarannya, Anda diminta untuk menampilkan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di lingkungan tempat tinggal, dan menyampaikan pada forum diskusi kelas bagaimana eksistensi kearifan lokal tersebut di era kehidupan global.

B. Kompetensi

Setelah Anda selesai mempelajari bab VII ini, diharapkan Anda dapat menjelaskan tentang:

1. Pengertian kearifan lokal.
2. Sumber dan pilar kearifan lokal.
3. Peran kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat

C. Konten

1. Pendahuluan

Kearifan lokal merupakan warisan nenek moyang dalam tata nilai kehidupan yang menyatu dalam bentuk religi, budaya dan adat istiadat. Pada perkembangannya, masyarakat melakukan adaptasi terhadap lingkungannya dengan mengembangkan suatu kearifan yang berwujud pengetahuan, ide atau gagasan dan berbagai bentuk peralatan yang dipadu dengan norma adat, nilai budaya serta aktivitas pengelolaan lingkungan guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Dalam merealisasikan gagasan itu, manusia menciptakan pamali-pamali atau etika bagaimana bertindak dan bertingkah laku terhadap

alam. Hampir sebagian besar etnis di negara ini memiliki aturan-aturan yang dimaksud sebagai bentuk kearifan lokal.

Adalah fakta, bahwa etnis dan suku di Indonesia memiliki kearifan lokalnya sendiri, yang sekaligus menunjukkan betapa kayanya Indonesia dalam kepemilikan kearifan lokal yang dikenal pula sebagai pengetahuan setempat (*indigenous or local knowledge*), atau kecerdasan setempat (*local genius*) yang dapat dijadikan sebagai identitas kebudayaan (Kartawinata, 2011). Namun sayangnya, di era globalisasi dengan marak masuknya nilai-nilai global mondial seperti hedonistik, individualistik dan kapitalistik, telah menggeser nilai-nilai lokal dan semakin menjauhkan anak bangsa dari cara pandang kearifan lokalnya dan bahkan kehilangan jati diri (Latif, 2013). *Trend* masalah ini perlu ditangani secara serius melibatkan seluruh komponen bangsa. Salah satu komponen bangsa yang masih diyakini dalam pembangunan jati diri dan pembangunan karakter bangsa adalah institusi pendidikan. Melalui institusi ini, masyarakat Indonesia sudah sepatutnya untuk kembali kepada jati dirinya melalui pemaknaan kembali dan rekonstruksi nilai-nilai luhur budaya. Rosidi (2011:29) menyatakan, *local genius* pada dasarnya merupakan kemampuan kebudayaan setempat yang dapat dipergunakan dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing. Diperjelas oleh Yunus (2014:37), kearifan lokal pada suatu masyarakat mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai sarana pembangunan karakter bangsa dalam menghadapi arus globalisasi.

Dalam kerangka *nation character building* ini, sudah sepatutnya institusi pendidikan di era global dapat berperan sebagai wadah dalam pembentukan karakter anak bangsa (Setiawan, 2013;2017) melalui penguatan nilai-nilai kearifan lokal. Gagasan ini muncul dilatarbelakangi oleh masalah belum optimalnya pendidikan IPS di perguruan tinggi secara kontekstual

untuk memanfaatkan kearifan lokal kepada para mahasiswanya dalam pembangunan karakter bangsa. Hal ini diduga pendidikan IPS saat ini cenderung mementingkan capaian kompetensi akademik ketimbang capaian kompetensi nilai (Kirschenbaum, 2000). Pembelajaran dalam dunia pendidikan yang masih didominasi oleh *transfer of knowledge* sebagai akibat tumbuhnya budaya belajar verbalistik (Sanusi, 1993), menjadi salah satu penyebab implementasi pembelajaran IPS cenderung lebih memprioritaskan kompetensi akademik. Fenomena ini berpengaruh terhadap pendidikan IPS, yang dalam penyajian nilai-nilai kearifan lokal hanya diserap tetapi tidak terinternalisasi untuk diamalkan dalam kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan tindakan untuk mengangkat kembali nilai-nilai kearifan lokal sebagai sumber inovasi dalam pembelajaran IPS berbasis budaya masyarakat lokal (Nur, 2010).

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis mencoba untuk mendesain ulang pendidikan IPS berbasis etnopedagogi sebagai program penguatan nilai-nilai kearifan lokal. Etnopedagogi sebagai praktik dalam pendidikan berbasis kearifan lokal (Suratno, 2010), dapat dijadikan sebagai model dalam konteks *teaching as cultural activity* (Stigler dan Hiebert, 1999) untuk menciptakan generasi muda yang memiliki kecerdasan kultural. Desain pembelajaran IPS berbasis etnopedagogi ini, diharapkan dapat dijadikan program penguatan nilai-nilai kearifan lokal bagi perguruan tinggi dalam membangun karakter mahasiswanya.

2. Hakikat Kearifan Lokal

Dalam bahasa Inggris, sering kita dengar sebutan *local wisdom*, *local knowledge* atau *local genius* yang berarti kecerdasan setempat. Menurut Rahyono dalam Fajarini (2014: 124) menyatakan bahwa kearifan lokal merupakan kecerdasan manusia dalam sekelompok etnis tertentu yang didapatkan dari pengalaman-pengalaman

yang diperoleh oleh masyarakat. Nilai-nilai tersebut sudah berkembang sejak lama dari mula masyarakat tersebut terbentuk dan hanya berkembang di masyarakat tersebut, jadi belum tentu hal yang sama berlaku juga di tempat lain. Kearifan lokal berkembang dan dipercayai hanya pada suatu kelompok tertentu dan berkembang serta menjadi kebudayaan, yang menurut ahli antropologi kebudayaan tersebut dapat menjadi wadah untuk berkembangnya kearifan lokal seperti ide, kegiatan sosial dan bukti-bukti peninggalan seperti artefak dan lainnya.

Mengingatkan kembali, bahwa kebudayaan sebagaimana disebutkan di atas memiliki tiga wujud. Kebudayaan menurut Koentjaraningrat (1984:5) mempunyai paling sedikit tiga wujud, yakni :

a. Gagasan

Berbentuk kumpula ide-ide, gagasan, hasil pemikiran, nilai-nilai, norma, aturan dan sebagainya yang berbentuk abstrak. Namun, hasil pemikiran masyarakat atau suatu kelompok etnis tersebut bisa di bukukan sehingga bisa dibaca oleh generasi penerus.

b. Aktivitas

Sering disebut dengan sistem sosial yang di dalamnya terdapat aksi dan reaksi yang biasa kita kenal dengan interaksi. Antar manusia melakukan kontak sosial dengan masyarakat sekitar yang memenuhi aturan setempat atau adat setempat. Hal ini konkret dapat diabadikan dengan berbagai dokumentasi karena hal ini terjadi setiap hari.

c. Artefak

Yaitu wujud kebudayaan fisik buah dari kegiatan manusia yang berupa benda, dapat diraba dan diamati. Antara wujud kebudayaan yang berupa gagasan, aktivitas dan artefak ini saling berkaitan, tidak dapat dipisahkan. Karena wujud gagasan akan memberikan manusia id agar bisa berbuat sesuatu dan akhirnya menghasilkan sebuah karya sebagi

warisan leluhur. Kita tahu, banyak peninggalan dari zaman megalitikum yang merupakan zaman batu besar salah satunya prasasti. Ini adalah salah satu kearifan lokal yang diwariskan oleh nenek moyang kita.

Bicara tentang kearifan lokal tentu kita diingatkan bahwasanya Indonesia adalah negara yang majemuk negara yang multi kultur kaya budaya, kaya etnik terdiri dari banyak suku bangsa, banyak bahasa daerah sehingga mempunyai tradisi-tardisi unik atau petatah – petitih atau falsafah yang banyak dianggap sebagai kearifan lokal suatu daerah. Berikut beberapa contoh:

a) Sumatera Barat

Bulek ai dek pambuluah, bulek kato jo mupakkek (bulat air karena pembuluh, bulat kata dengan mufakat); *Adat ba sandi syara', syara' ba sandi kitabullah* (adat berlandaskan hukum, hukum bersendikan kitab suci).

b) Batak

Hasangapon, hagabeon, hamoraon, sarimatua (kewibawaan, kekayaan, keturunan yang menyebar, kesempurnaan hidup). *Nilakka tu jolo sarihon tu pudi* (melangkah ke depan pertimbangkan ke belakang).

c) Minahasa:

Torang Samua Basudara (kita semua bersaudara); *Mapalus* (gotong royong); Tulude-Maengket (kerja bakti untuk rukun), *Baku-baku bae, bakubaku sayang, baku-baku tongka, bakubaku kase inga* (saling berbaik-baik, sayang menyayangi, tuntun-menuntun, dan ingat mengingatkan); *Sitou Timou, Tumou Tou* (saling menopang dan hidup menghidupkan: manusia hidup dan untuk manusia lain).

d) DIY/Yogyakarta

Alon-alon asal kelakon (biar pelan asal selamat: kehati-hatian), *Sambatan* (saling membantu).

Seperti yang ditulis oleh pusat penelitian kebijakan pendidikan dan kebudayaan bahwasanya kearifan lokal adalah nilai dan norma yang berlaku dalam suatu

masyarakat yang tidak diragukan lagi kebenarannya dan dijadikan sbg acuan dalam bertindak dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku yang bersifat umum dan berlaku di masyarakat tertentu secara meluas dan turun temurun kelak akan berkembang menjadi nilai-nilai luhur yang akhirnya disebut sebagai budaya. Maka dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal sudah jelas bersemayam di dalam budaya lokal yang mencerminkan pola hidup suatu masyarakat tertentu yang memegang teguh nilai-nilai luhur yang dipercaya di tempat tersebut.

Di setiap budaya pasti tersirat nilai-nilai yang berguna untuk membangun masyarakat. Contohnya nilai dan norma yang berkembang di masyarakat akan mengatur dan menjadi pemandu bagi seseorang dalam berlaku saat berada di suatu daerah. Contoh cara berbicara, berperilaku dan cara berpakaian. Itu semua dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat setempat. Sekarang tugas generasi muda bagaimana caranya agar nilai-nilai yang terdapat dalam budaya atau di dalam kearifan lokal itu supaya tidak tergerus zaman. Kita tahu pengaruh globalisasi begitu besar terhadap integritas bangsa belakangan ini.

Kita sadar makin kesini masyarakat banyak yang bersifat individualisme, ada juga banyak kaum muda yang terpengaruh oleh pola hidup bangsa lain. Mereka lebih menggandrungi segala sesuatu dari idola mereka yang berasal bangsa Barat yang mereka bilang itu keren. Hingga proses *westernisasi* itu mudah saja masuk negara kita. Sehingga terjadilah degradasi moral pada remaja sekarang. Banyak hal yang kita saksikan belakangan di berita-berita yang sedang viral. Yang membuat kita sebagai pembaca jadi sedih dan terenyuh.

Padahal, tidak cocok dengan negara kita yang berlandaskan pancasila. Yang mana kita tahu ideologi negara kita berbeda dengan negara lain yakni pancasila. Pancasila lahir dari pemikiran para tokoh bangsa ini seperti *the founding father* kita dan itu semua tidak lepas

dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang beragam dan berada di bawah payung Bhineka tunggal ika. Yang mana artinya walau kita berbeda-beda namun tetap satu jua.

Untuk menghidupkan kembali nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam kearifan lokal kepada masyarakat modern, maka dapat kita lakukan menginternalisasikan nilai-nilai luhur tersebut melalui pendidikan formal dalam bentuk pembelajaran muatan lokal. Mata pelajaran mulok penulis pikir sangat bersumbangsiah dalam melestarikan nilai-nilai luhur bangsa. Contohnya dulu pernah ada mata pelajaran budaya alam Minangkabau di Sumatera Barat untuk tingkat Sekolah Dasar. Disana dibahas semua tentang nilai-nilai yang tersirat disetiap warisan leluhur.

Peserta didik diingatkan lagi bahwasanya ada cara berkomunikasi yang baik, ada makna yang tersirat misal yang terdapat di salah satu ukiran rumah gadang ada filosofi yang menggambarkan "itik pulang petang" di masyarakat setempat itu berarti kita hidup harus punya aturan, waktunya pulang tanpa di cari atau dipanggil kita akan pulang dengan sendirinya dan tabu kiranya sudah petang perempuan masih berkeliaran di luar rumah. Terlihat nilai ini mulai memudar pada perempuan zaman sekarang bukan? Nah, Diajarkan juga bagaimana cara bersikap kepada yang lebih muda dari kita, kepada yang lebih tua atau separtaran dengan kita. Semua ada aturan dan pilihan kata yang digunakan saat berkomunikasi. Semua di ajarkan oleh guru melalui mata pelajaran MULOK, sehingga peserta didik itu punya pegangan yang kuat saat nanti sudah dewasa dan harus jauh dari orang tuanya saat kelak harus menuntut ilmu ke kota.

Sebegitu pentingnya penginternalisasian nilai-nilai luhur bangsa melalui pendidikan formal, salah satu medianya bisa dengan tetap mempertahankan mata pelajaran muatan lokal di sekolah-sekolah. Sesuai pepatah yang sering kita dengar bahwasanya dimana bumi di injak maka disitulah langit dijujung. Jadi contohnya tidak hanya ada di sumatera barat tetapi juga

ada di pulau Jawa dan lain-lain. Contoh kalau di tanah Jawa ada mata pelajaran tentang bahasa daerah, disana peserta didik akan diajarkan bagaimana berbahasa Jawa yang halus yang banyak mengandung makna agar tidak hilang digerus zaman. Kita tahu selain dampak negatif tentu globalisasi juga berdampak positif. Bahkan di dunia pendidikan kita sudah sangat menikmatinya sekarang dikala negeri bahkan dunia dilanda oleh pandemic.

Tenaga pengajar tetap bisa melakukan transfer ilmu melalui jarak jauh, karena pesatnya perkembangan Ilmu Pengetahuan (IPTEK). Berbagai *platform* konferensi untuk perkuliahan/pembelajaran daring ditawarkan agar pembelajaran atau perkuliahan tersebut tetap terlaksana dengan baik dan maksimal. Jangan lupa, bahwa sistem teknologi merupakan salah satu dari tujuh macam unsur kebudayaan yang dalam perkembangannya tidak terlepas dari peran kearifan lokal.

3. Sumber dan Pilar Kearifan Lokal

Suardiman dalam Azan (2013), mengemukakan ada 8 (delapan) lingkup nilai-nilai kearifan lokal, yakni:

- a. Norma-norma lokal yang berkembang, seperti falsafah, pantangan atau anjuran di suatu tempat
- b. Ritual dan tradisi suatumasyarakat yang mengandung nilai
- c. Folklore dalam masyarakat bisa berupa legenda, mitos, verita rakyat, lahu rakyat dan legenda yang biasanya tersita pesan yang mendalam dan dipahami oleh komunitas tertentu/lokal
- d. Informasi yang terdapat pada tetua-tetua adat, pemimin spiritual dan sesepuh masyarakat suatu komunitas
- e. Manuskrip atau kitab suci yang dipercayai oleh masyarakat setempat
- f. Cara masyarakat lokal menjalani kehidupan sehari-hari

- g. Alat dan bahan yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup
- h. Kondisi lingkungan sekitar yang dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari

Dapat disimpulkan bahwa sumber nilai-nilai kearifan lokal tersebut, berasal dari berbagai hasil kebudayaan yang diwariskan secara turun temurun dalam suatu masyarakat. Banyak sekali sumbernya misal bisa dari adat istiadat yang berkembang dalam suatu masyarakat, cagar budaya, kesenian, kerajinan, cerita rakyat dan lain-lain yang sudah melekat pada diri suatu masyarakat lokal dalam komunitas tertentu. Hal inilah yang harus dilestarikan agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak hilang digerus zaman, walaupun anak muda akan banyak yang berpendapat hal ini sudah usang dimakan usia dan dianggap sudah tidak relevan lagi dengan zaman modern ini.

Terkait dengan bahasan sumber dan lingkup kearifan lokal, perlu dipahami makna kearifan lokal berdasarkan pilar-pilarnya. Menurut Wagiran (2012), ada beberapa pilar kearifan lokal, yakni:

- a. Kearifan lokal berbentuk peraturan tertulis misalnya aturan dalam suatu masyarakat. Misalnya, kewajiban dalam menuntut ilmu atau jam bertamu dll
- b. Kearifan lokal dalam menjaga keharmonisan antar sesama makhluk sosial contohnya tetap mempertahankan nilai-nilai yang ada dalam aktivitas gotong royong yang sampai saat ini masih dipegang teguh di komunitas-komunitas tertentu
- c. Kearifan lokal yang berhubungan dengan seni. Maksudnya adalah mempertahankan kesenian yang masih mengandung unsur nilai kebersamaan, menghormati, keteladanan dan sebagainya
- d. Kearifan lokal dalam bentuk anjuran atau tidak tertulis. Namun dia kuat artinya disepakati bersama oleh perangkat masyarakat dan dipatuhi secara bersama.

4. Peran Kearifan Lokal dalam Kehidupan Bermasyarakat

Berdasarkan bahasan terdahulu, dapat dipahami pentingnya kearifan lokal dalam menjaga dan membangun kehidupan bermasyarakat yang harmoni. Dalam konteks pendidikan, nilai-nilai kearifan lokal dapat ditransmisikan ke peserta didik dalam membangun karakter ke-Indonesia-an dan sekaligus dapat dirancang sebagai program pendidikan karakter. Menurut Kemendiknas yang kami kutip dari layanan-guru.blogspot.com, pendidikan karakter berperan dalam membentuk nilai-nilai karakter peserta didik, seperti:

- a. Religius
Yaitu sikap patuh terhadap ajaran agama yang dianutnya, saling tenggang rasa terhadap agama lain dan mampu hidup rukun dengan yang berbeda agama. Kami rasa ini sejalan dengan butir satu dalam Pancasila yakni Ketuhanan yang maha esa.
- b. Jujur
Bisa menjadi pribadi yang dapat dipercaya baik ucapan, sikap dan dalam berbuat
- c. Toleransi
Sikap yang mencerminkan dapat menghargai apapun yang berbeda dari dirinya, baik itu pendapat, etnis, budaya dll
- d. Disiplin
Sikap yang menunjukkan kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku
- e. Kerja keras
Mampu mengerjakan dan menyelesaikan sesuatu dengan sungguh-sungguh
- f. Kreatif
Berpikir dan melakukan sesuatu dengan cara-cara baru yang inovatif
- g. Mandiri
Mampu menyelesaikan tanggungjawabnya sendiri tanpa dan tidak mudah bergantung pada orang lain

- h. Demokratis
Cara berfikir, bersikap dan bertindak yang meyelaraskan antara hak dan kewajiban dirinya dan orang lain
- i. Rasa ingin tahu
Selalu menjadi pribadi yang ingin memperdalam ilmu dan memperluas wawasan
- j. Semangat kebangsaan
Selalu menjadi pribadi yang selalu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok
- k. Cinta tanah air
Sikap yang peduli, setia dan bersedia memberikan penghargaan tertinggi terhadap bangsanya
- l. Menghargai prestasi
Selalu berusaha menjadi pribadi yang seslalu berprestasi yang berguna bagi sesama dan selalu menghormati keberhasilan orang lain
- m. Bersahabat dan komunikatif
Mampu berkolaborasi dengan orang lain dan menjalin hubungan yang baik
- n. Cinta damai
Mampu menjadi pribadi yang menyenangkan sehingga kehadirannya ditunggu oleh orang banyak
- o. Gemar membaca
Kebiasaan meluangkan waktu untuk menimba ilmu, ingat buku merupakan jendela dunia.
- p. Peduli lingkungan
Sikap yang selalu menjaga kelestarian alam, mencegah kerusakan alam dan selalu berupaya memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi
- q. Peduli sosial
Yakni sikap saling tolong menolong sebagai aplikasi dari rasa simpati
- r. Tanggungjawab
Menjadi pribadi yang selalu melaksanakan tugasnya sampai tuntas, dan tidak ada alasan untuk mangkir

dari tugas-tugasnya baik kepada dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, nusa, dan bangsa bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Anam (Barnawi & M. Arifin, 2012), menambahkan bahwa pendidikan karakter sebagai proses internalisasi nilai budaya pada diri seseorang atau masyarakat sehingga membuatnya menjadi beradab. Pendidikan menurutnya bukan hanya sekedar transfer ilmu semata tetapi harus bisa menjadi sarana pembudayaan atau penyaluran nilai (enkulturasi dan sosialisasi). Anak harus mendapatkan pendidikan yang menyentuh ranah dasar kemanusiaan, yakni: afektif, kognitif dan psikomotorik.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa kearifan lokal yang tetap terjaga akan sangat berperan penting dalam membangun karakter anak bangsa. Upaya ini dapat dijadikan sebagai program penguatan nilai-nilai kearifan lokal bagi generasi muda, sekaligus dalam membendung arus globalisasi serta menjauhkan generasi penerus bangsa dari dampak negatif globalisasi.

D. Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Coba jelaskan kembali dengan pandangan dan pemikiran Anda sendiri mengenai:
 - a. Pengertian kearifan lokal.
 - b. Sumber dan pilar kearifan lokal.
 - c. Peran kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat
- 2) Uraikan secara singkat, padat dan jelas, mengenai pendidikan IPS sebagai program penguatan nilai-nilai kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, G. (2003). *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Depdiknas Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pendidikan Menengah Pertama.
- Adisusilo, J.R.S. (2012). *Pembelajaran Nilai Karakter*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali, M. (2013). *Strategi untuk Mengimplementasikan Pendidikan Budi Pekerti Secara Efektif Di Sekolah*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, <http://staff.uny.ac.id>, diakses 15 Oktober 2013.
- Azyumardi, A. (2002). "Pendidikan Kewargaan untuk Demokrasi di Indonesia." Makalah dalam Seminar Nasional Pendidikan Kewargaan (*Civic Education*) di Perguruan Tinggi, Jakarta, 28-29 Mei.
- Azan, R. R. (2013). "Upaya Penguatan Karakter Melalui Internalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Pada Pembelajaran Sejarah di SMA Negeri 1 Kendal Tahun Ajar 2012/2013". *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Barnawi & Arifin, M. (2012). *Strategi dan Kebijakan Pembelajaran Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Dimiyati, M. (1989). *Pengajaran Ilmu-ilmu Sosial di Sekolah: Bagian Integral Sistem Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Departemen pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen Dikti, P2LPTK.
- Djahiri, A.K. (1983). *Pengajaran Studi Sosial/IPS (Dasar-dasar Pengertian Metodologi, Model Belajar-mengajar IPS)*. Bandung: LPPMP FPIPS IKIP Bandung.
- Banks, J.A. (1977). *Teaching Strategies for the Social Studies*. California: Addison Wesley Pub.Co.
- Barr, R.D., Barth, J.L., & Shermis, S.S. (1977). *Defining the Social Studies*. Virginia: National Council for the Social Studies.

- Borba, M. (2008). *Buiding Moral Inteligence, The Seven Essential Virtues that Teach Kids to do The Right Thing*, Tert. "Membangun Kecerdasan Moral, Tujuh Kebajikan Utama untuk Membentuk Anak Bermoral Tinggi", oleh Lina Yusuf. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- BPSDMPK-PMP. (2013). *Modul Pelatihan IPS SMP/MTs Impelementasi Kurikulum 2013*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bruce, J. and Marsha W. (1996). *Model of Teaching*. London: Allyn and Bacon.
- Cholisin. (2005). *Pengembangan Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) dalam Praktik Pembelajaran Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Makalah Disampaikan pada *Training of Trainers (ToT) Nasional Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Asrama Haji Surabaya 3-17 Mei 2005*.
- Dardji, D. (1996). *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Depdiknas, (2003). *Kurikulum 2004 Standar Kompetensi mata Pelajaran Pengetahuan Sosial SMP dan MTs*. Jakarta.
- _____, (2006). *Kurikulum 2004*. Jakarta, Depdiknas.
- _____, (2007). *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: PP Cipta Jaya.
- Djahiri, A. K. (1966). *Menelusur Dunia Afektif. Pendidikan Nilai dan Moral*. Bandung: Lab. Pengajaran PMP IKIP.
- _____, A.K. (1985). *Stategi Pengajaran Afektif- Nilai-Moral*. Bandung: Granesia.
- _____, A.K. (1996). *Menelusuri Dunia Afektif Pendidikan Nilai dan Moral*. Bandung: Lab. Pengajaran PMP IKIP.
- Djahiri, A. K. & Ma'mun, F. (1978). *Pengajaran Studi Sosial (IPS)*. Bandung: FKIS IKIP Bandung.
- Eka, P. (2013). *Pengertian Nilai, Hakikat dan Makna Nilai, Klasifikasi Nilai, dan Hierarki Nilai*, <http://ekazai.wordpress.com>, diakses 20 Oktober 2013.

- Fathurrahman, P. & Sutikno, M.S. (2007). *Strategi Belajar Mengajar (Strategi Mewujudkan Pembelajaran Bermakna Melalui Penanaman Konsep Umaum dan Konsep Islami)*. Bandung: Refika Aditama.
- Fajarini, U. (2014). "Peran Kearifan Lokal dalam Pendidikan Karakter". *Jurnal Sosio Didaktika*. Vol. 1, No. 2 hal. 123-130.
- Gagne, R.M. Briggs, L.J & Wager, W.W. (1992). *Principles of Instructional Design*. Orlando: Holt, Rinehart and Winston.
- Goleman, D. (2001). *Kecerdasan Emosional*, Terj. Hermaya, T. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Gross, R.E. et al. (1978). *Social Studies for Our Time*. New York: John Wiley
- Gulo, W. (2002). *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Grasindo
- Hall, B. (1973). *Value Clarification as Learning Process*. New York: Paulist Press.
- Halstead, J. Mark dan Taylor, Monica, J. (2000). "Learning and Teaching about Values: A Review of Recent Research." *Cambridge Journal of Education*. Vol. 30 No.2, pp. 169-202.
- Handika. (2013). *Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Pancasila*, <http://handikap60.blogspot.com>, diakses tanggal 20 Oktober 2013.
- Hamid, H.S. (2010). *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional, Badan Penelitian dan Pengembangan, Pusat Kurikulum.
- Hobsbawm, E.J. and Ranger, T.O. (eds). (1983). *The Invention of Tradition*. New York: Cambridge University Press.
- Hafid dkk. (2015). *Pendidikan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan-Kemendikbud.
- Ischak, dkk. (1997). *Pendidikan IPS di SD*. Jakarta: Universitas Terbuka

- Isjoni. (2007). *Integrated Learning, Pendekatan Pembelajaran IPS di Pendidikan Dasar*. Bandung: Falah Production.
- Jarolimeck, J. & Parker, W.C. (1993). *Sosial Studies in Elementary School*. (9th 3d). New York: Macmillan Publishing Company.
- _____, (1933). *Sosial Studies for Elementary School*. New York: Mc. Millan Publishing.
- Kaelan, M.S. (2008). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma
- _____, (2002). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma.
- _____, (2003). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaplan, R.B. (1966). "Cultural Thought Patterns In Intercultural Education" Language Learning.
- Kartawinata, Ade. M. (2011). Merentas Kearifan Lokal di Tengah Modernisasi dan Tantangan Pelestarian, dalam Nasruddin (2011). *Kearifan Lokal di Tengah Modernisasi*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI.
- Latif, Y. (2013). "Globalisasi, Ancaman Ideologis dan Antisipasi Pancasila", dalam Arifinsyah: *Multikultural Kebangsaan Kajian Terhadap Kearifan Lokal Sumatera Utara*. Medan: Perdana Mulya Sarana.
- Katresna72, "Grand Design Pendidikan Karakter" dalam *Katresna72*. *wordpress.com*, Dipublikasikan 23 Oktober 2010, <http://katresna72.wordpress.com/2010/10/23/rand-design-pendidikan-karakter/>.
- KBBI Offline <http://dempobarat.blogspot.com/2013/05/download-gratis-kbbi-offline-terbaru-2013.html>
- Kemko Kesejahteraan Rakyat. (2010). *Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa*. Jakarta: Kemko Kesejahteraan Rakyat.

- Kirschenbaum, H. (2000). "From Values Clarification to Character Education: A Personal Journey." *The Journal of Humanistic Counseling, Education and Development*. Vol. 39, No. 1, September, pp. 4-20.
- Koentjaraningrat. (1984). *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Koesoema, D.A. (2010). *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Jakarta: Grasindo.
- Krattwohl, David. R, Bloom, Benjamin. S., & Masia, Betram B., (Eds). (1964). *Taxonomi of Educational Objectives Handbook II*. Affective Domain. London: Longman Group
- Kuhn, Thomas S. (2000). *The Structure of Scientific Revolution: Peran Paradigm dalam Revolusi Sains*. Penerjemah Tjun Surjaman. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Lasmawan, W. (2009). "Merekonstruksi Ke-IPS-an Berdasarkan Paradigma Teknohumanistik", Makalah, disajikan pada Seminar tentang Pendidikan IPS oleh FIS Undiksa, 30 Oktober, 2009.
- _____, (2010). "Merekonstruksi Ke-IPS-an Berdasarkan Paradigma Teknohumanistik", Makalah, disajikan pada Seminar tentang Pendidikan IPS oleh FIS Undiksa, 30 Oktober, 2009.
- Lickona, T. (2000). "Talks About Character Education", wawancara oleh Early Childhood Today", *ProQuest Education Journal*, April, 2000, <http://webcache.googleusercontent.com>., diunduh, 20 April 2010.
- _____, (1991). *Educating for Character: How Our schools can teach respect and responsibility*. New York: Bantam Books.
- Lilik. (2012). *Definisi Nilai dan Norma*, <http://my-world-ly2k.blogspot.com>, diakses tanggal 20 Oktober 2010. Makalah, Yogyakarta. FISE-UNY, *Karakter Bangsa, Makalah*, FISE-UNY, Yogyakarta.

- Margono, dkk. (2002). *Pendidikan Pancasila (Topik Aktual Kenegaraan dan Kebangsaan)*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Mayhood, Wayne, et.al. (1991), *Teaching Sosial Studies in Middle and Senior High Schools*, Macmillan, Toronto
- Nuh, M. (2013). *Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013, Tentang Standar Penilaian Pendidikan*. Depdikbud: Jakarta.
- Nur, A. (2010). *Membangun Pendidikan Indonesia dengan Kembali pada Kearifan Lokal*. Online: <http://ananur.blogspot.co.id2010/08>.
- _____, (2013). *Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum*. Depdikbud: Jakarta
- O'Neil, W. F. (2001). *Ideologi-Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Puskur Balitbang Depdiknas. (2001). *Model Pembelajaran IPS Terpadu*. Jakarta: tanpa penerbit.
- Raven, J. (1977). *Education, Values and Society*. London: HK Lewis & Co. Ltd.
- Rohmat, M. (2004). *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*. Bandung: Alfabeta
- Rokeach, M. (1973). *The Nature of Human Values*. New York: Free Press.
- Rosidi, R. (2011). *Kearifan Lokal dalam Perspektif Budaya Sunda*. Bandung: Kiblat Buku Utama.
- Ruminiati. (2005). *Pengembangan PKn SD*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi.
- Rudy, R. (2013). *Pendidikan IPS (Filosofi, Konsep, dan Aplikasi)*. Alfabeta: Bandung.
- Hasan, S.H. (2010). *Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial* (bagian pertama). Jurusan Pendidikan Sejarah. Bandung: FPIPS IKIP Bandung.
- Sanusi, A. (1971). *Studi Sosial di Indonesia*. Bandung: Badan Penerbit IKIP Bandung.

- _____, (1993). "Quo Vadis Pendidikan IPS?" dalam *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* Edisi Kedua Volume 1 No. 2 Juli-Desember, hlm 9.
- Sapriya. (2007). *Konsep Dasar IPS*. Bandung: UPI PRESS.
- _____, (2009). *Pendidikan IPS Konsep dan Pembelajaran*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sardiman, AM. (2006). Pengembangan Kurikulum Pendidikan IPS di Indonesia: Sebuah Alternatif. *Makalah*. Disampaikan pada Seminar Internasional HISPISI dengan tema: Komparasi Pendidikan IPS Antarbangsa, di Semarang, 7-8 Januari 2006.
- _____, (2009). *Antara Tujuan Pendidikan Nasional dan IPS di Indonesia*
- _____, (2010). *Revitalisasi Peran Pembelajaran IPS dalam Pembentukan 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025*. Jakarta: Sekretariat Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- (2007). *Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun Negara RI*.
- Setiawan, D. (2012). "Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Karakter Melalui Penerapan Pendekatan Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan". *Makalah* disampaikan pada Seminar internasional dan Konferensi Internasional Pendidikan Dasar dengan tema "Early-Childhood Education: Active, Creative, Joyful. Medan: Universitas Negeri Medan 6-7 Juli 2012.
- Sumaatmajda, N & Mardi, K. (1999). *Perspektif Global*. Jakarta: Penerbit UT.
- _____, (2013). "Peran Pendidikan Karakter dalam Pengembangan Kecerdasan Moral", dalam *Jurnal Pendidikan Karakter Tahun III, Nomor I Februari 2013 Hlm 53-63*
- _____, (2017) "Validator's View in the Implementation of Curriculum Oriented on yhr Indonesia National Qualification Framework (KKNi) Social Science

- Faculty, State University of Medan (Unimed)". *IOSR Journal*, Vol: 22 Issue: 12, 2017.
- Soemantri, M. N. (1976). *Metode Pengajaran Civics*. Jakarta: Erlangga.
- _____, (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Solihatin. (2007). *Cooperative Learning*. Analisis Model Pembelajaran IPS Bumi Aksara: Jakarta
- Stigler, W.S dan Hiebert. (1999). *The Teaching Gap: Best Ideas from the World's Teacher for Improving Education in the Classroom*. New York: The Free Press.
- Sudrajat, A. (2013). *Mengapa Pendidikan Karakter?*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, <http://staff.uny.ac.id>, diakses 21 Oktober 2013.
- _____, (2008). *Media Pembelajaran*. Tersedia: <http://akhmadsudrajat.wordpress.com>. Januari 2008).
- Sukmadinata, N.S. (1996). "Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi dalam Era Globalisasi: Suatu Kajian", *Makalah*, disajikan dalam Seminar tentang Sistem Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi Menyongsong Era Global oleh Pusbangkurandik-Balitbangdikbud. Jakarta: Balitbangdikbud.
- Sumaatmadja, N. (1980). *Metodologi Pengajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)*. Bandung; Alumni.
- _____, (2007). *Konsep Dasar IPS*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- _____, (2008). *Konsep Dasar IPS*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Sumarsono, dkk. (2005). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suparlan, dkk. (2002). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Malang: Universitas Negeri Malang.

- Suparman, A. (1997). *Desain Intruksional*. Jakarta: PAU-PPAI Universitas Terbuka.
- Supriatna, N. dkk. (2009). *Pendidikan IPS di SD*. Bandung: UPI PRESS.
- Suratno, T. (2010). *Memaknai Etnopedagogi sebagai Landasan Pendidikan Guru Di Universitas Pendidikan Indonesia*. Bandung: Proceedings of The 4th International Conference UPI dan UPSI Bandung, Indonesia, 8-10 November, 2010.
- Sutikno, M.S. (2009). "*Belajar dan Pembelajaran, Upaya Kreatif dalam Mewujudkan Pembelajaran yang Berhasil*". Bandung: Prospect.
- Suyatno. (2009). *Urgensi Pendidikan Karakter*. Jakarta: Depdiknas.
- _____, (2009). *Urgensi Pendidikan Karakter*. Jakarta: Depdiknas.
- Taba, H. (1967). *Curriculum Development: Theory and Practice*. New York: Harcourt.
- The Liang Gie. (2010). *Etika Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Tim Abdi Guru. (2006). *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMP Kelas VII*. Jakarta: Erlangga
- _____, (1989). *Konsep dan Masalah Pengajaran Ilmu Sosial di Sekolah Menengah*. Jakarta: Proyek P2LPIK.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*
- Usiono. (2007). *Pancasila Membangun Karakter Bangsa*. Jakarta: Hijri Pustaka Utama.
- Yunus, R. (2014). *Nilai-nilai Kearifan Lokal (Local Genius) sebagai Penguat Karakter Bangsa: Studi Empiris tentang Huyula*. Yogyakarta: Deepublish.
- Wahab, A. (1989). *Evaluasi Pendidikan PMP*. Bandung: LPPMP FPIPS IKIP Bandung.
- Wahab, A. & Winataputra. 2002. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)*. Jakarta: Universitas Terbuka.

- Wasliman, I. dan Somantri, N. (2005). *Portofolio dalam Pembelajaran IPS*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Wesley, E.B. (1960). *Teaching Sosial Studies in High School*. Lexington, D.C; Heath.
- Winataputra, U.S. (2009). *Materi dan Pembelajaran IPS SD*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Wagiran. (2012). "Pengembangan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Hamemayu Hayuning Bawana". *Jurnal Kearifan Lokal*. Tahun II, No. 3. Hlm. 329-339.
- Zamroni. (2010), "*Peran Ilmu-ilmu Sosial dalam Pembangunan Karakter Bangsa*", Makalah, disampaikan pada Seminar Internasional oleh HISPISI dan UNM di UNM Makasar, 13-14 Juli 2010.
- Zubaedi. (2011). *Desain Pendidikan Karakter Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Zulkarnaen, N. (1980). *Media Pendidikan*. P3G Depdikbud Jakarta.

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Deny Setiawan M.Si., lahir di Bandung tanggal 8 Maret 1968 dari pasangan bapak S. Gunawan dan ibu Budiningrum Saptarini (Alm). Menikah dengan E. Hartini dikarunia tiga putera, yakni: Ega Maulana Kumbara (1996), Giovanni Ashar merupakan anak pertama dari empat bersaudara. My (2002) dan Argie Jullyan (2008). **Pendidikan:** SDN Kartika Putera Jakarta Selatan (1981); SMPN Cimalaka Sumedang (1984); SMAN 1 Bogor (1987); S-1 FPIPS IKIP Bandung pada Jurusan PMP-Kn (1992); S-2 pada Program Studi Ketahanan Nasional Universitas Gajah Mada (1998); S-3 pada Program Studi Pendidikan IPS dengan Konsentrasi Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Indonesia.

Riwayat Pekerjaan:

1. Dosen Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan (1994-sekarang).
2. Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan (2015-2019)
3. Ketua Penyunting Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan (2009-2019).
4. Asesor BAN-PT (2013-sekarang).



Dra. Rosnah Siregar, S.H., M.Si., lahir di Tanjung Balai pada tanggal 10 Mei 1956. Bertempat tinggal di Medan. Sebagai dosen di Universitas Negeri Medan Fakultas Ilmu Sosial Prodi PPKn. Mengampu mata kuliah Sosiologi dan Antropologi, Pendidikan Kewarganegaraan, Micro Teaching, dan Pembelajaran PKn Dasar dan Lanjutan. Saat ini berjabatan fungsional lektor kepala. Kontak Hp. 081370329290 dan email rosnahsiregar2015@gmail.com.



Maulana Arafat Lubis, M.Pd., lahir di Medan pada tanggal 3 September 1991, anak keenam dari pasangan Alm. H. Salman Lubis dan Hj. Dahrany. Memiliki istri yang bernama Nashran Azizan, M.Pd. e-mail maulanaarafat62@gmail.com atau maulanaarafat62@yahoo.co.id atau maulanaarafat@iain-padangsidimpuan.ac.id.

Situs blog maulanaarafat62.blogspot.co.id. Memiliki beberapa media sosial, yaitu Maulana Arafat Lubis (*Facebook*), [afatlubis](#) (*Instagram*), 085227499030 (*WhatsApp*).

Pendidikan

1. SDN 067242 Medan, 1998-2004.
2. MTs Pesantren Darul Arafah Sumatera Utara, 2004-2007.
3. MAN 2 Model Medan, 2007-2010.
4. S-1 PGMI FITK IAIN Sumatera Utara Medan, 2010-2014.
5. S-2 Pendidikan Dasar UNIMED, 2014-2016.
6. S-3 Pendidikan Dasar UNIMED, sedang berlangsung.

Riwayat Pekerjaan

1. Dosen tetap di Prodi PGMI IAIN Padangsidimpuan (2016-sekarang).
2. Tutor PGSD masukan sarjana di UPBJJ Universitas Terbuka Medan (2019-sekarang).
3. Anggota Perkumpulan Dosen PGMI (PD-PGMI) Indonesia dalam bidang strategi pembelajaran (2017-sekarang).
4. Editor jurnal JMIE (Journal of Madrasah Ibtidaiyah Education) (2020-sekarang).
5. Reviewer Muallimuna: Jurnal Madrasah Ibtidaiyah (2020-sekarang).
